

TERIMA KIM JIN PYO KETUA PARLEMEN KOREA SELATAN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



MAJELIS

MPR RUMAH KEBANGSAAN

EDISI NO.02/TH.XVII/FEBRUARI 2023



Puncak Peringatan
**HARI PERS NASIONAL
2023**

MEDAN, 09 FEBRUARI 2023

Pers Bebas
Demokrasi Bermartabat

HARI PERS NASIONAL 2023

PERS NASIONAL MENGAWAL DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI DI INDONESIA

ISSN 0854-6371



9 770854 637158

06 Refleksi
Merawat Penguatan Daya
Tawar SDA dengan PPHN

27 Nasional
Bansoet Dukung Perpanjangan
Masa Jabatan Kepala Desa

39 Selingan
Bosscha Nama Abadi
di Langit dan Bumi

58 Sosialisasi
Dialog Kebangsaan
Ikadi di Lombok

MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Daftar Isi

EDISI NO.02/TH.XVII/FEBRUARI 2023



08 BERITA UTAMA

Hari Pers Nasional 2023

Pers nasional diharapkan menjadi pers yang independen dan benar-benar mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Karena itu, segenap insan pers dengan kinerja yang profesional harus dapat meningkatkan pemberitaan yang berkualitas, tepat, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta memberi mashlahat.



18 Nasional

Pergantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD, Tunggu Proses Hukum Inkracht



58 Sosialisasi

Dialog Kebangsaan Ikadi di Lombok



39 SELINGAN

Boscha Nama Abdi di Langit dan Bumi



78 Profil

Zulfikar Arse Sadikin

Pengantar Redaksi	04
Perspektif	06
Kolom	30
Aspirasi Masyarakat	47
Gema Pancasila	48
Varia MPR	68
Wawancara	72
Figur	74
Ragam	76
Dari Rumah Kebangsaan	82
Rehal	84



COVER

Edisi No.02/TH.XVII/Februari 2023
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Peringatan Hari Pers Nasional 2023 Mengawal Demokrasi dan Demokratisasi

HARI Pers Nasional (HPN) diperingati setiap tanggal 9 Februari. Tanggal ini mengingatkan pada hari lahir Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada 9 Februari 1945. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, para wartawan ikut berjuang melalui pena. PWI menjadi organisasi wadah para wartawan yang ikut menjadi ujung tombak memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pers atau media (perjuangan) sangat berperan besar menyuarakan informasi dan berita seputar perlawanan terhadap penjajah Belanda.

Pemerintah baru menetapkan Hari Pers Nasional pada tahun 1985 saat masa pemerintahan Orde Baru. Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 5 Tahun 1985 yang berisi penetapan tanggal 9 Februari sebagai Hari Pers Nasional. Sejak itu, HPN diperingati setiap tahun. Pada tahun 2023 ini, puncak peringatan HPN 2023 diselenggarakan di Gedung Serbaguna, Medan, Sumatera Utara. Peringatan HPN 2023 dihadiri Presiden Joko Widodo.

Bersamaan dengan peringatan HPN 2023 dengan tema: "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat" diadakan beragam kegiatan, mulai dari pameran pers Indonesia, workshop digital, seminar dan workshop "Adinegoro dan Media Sustainability", anugerah kebudayaan, seminar olahraga dan rakernas, seminar dana perimbangan pusat dan daerah.

Banyak harapan atas peringatan HPN 2023. Terkait dengan tema demokrasi, Ketua MPR Bambang Soesatyo berharap, pers sebagai piranti demokrasi lebih berperan lagi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid pun berharap sama, agar pers nasional menjadi pers yang independen dan benar-benar mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Fikarno, juga berharap, pers nasional baik cetak maupun elektronik di era digital sekarang ini bisa ikut ambil bagian menyukseskan pesta demokrasi lima tahunan

yang terbesar pada tahun 2024 secara bebas, merdeka, dan mandiri, sehingga demokrasi di Indonesia semakin bermartabat dan semakin dewasa. Untuk pertamakali dalam sejarah pemilu di Indonesia, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024.

Namun, di sisi lain, kita harus mengakui bahwa pers nasional memang mengalami perkembangan cepat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Era digital seperti saat ini telah mengubah banyak pola perilaku kehidupan, termasuk dalam hal pers dan jurnalistik. Kini selain media konvensional (media cetak, elektronik, dan online) muncul media sosial dengan berbagai platform yang juga berisi penyampaian berita dan informasi. Bahkan, setiap orang sekarang bisa menjadi jurnalis lewat jurnalisme warga atau citizen journalism.

Dalam era digital seperti itulah hanya dengan smartphone masyarakat dengan mudah mendapat berita atau informasi, yang belum tentu berasal dari pemberitaan pers nasional atau media konvensional. Di era digital dan keterbukaan seperti ini berita atau informasi bisa datang dari siapa saja dan menyebar kemana-mana. Masyarakat pun seolah dijejali dengan beragam berita dan informasi, termasuk "informasi liar" dari platform-platform media sosial yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam era keterbukaan dan teknologi informasi, informasi dari berbagai platform media sosial mengalir deras tak terbendung, entah berita atau informasi itu valid atau tidak.

Di tengah kebebasan pers yang luar biasa sekarang ini, para insan pers dan pers nasional harus menjadi panutan bagi tegaknya pers yang menjunjung kode etik jurnalistik sehingga masyarakat mendapat berita dan informasi yang baik, benar, dapat dipertanggungjawabkan dan mashlahat bagi semuanya. Ini bisa dicapai apabila para insan pers dan media konvensional mempunyai kinerja profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas pemberitaan dan informasi yang disampaikan kepada publik. □



PENASEHAT

Pimpinan MPR-RI

PENANGGUNG JAWAB

Ma'ruf Cahyono

PEMIMPIN REDAKSI

Siti Fauziah

DEWAN REDAKSI

Dyastasita, Heri Herawan,
Maifrizal

REDAKTUR PELAKSANA

Indro Gutomo

KOORDINATOR REPORTASE

Euis Karmila

REDAKTUR FOTO

Oni Arief Benyamin,
Slamet Eko Suprayitno

REPORTER

Yenita Revi, Try Syilvani,
Ikhwan Bimo F, Amelia Rubinta,
Alfonso DK Tahapary

FOTOGRAFER

Ahmad Suryana, Frinda,
Restu, Suprianto, Faridz Rizky,
Wira, Subhan

PENANGGUNG JAWAB/ KOORDINATOR DISTRIBUSI

Cucu Riwayati

STAF DISTRIBUSI

Ati Oktafia, Anggun Permana,
Achmad Farobi,
Widya Permataningrum

SEKRETARIS REDAKSI

Djarot Widiarto

TIM AHLI

Syahriil Chili, Jonni Yasrul,
Ardi Winangun, Budi Sucahyo,
Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI

Biro Hubungan Masyarakat dan
Sistem Informasi,
Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6,
Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238,
57895251 Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

INDONESIA

INI BARU



EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara



Merawat Penguatan Daya Tawar SDA Dengan PPHN

PENGUATAN daya tawar negara-bangsa bagi maksimalisasi pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang sedang berproses saat ini harus berlanjut dan diperkuat. Karena penguatan daya tawar itu bertujuan menyejahterakan seluruh rakyat, tidak boleh ada langkah mundur. Pokok-pokok Haluan Negara (PPHN) akan memastikan proses penguatan daya tawar itu dilanjutkan oleh generasi pemerintahan di masa depan.

Perubahan zaman dengan segala tuntutan menjadikan ragam SDA yang terkandung di perut bumi Indonesia dibutuhkan industri global untuk membuat aneka produk. Ada nikel, bauksit, tembaga hingga timah. Hari-hari ini, misalnya, ketika banyak komunitas dan sejumlah entitas industri berbicara tentang kendaraan listrik, Indonesia dengan potensi nikel-nya yang besar menjadi salah satu dari sedikit negara yang dijadikan bahan pembicaraan.

Sudah menjadi pemahaman bersama bahwa nikel merupakan salah satu bahan baku utama untuk memproduksi kendaraan listrik, khususnya komponen baterai. Menggunakan nikel untuk baterai akan menghasilkan kepadatan energi yang lebih tinggi. Kapasitas penyimpanan lebih besar dengan biaya lebih rendah. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perut bumi Indonesia menyimpan cadangan nikel tidak kurang dari 72 juta ton. Jumlah cadangan nikel itu mencakup 52% dari total cadangan nikel dunia yang 139,4 juta ton.

Selain nikel, potensi kandungan bauksit juga sangat menjanjikan. Setelah diproses, bijih bauksit menjadi bahan baku untuk memproduksi aluminium yang manfaatnya sangat beragam. Antara lain untuk membuat peralatan dapur, kemasan makanan, hingga bahan untuk memproduksi tinta maupun besi dan baja. Hasil penelitian menyebutkan bahwa sumber daya bauksit terbesar ada di Kalimantan Barat dan Kepulauan Riau. Mengacu pada jumlah pemegang izin usaha pertambangan (IUP), potensi bauksit secara keseluruhan mencapai sekitar 3,47 miliar ton.

Dengan terbentuknya pasar yang baru disertai meningkatnya permintaan akan bahan-bahan tambang itu, adalah keniscayaan jika Indonesia pun membarui orientasi pemanfaatan SDA. Sesuai titah konstitusi yang mewajibkan negara-bangsa memanfaatkan SDA untuk sebesar-besarnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat, maka nilai tambah dari pemanfaatan ragam SDA itu pun harus dikembalikan atau diserahkan kepada rakyat Indonesia. Berpijak pada titah

konstitusi itulah agenda atau program hilirisasi atas ragam SDA itu harus diwujudkan di dalam negeri, at all cost.

Segegap elemen masyarakat hendaknya tidak ragu ketika pemerintah mulai berinisiatif memperbaiki tata kelola ragam SDA. Perubahan zaman dengan segala tuntutan harus dijadikan momentum untuk memulai hilirisasi industri bahan tambang agar nilai tambah dari semua SDA itu diproses di dalam negeri. Hilirisasi memungkinkan Indonesia memproduksi aneka barang kebutuhan, yang sudah barang tentu akan menciptakan banyak lapangan kerja.

Pekerjaan besar generasi terkini dan generasi yang akan datang adalah membangun sistem dan sub-sistem yang mumpuni agar SDA seperti nikel, bauksit, tembaga hingga timah bisa terintegrasi untuk kemudian memungkinkan Indonesia memproduksi aneka barang jadi atau setengah jadi. Sistem dan proses yang demikian pasti memberikan nilai tambah maksimal rakyat Indonesia.

Sebagaimana telah disimak bersama, pemerintah telah memulai langkah-langkah pembaruan tata kelola SDA. Setelah berhasil menguasai porsi saham mayoritas sebesar 51,23% pada PT Freeport Indonesia di tahun 2018, upaya memaksimalkan pemanfaatan SDA terus berlanjut. Terhitung sejak Januari 2020, Indonesia memberlakukan larangan ekspor bijih nikel. Larangan itu ditetapkan dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.

Menyusul kemudian adalah larangan ekspor bijih bauksit sebagai langkah awal mendorong industri pengolahan dan pemurnian bauksit di dalam negeri. Pemerintah telah membuat pernyataan resmi bagi larangan ekspor bijih bauksit selepas paruh pertama tahun 2023. "Mulai Juni 2023, pemerintah akan melarang ekspor bijih bauksit," ujar Presiden Joko Widodo pada pekan ketiga Desember 2022.

Sebelumnya, pemerintah juga telah berhasil mengambilalih ladang minyak blok Rokan dan Blok Mahakam, setelah puluhan tahun pengelolaannya dikendalikan perusahaan asing. Tak berhenti sampai di situ, Pemerintah pun telah memastikan pembaruan tata kelola SDA akan berlanjut.

Ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2022 di Jakarta pada akhir November 2022, Presiden Joko Widodo mendorong semua jajaran pemerintah untuk terus melakukan hilirisasi atas bahan tambang milik Indonesia. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Selain nikel dan bauksit, Pemerintah pun

H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI



tengah mempertimbangkan penghentian ekspor tembaga.

Memang, harus tumbuh keberanian untuk berhenti ekspor bahan mentah. Orientasi pengelolaan dan pemanfaatan SDA harus beralih dan berfokus pada pencarian nilai tambah yang multiplier effect-nya menghadirkan manfaat bagi lebih banyak orang.

Tahun-tahun ketika Indonesia fokus ekspor nikel dalam bentuk bahan mentah, nilai perolehannya hanya sekitar 1,1 miliar dolar AS. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor bahan mentah, nilai perolehan ekspor nikel tahun 2021 melompat 18 kali lipat, menjadi 20,8 miliar dolar AS atau Rp 300 Triliun lebih.

Pembaruan tata kelola SDA Indonesia pasti menghadapi tantangan. Tak hanya tantangan berupa kesiapan tenaga kerja lokal, melainkan juga perlawanan dari negara-negara mitra dagang. Penghentian ekspor bahan mentah nikel digugat Uni Eropa melalui Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Memasuki paruh ketiga Oktober 2022, Indonesia dinyatakan kalah karena melanggar ketentuan WTO tentang larangan ekspor nikel. Namun, Indonesia tidak mundur atau menyerah begitu saja. Presiden Joko Widodo memerintahkan Menteri Luar Negeri untuk merespons keputusan WTO itu dengan mengajukan banding.

Penguatan daya tawar pemanfaatan SDA yang sedang berproses sekarang tentu saja harus dirawat dan diperkuat dari waktu ke waktu dengan segala risikonya. Karena Indonesia pun berambisi menjadi negara maju dan makmur, mestinya tidak ada langkah mundur dari proses penguatan daya tawar sekarang ini.

Saat berpidato pada HUT ke-50 PDI Perjuangan di Jakarta, baru-baru ini, Presiden mendorong keberanian semua elemen bangsa untuk terus bergerak maju mewujudkan kesetaraan di antara bangsa-bangsa. Kendati digugat, Indonesia tidak

boleh takut. Kekayaan SDA Indonesia harus dinikmati oleh rakyat Indonesia. Presiden merasa perlu menegaskan lagi hal ini, "Karena saya ingin presiden ke depan juga berani melanjutkannya. Tidak gampang ciut nyali, tidak gentar, demi kepentingan bangsa, demi kepentingan negara."

Boleh jadi, pernyataan seperti itu mencerminkan kegelisahan Presiden. Dari pernyataan itu, layak dimunculkan pertanyaan tentang "adakah jaminan dan kepastian bahwa proses penguatan daya tawar pemanfaatan SDA Indonesia akan berlanjut di masa datang?"

PPHN yang sedang dirumuskan MPR RI memberi perhatian khusus tentang masa depan pemanfaatan SDA. MPR sepakat dengan kebijakan dan langkah-langkah yang sudah dijabarkan pemerintah sejauh ini. Karena sangat penting dan strategis, PPHN memastikan bahwa proses penguatan daya tawar SDA itu akan berkesinambungan dan wajib diterima sebagai keniscayaan.

PPHN tentang maksimalisasi pemanfaatan SDA harus menjadi pedoman bersama pemimpin nasional Indonesia dari masa ke masa. Sebab, PPHN merupakan instrumen konkret kedaulatan rakyat yang dioperasionalisasi untuk membangun negara kesejahteraan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh komponen bangsa. Maka, PPHN yang telah disepakati dan ditetapkan wajib dilaksanakan oleh Presiden demi kesejahteraan rakyat.

Tentang landasan hukum PPHN akan ditetapkan kemudian. Bisa saja ditetapkan beralaskan dasar hukum konvensi ketatanegaraan. Atau, PPHN juga dapat dilaksanakan melalui reformulasi kedudukan TAP MPR dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU MD3. Namun, ada jaminan bahwa PPHN akan memastikan proses penguatan daya tawar pemanfaatan SDA Indonesia dilanjutkan oleh generasi pemerintahan di masa depan. □

Hari Pers Nasional 2023

Pers Nasional Mengawal Demokrasi dan Demokratisasi di Indonesia



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Pers nasional diharapkan menjadi pers yang independen dan benar-benar mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Karena itu, segenap insan pers dengan kinerja yang profesional harus dapat meningkatkan pemberitaan yang berkualitas, tepat, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan, serta memberi mashlahat.

BEBERAPA pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) datang menemui Ketua MPR Bambang Soesatyo di Ruang Kerja, Senin, 30 Januari 2023. Pengurus PWI yang hadir, antara lain: Ketua Umum Atal S. Depari, Wakil Bendahara Umum Dar Edy Yoga, dan Wakil Sekjen Suprpto. Para pengurus PWI ini sekaligus Panitia Hari Pers Nasional 2023 (HPN 2023). Peringatan Hari Pers Nasional 2023 digelar pada 9 Februari 2023 di Gedung Serbaguna, Medan, Sumatera Utara. Puncak peringatan HPN 2023 ini dihadiri Presiden Joko Widodo.

Dengan mengusung tema: "Pers Bebas, Demokrasi Bermartabat," peringatan HPN 2023 diisi dengan pameran HPN yang menunjukkan perkembangan pers Indonesia selama tiga abad, workshop digital di Kampus USU, seminar dan workshop Adinegoro, serta media sustainability di Hotel Grand Mercure Medan, Anugerah Kebudayaan di Hotel Santika Dyandra Medan, dan program Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) di Hotel Khas Parapat.

Bamsuet, sapaan Bambang Soesatyo, tidak asing dengan kehidupan pers. Saat kuliah, Bamsuet pernah menjadi wartawan karena aktif dalam pers kampus. Bamsuet juga pernah tercatat sebagai pemimpin redaksi dan juga wartawan di berbagai media di Indonesia. Karena itu, Bamsuet mendukung penuh peringatan HPN 2023.

"Peringatan HPN harus menjadi momentum untuk semakin meningkatkan peran pers sebagai piranti demokrasi yang

mencerdaskan bangsa, melalui sajian informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya. Karena itu, segenap insan pers harus dapat meningkatkan pemberitaan berkualitas, yang hanya dapat dihasilkan oleh pers yang berkinerja profesional," ujar Bamsuet.

Tak jauh berbeda, memperingati HPN 2023, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengharapkan, pers nasional menjadi pers yang independen dan benar-benar mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia. Apalagi, pada tahun politik ini, pers sebagai pilar keempat demokrasi memiliki peran di tengah beragam dinamika perpolitikan yang ada. Beragam dinamika yang muncul itu disebabkan karena pemberitaan yang berkembang dan bermacam-macam. Padahal, belum tentu semua berasal dari pemberitaan pers nasional, karena di era digital dan keterbukaan ini informasi bisa berasal dari siapa saja dan tersebar kemana-mana. Masyarakat saat ini terjerjeli informasi liar seperti di sosial media yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Maka sangat penting pers nasional sebagai mainstream harus menjadi soko guru bagi tegaknya pers dan kegiatan pers yang betul-betul melaksanakan dan menegakkan kode etik jurnalistik, sehingga masyarakat akan teredukasi dan memahami karena memperoleh rujukan informasi yang benar. Pers nasional harus menjadi soko guru dari informasi yang baik, benar, dan mashlahat. Semua ini harus ada di pers nasional," katanya kepada *Majelis*.



Menurut HNW, pers nasional dan kebebasan pers di Indonesia sudah cukup baik. Namun, dalam era keterbukaan dan teknologi informasi, maka informasi di sosial media mengalir deras tak terbandung, entah informasi atau berita itu valid atau tidak. Bahkan, ada narasi atau informasi di sosial media yang mengancam keutuhan bangsa. Sebab, sosial media sangat bebas dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. “Untuk itu, pers nasional harus mengambil peran untuk penyediaan informasi dan berita yang tepat, benar, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS ini.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar, Dave Akbarshah Firkarno, menyoroti tema Hari Pers Nasional 2023, yakni: “Pers Merdeka, Demokrasi Bermartabat.” Tema ini terkait dengan pesta Demokrasi 2024 mendatang, sebagai pemilu terbesar dalam sejarah pemilihan umum di Indonesia, karena pemilu legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan secara serentak pada 14 Februari 2024. “Pers nasional baik cetak maupun elektronik di era digital sekarang ini bisa ikut ambil bagian mensukseskan pesta demokrasi lima tahunan yang terbesar

tersebut secara bebas, merdeka, dan mandiri sehingga demokrasi di Indonesia semakin bermartabat dan semakin dewasa,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Dave Laksono, sapaan Dave Akbarshah Firkarno, pers atau media massa sebagai pilar keempat demokrasi di luar eksekutif, legislatif, dan yudikatif, boleh mengkritik ketiga lembaga tersebut. “Karena itu saya berharap, ke depan dengan kemerdekaan pers dalam situasi yang bebas dan merdeka, NKRI menjadi semakin maju, adil makmur, dan sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia. Inilah pesan saya pada Hari Pers Nasional,” ujar anggota Komisi I DPR RI ini.

Dave Laksono menambahkan, kebebasan pers di Indonesia dalam lima tahun terakhir ini sudah luar biasa. Sekarang ini ada keterbukaan dan tidak ada pembredelan koran dan majalah seperti era Orde Baru dulu. Pers secara kasat mata bebas mengkritik parlemen, pemerintah atau kementerian, presiden, kepala daerah mulai gubernur, bupati, dan walikota. “Artinya kebebasan pers di Tanah Air sekarang ini sungguh luar biasa kalau dibandingkan

dengan era masa lalu. Media bisa dan boleh menurunkan berita apa pun, tidak ada lagi lembaga sensor seperti pada era dulu. Peran pers akan tetap relevan dan penting dari masa ke masa,” urainya.

Kebebasan pers di Indonesia, lanjut Dave Laksono, adalah sebuah fakta konkret dan realistis. Kebebasan pers di Indonesia saat ini sama seperti kebebasan pers di negara-negara demokrasi lainnya di dunia. Di Indonesia tidak ada lagi pembengarusan dan pembredelan media, apalagi memenjarakan seorang insan pers (jurnalis). Dave berharap, kondisi kebebasan dan kehidupan pers nasional ini bisa berlanjut ke masa berikutnya, dan akan lebih baik lagi bila diiringi dengan kesejahteraan awak pers yang memadai.

UU KUHP

Namun, di tengah peringatan HPN 2023, masih terasa ganjalan adanya ancaman terhadap kebebasan pers. Ini terkait dengan catatan Dewan Pers terhadap pengesahan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi undang-undang. Pada Selasa, 6 Desember 2022, DPR resmi



Dave Akbarshah Fikarno

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

mengesahkan RUU KUHP menjadi undang-undang yang menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda. UU KUHP akan berlaku tiga tahun ke depan setelah masa sosialisasi. Dewan Pers kemudian mencatat pasal-pasal UU KUHP yang berpotensi mengkriminalisasi wartawan dan mengancam kemerdekaan pers, kemerdekaan berpendapat, dan berekspresi.

Beberapa pasal itu di antaranya Pasal 218, Pasal 219, dan Pasal 220, yang mengatur tindak pidana penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat Presiden dan Wakil Presiden; Pasal 240 dan Pasal 241 yang mengatur tindak pidana penghinaan terhadap Pemerintah; Pasal 263 yang mengatur tindak pidana penyiaran atau penyebarluasan berita atau pemberitahuan bohong; Pasal 264 yang mengatur tindak pidana kepada setiap orang yang menyiarkan berita yang tidak pasti, berlebih-lebihan, atau yang tidak lengkap.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) juga menolak pasal-pasal bermasalah dalam UU KUHP karena akan memberangus kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Peralnya, UU KUHP dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik. "UU KUHP mengancam dan mencederai kemerdekaan pers," kata Arif Zulkifli, Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, dalam keterangan tertulis, Kamis, 8 Desember 2022.

Terkait dengan UU KUHP yang mengancam kebebasan berekspresi dan kebebasan pers seperti kekhawatiran Dewan Pers, HNW mengatakan, sejak awal pihaknya

menolak RUU KUHP. "Saya dan partai saya sudah jelas, menolak RUU KUHP. Ada pasal-pasal RUU KUHP yang kami terima dan ada yang kami tolak. Misalnya, pasal yang kami kritisi adalah pasal penghinaan kepada kepala negara. Pers menolak pasal itu, kami PKS juga menolak. Mudah-mudahan masih ada ruang untuk melakukan perbaikan, bila terpaksa melalui judicial review di MK," katanya.

"Kita akan lihat pelaksanaannya, apakah adil atau malah mengekang dan menghilangkan kebebasan pers di Indonesia. Intinya, kita jaga agar jangan sampai UU KUHP ini malah memberangus kebebasan pers di Indonesia," imbuhnya.

Sementara itu, Dave Laksono bisa memahami kritik Dewan Pers terhadap UU KUHP yang bisa mengancam kebebasan



Arif Zulkifli

berekspresi dan kemerdekaan pers. Misalnya, UU KUHP masih mempertahankan pasal haatzaai artikelen dan penetapan sejumlah pasal dengan menggunakan delik formal. Contohnya, dalam ketentuan penyebaran kabar bohong dan berita tidak pasti, maka dengan pasal ini seorang wartawan bisa dihukum hanya karena dugaan "menyebarkan kabar yang diketahui akan menimbulkan keonaran". UU KUHP ini bisa berdampak pemenjaraan bagi wartawan yang kritis. Alhasil, pasal-pasal dalam UU KUHP bisa mengancam pers, juga masyarakat yang sedang berunjuk rasa, pembicara diskusi, penceramah, ilmuwan, dan seniman.

Terkait polemik kebebasan pers dan UU KUHP, Dave Laksono berpendapat, UU diciptakan untuk mengatur kehidupan manusia dalam suatu negara agar lebih tertib, damai, nyaman, dan sejahtera. "Itu poin pentingnya. Sejauh pers mengkritik dengan data akurat, saya kira tidak masalah. Jadi, jangan melihat sesuatu yang menakutkan padahal sesuatu itu belum terjadi. Ibarat sudah merasa kalah sebelum perang, padahal belum terjadi peperangan, misalnya," katanya.

"Saya kira dalam praktik pers nasional ini sudah sangat baik, yakni ada kebebasan dan kemerdekaan berpendapat di muka umum seperti perintah konstitusi. Jadi, dalam kaitan ini, saya ingin menyampaikan pesan penting, bahwa 'berpolitik itu harus dalam rangka bernegara, dan bernegara harus dalam rangka berkonstitusi,' ini perlu disampaikan ke publik yang lebih luas," sambungnya.

Lebih rinci soal pasal 218, 219, dan 220 UU KUHP tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat terhadap presiden dan wakil presiden, Dave Laksono menyebutkan, dalam kasus penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden justru anggota masyarakat atau publik yang marah. Dalam kasus Patung Budha di Candi Borobudur yang dibuat mirip Presiden Jokowi oleh Roy Suryo, atau Presiden Jokowi dipersonifikasi dengan Firaun oleh Budawayan Emha Ainun Nadjib (Cak Nun), justru publik yang marah.

"Dari dua kasus itu, saya kira kita tidak perlu melihat secara berlebihan. Lihatlah secara proporsional dan lebih dewasa.

Kalau presiden dan wakil presiden tidak melanggar UU atau konstitusi, mengapa harus diserang dan dikritik secara berlebihan? Yang baik adalah yang proporsional, profesional, dan dewasa. Apalagi bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang sangat santun, paham unggah ungguh, dan tepo seliro,” paparnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menilai, UU KUHP tidak akan mengancam kebebasan pers sehingga para jurnalis dapat menjalankan kerja-kerja jurnalistik dengan baik dan tetap mengutamakan prinsip kode etik jurnalistik.

“Kalangan pers tidak perlu takut dengan UU KUHP. Dengan harmonisasi dan sinkronisasi (antara UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan RUU KUHP), tidak perlu ada kekhawatiran yang disampaikan teman-teman jurnalis,” katanya dalam diskusi Forum Legislasi beberapa bulan sebelum RUU KUHP disahkan menjadi UU KUHP.

Benny menjelaskan bahwa UU Pers sebagai *lex specialis* sehingga aturan yang ada di dalamnya berlaku lebih tinggi daripada UU yang *lex generalis*. RU KUHP ketika sudah menjadi undang-undang tidak bisa menganulir aturan yang sudah ada dalam UU Pers yang bersifat khusus (*lex specialis*).

Justru, menurut Benny, UU KUHP melindungi kebebasan pers karena penyalahgunaan kebebasan akan mendapatkan sanksi untuk memberi efek jera. Karena itu dia meminta kalangan pers harus menyampaikan informasi yang sumber beritanya adalah pihak yang berwenang. “Jadi informasi yang dituntut kepada teman-teman pers adalah informasi yang harus dipastikan sumber beritanya dari pihak berwenang. Kalau bukan dari pihak berwenang, masuk kategori berita bohong,” kata Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI ini.

Perlu Revisi UU Pers

Masih berkaitan dengan HPN 2023, anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, Elnino M. Husein Mohi, meminta kepada pers dan awak media untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi. Bahkan, dia menyebutkan, dalam era digital ini media cetak sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Peralunya, kalangan muda sudah tidak ada yang membaca media cetak. “Media cetak itu masih dibutuhkan untuk melayani mereka dari



Benny K. Harman

generasi tua yang tidak terbiasa dengan gadget atau smartphone. Mereka yang masih membutuhkan media cetak. Ke depan, orang akan membaca berita atau informasi dari gadget atau smartphone. Biasanya pula, mereka hanya membaca sekilas judul dari berita atau informasi tersebut,” katanya kepada *Majelis*.

Menurut Elnino, perkembangan teknologi informasi juga membawa perubahan dalam jurnalisme. Sekarang ini, setiap orang bisa menjadi jurnalis atau wartawan (jurnalisme warga atau *citizen journalism*). Karena itu, jurnalis atau wartawan media mainstream harus lebih cerdas dari mereka yang menjadi jurnalis di media sosial. “Sekarang setiap orang bisa menjadi wartawan. Misalnya,



Elnino M. Husein Mohi

youtube, podcast, sebenarnya adalah pekerjaan wartawan. Karena itu, jurnalis media mainstream harus lebih kreatif, inovatif, dan membuat tulisan-tulisan yang lebih berkualitas,” tutur anggota Komisi X DPR RI ini.

Elnino memberi contoh Deddy Corbuzier, Akbar Faisal, Refly Harun, dalam podcast, memberi pertanyaan-pertanyaan yang tajam dan berkualitas. Tetapi, justru media mainstream mengutip podcast. “Sekarang wartawan media mainstream harus bisa meng-up grade kualitas dirinya, seperti seni bertanya. Wartawan harus lebih baik dari jurnalis warga dan juga pembawa acara podcast. Sehingga jurnalis atau media mainstream tetap menjadi rujukan yang bisa dipercaya,” ujarnya.

Satu hal lagi, Elnino juga menyoroti UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. UU Pers sudah berusia lebih dari 30 tahun. Padahal perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat. Dengan teknologi informasi, sekarang ini setiap orang bisa menjadi wartawan. “Karena itu, UU Pers itu memang sudah saatnya direvisi. Banyak perkembangan pers yang sudah tidak terjangkau UU Pers, misalnya berita atau informasi di sosial media, podcast, dan lainnya. UU Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002) pun tidak mengatur soal podcast,” paparnya.

Bagaimana pers nasional ke depan? Sebagai perbaikan pers nasional ke depan, Dave Laksono mengatakan, dengan modal yang sudah dimiliki sekarang ini, seperti kebebasan dan kemerdekaan pers, maka ke depan pers nasional harus meningkatkan kualitasnya untuk membangun peradaban bangsa Indonesia sekaligus untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. “Itu yang paling esensial dan penting untuk diusahakan bersama-sama seluruh komponen bangsa, terutama insan pers dan Dewan Pers Nasional,” ucapnya.

Sedangkan HNW justru mengkhawatirkan keberadaan pemodal dalam industri pers nasional. Peralunya, melalui para pemodal, dikhawatirkan pers nasional dikuasai oligarki. “Kalau sudah dikuasai oligarki maka tidak akan lagi mementingkan kode etik jurnalistik. Yang ada hanya keberpihakan pers terhadap kepentingan oligarki,” tegasnya. □

DER/BSC

Senja Kala Media Cetak

Banyak media cetak seperti koran, tabloid, atau majalah baik bereputasi dunia maupun nasional berhenti terbit. Tidak sedikit media edisi cetak, seperti tabloid, koran, atau majalah hayatnya berakhir, bahkan tanpa ada edisi digital.

DI PENGHUJUNG 2022, terbetik sebuah kabar “menyedihkan” untuk pers nasional. Koran *Republika* berhenti terbit. Koran *Republika* berpamitan. Edisi 31 Desember 2022 menjadi koran edisi terakhir. Setelah terbit perdana pada 4 Januari 1993, edisi koran dengan spirit ke-Islaman ini berakhir. Koran *Republika* yang sudah berusia 30 tahun pada akhirnya dengan terpaksa menguburkan edisi cetak. Koran *Republika* adalah satu di antara nama-nama besar surat kabar nasional yang berpamitan.

Koran *Republika* telah melalui jalan panjang dinamika sebagai sebuah institusi media. Selama 30 tahun, koran *Republika* telah menjalani kehidupan sebagai perusahaan pers, merasakan pergulatan jurnalistik dengan segala sumbangsih dan prestasi untuk pers nasional. Memang ironis, koran *Republika* yang pada awalnya umat juga ikut mendanai melalui pembelian saham harus mengakhiri edisi cetak karena berbagai faktor.

Tak bisa dipungkiri, media cetak seperti koran, tabloid, atau majalah membutuhkan biaya untuk membeli kertas, biaya cetak, belum lagi distribusi dan operasional redaksi, dan lain-lain. Semuanya membutuhkan ongkos dan kecepatan. Di sisi lain, kalau hanya mengandalkan dari iklan dari media cetak atau penjualan pastilah tidak mampu menutupi operasional media cetak secara keseluruhan. Jika media cetak hanya mengandalkan pendapatan dari iklan dan penjualan, maka bakal kewalahan apalagi di era digital dan paperless. Pada era digital dan teknologi informasi seperti ini, media cetak tak luput berbenturan dengan media digital.

Republika tidaklah raib. Koran *Republika* pada akhirnya mengubur edisi koran (cetak) dan beralih ke media digital sesuai dengan kebutuhan zaman. *Republika* pindah ke jagat baru, yaitu tampil total digital sebagai tempat berteduh baru. *Republika* masih



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

terbit dalam edisi online dan memilih memperkuat jati diri di jalur digital. Para pembaca setia masih bisa melihat *Republika* dalam tampilan berbeda atau dalam bentuk digital.

Sejatinya, koran *Republika* tidaklah sendiri. Banyak media cetak ternama dalam jagad penerbitan mengalami nasib yang sama seperti koran *Republika* akibat perubahan pola perilaku membaca manusia. Sebut saja media cetak kenamaan di Amerika, seperti *Gazzete Mail*, *New York Times*, *Tibune Co*, *Newsweek*, dan lain-lain, lebih dahulu menghentikan edisi cetak. Padahal, media cetak itu rata-rata memiliki sejarah dan tradisi cetak panjang dengan usia lebih dari satu abad. Sejak awal dekade 2000-an media-media itu menyatakan berhenti terbit dan bermigrasi menjadi media terbitan online.

Sejak lama kalangan pers sudah merasakan senja kala media cetak. Banyak media cetak seperti koran, tabloid, atau majalah baik bereputasi dunia dan nasional menelan pil pahit. Tidak sedikit media edisi cetak, seperti tabloid, koran, atau majalah yang berakhir, bahkan tanpa ada edisi digital. Media-media cetak itu seperti ditelan bumi tanpa ada bekas.

Setelah koran *Republika*, empat media dari Kompas Gramedia menyusul berhenti terbit per Januari 2023 ini. Keempat media itu adalah *Tabloid Nova*, *Majalah Bobo Junior*, *Majalah Mombi*, dan *Majalah Mombi SD*. *Tabloid Nova* nama yang cukup legendaris dalam dunia penerbitan Indonesia. *Nova* terbit pertama kali pada tahun 1988 dengan menasar segmen khusus kalangan perempuan. Sedangkan *Majalah Bobo* lahir pada tahun 1973, sampai sekarang masih eksis sampai sekarang. Tapi, *Majalah Bobo Junior*, “adik” *Majalah Bobo* yang mulai terbit pada tahun 1994 menasar anak usia TK dan prasekolah berhenti terbit. *Majalah Mombi* dan *Mombi SD*, masih satu “keluarga” dari *Bobo*, juga berhenti terbit.

Koran *Republika* dan empat media Kompas Gramedia menambah deretan media cetak yang berhenti terbit. Sebelumnya, menjelang Hari Pers Nasional tahun 2021, *Suara Pembaruan* dan *Koran Tempo* resmi ditutup. Kedua media cetak itu menyusul media cetak sebelumnya seperti *Suara Karya*, *Sinar Harapan*, *Sinar Pagi*, *Merdeka*, *Jayakarta*, *Angkatan Bersenjata*, *Berita Yudha*, *Tabloid Bola*, *Topskor*, hingga *Majalah Hai* yang tutup. Bahkan, media cetak sekelas *Indopos* pun terpaksa gulung tikar.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sebenarnya lonceng kematian media cetak sudah berbunyi sejak tahun 2014. Saat itu industri media di Indonesia tiba-tiba dikejutkan dengan tutupnya beberapa media lifestyle dari Gramedia Group, yakni *InStyle*, *Martha Stewart*, *Chic*, *More* dan *Tamasya*. Berlanjut di akhir 2015, *Sinar Harapan* tutup. Seperti efek domino, media-media cetak yang sudah kehabisan nafas ikut berhenti terbit. Pokok pangkal persoalannya hampir sama, ini sebagai dampak berkembang pesatnya teknologi informasi internet yang sudah dikenal masyarakat sekitar tahun 1990-an.

Kalangan media massa juga memanfaatkan teknologi informasi. Jurnalisme yang dipraktikkan media konvensional seperti media cetak surat kabar, media radio, maupun media penyiaran televisi mulai ketinggalan

zaman. Dalam media portal berita online, distribusi media dapat dilakukan dengan cepat, bahkan *real time*. Kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan disrupsi terhadap media massa.

Kemajuan teknologi informasi telah menggeser paradigma preferensi masyarakat dalam memilih media. Masyarakat lebih nyaman dan praktis dalam mengakses berita dengan hanya menjentikkan jari ke *smartphone*, dan mendapatkan konten berita yang *up to date*, lebih kaya format baik dalam bentuk teks, audio, dan video, dibandingkan dengan membaca media cetak yang dinilai tidak efisien, merepotkan dan menyajikan berita kemarin untuk dibaca hari ini.

Bahkan koran *The Washington Post* pernah mengungkapkan kekesalan atas

kehadiran *smartphone* sebagai biang keladi ambuknya industri media cetak. *The Washington Post Express* hanyalah satu dari sekian banyak media besar Amerika yang terpaksa harus gulung tikar, karena ditinggalkan pembacanya demi beralih pada media online. Tercatat, sejak tahun 2004, jumlah media cetak di Amerika yang terpaksa tutup mencapai 1.800 media, dengan rata-rata 100 koran tutup setiap tahunnya.

Bagaimana di Indonesia? Jumlah media cetak di Indonesia pada tahun 2014 tercatat sebanyak 1.321, dan turun drastis menjadi 644 pada tahun 2019. Oplah media cetak yang pada tahun 2014 mencapai 23,3 juta eksemplar, pada tahun 2019 turun menjadi 12,8 juta eksemplar. Kini media cetak semakin terpukul oleh dampak pandemi. Di tengah pandemi Covid-19, masyarakat lebih memilih penggunaan platform media digital. Merujuk pada survei Serikat Perusahaan Pers (SPS) tahun 2021, sebanyak 71% perusahaan media cetak mengalami penurunan omset hingga 40% pada periode Januari-April 2020.

Kini tersisa beberapa media cetak, seperti harian *Kompas*, *Media Indonesia*, koran *Sindo*, *Pikiran Rakyat*, *Jawa Pos*, *The Jakarta Post*, dan *Pos Kota*, yang masih bertahan. Harian *Kompas* yang terbit pertama kali pada 1965, dulu sempat terbit dengan jumlah halaman sampai 52 halaman bahkan lebih, sekarang jumlah halamannya terpengkas. *Media Indonesia* yang terbit pertama kali pada 1970 dan koran *Sindo* (dulu bernama harian Seputar Indoensia yang pertama terbit pada 2005) masih terbit dengan jumlah eksemplar terbatas.

Koran *Pikiran Rakyat*, surat kabar daerah Jawa Barat yang terbit pertama kali 1950 dan *Jawa Pos*, surat kabar daerah yang berdiri pada 1949, merupakan media cetak daerah yang masih bertahan sampai saat ini. Sedangkan *The Jakarta Post* adalah surat kabar Indonesia berbahasa Inggris untuk pembaca kalangan menengah ke atas dan warga asing yang tinggal di Jakarta. *The Jakarta Post* pertama kali terbit pada 1983 dan masih bertahan sampai sekarang. Kebalikan dari *The Jakarta Post*, koran *Pos Kota* merupakan surat kabar yang ditujukan untuk masyarakat kelas menengah ke bawah dan sekarang versi cetaknya masih terbit dan ada saja peminatnya. □

BSC





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA Wakil Ketua MPR RI

Pers Nasional Harus Menjadi Soko Guru Informasi yang Baik, Benar, dan Mashlahat

SETIAP tanggal 9 Februari diperingati sebagai Hari Pers Nasional. Peringatan Hari Pers Nasional ini sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (HUT PWI). Pada tanggal 9 Februari 1945 lahir organisasi yang dikenal dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi ini didirikan sebagai wadah wartawan yang saat itu melalui pena (tulisan) menjadi ujung tombak perjuangan kemerdekaan melawan penjajah.

Kala itu, melalui media cetak, wartawan berperan besar terhadap kemerdekaan Indonesia. Maka, setiap tanggal 9 Februari ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional bertepatan dengan peringatan HUT PWI. Hari Pers Nasional ini ditandatangani oleh Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985 melalui Keppres RI No. 5 tahun 1985. Kini, setiap tahun diadakan peringatan Hari Pers Nasional. Pada tahun 2023, puncak peringatan Hari Pers Nasional diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara.

Berkaitan dengan peringatan Hari Pers

Nasional, *Majelis* mewawancarai salah seorang Pimpinan MPR. Berikut wawancara *Majelis* dengan Wakil Ketua MPR Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., seputar kehidupan pers dan kebebasan pers, terutama terkait pernyataan Dewan Pers yang menyebutkan, kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi mendapat tantangan dari pemberlakuan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau UU KUHP yang baru disahkan pemerintah dan DPR. Berikut wawancara dengan Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Petikannya.

Apa pesan dan harapan Bapak untuk peringatan Hari Pers Nasional 9 Februari 2023?

Jadilah pers nasional yang independen. Pers yang betul-betul mengawal demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, sehingga kita akan sampai selamat dan bertemu pada 100 tahun Indonesia merdeka.

Saya tarik ke tahun politik 2024, karena ini sangat dan berkaitan dengan kiprah dan

peran pers nasional. Hari Pers Nasional 9 Februari 2023 itu hanya berselang setahun dari Pemilihan Umum 2024, baik Pemilihan Legislatif maupun Pemilihan Presiden. Pers yang diyakini sebagai pilar keempat demokrasi harus memiliki peran yang besar di tengah beragam dinamika perpolitikan yang ada.

Beragam dinamika yang muncul itu disebabkan karena pemberitaan yang berkembang dan macam-macam. Tapi, belum tentu semua berasal dari pemberitaan pers nasional. Itu karena kita sekarang berada di era keterbukaan informasi sehingga informasi bisa berkembang dari siapa pun dan kemana pun.

Maka, menjadi sangat penting pers nasional yang diakui dan menjadi mainstream harus menjadi soko guru bagi tegaknya pers dan kegiatan pers yang betul-betul melaksanakan dan menegakkan kode etik jurnalistik. Sehingga dengan demikian, masyarakat akan teredukasi dan memahami bahwa ada rujukan untuk memperoleh informasi yang benar itu dari mana dan seperti apa.

Jadi, masyarakat tidak terjejal informasi yang menjadi liar seperti yang ada di sosial media yang tidak bisa dipertanggung jawabkan. Bukan hanya itu, tapi pers nasional harus menjadi soko guru daripada informasi itu. Informasi yang baik, benar, mashlahat dan semuanya itu ada di pers nasional.

Makanya, sekali lagi menjadi sangat penting bagi pers nasional untuk betul-betul menjadi pers yang independen, pers yang betul-betul profesional melaksanakan tugas dan kewajibannya sehingga bisa betul-betul menjadi kiblat untuk rakyat, umat, bangsa dan negara ini yang mungkin sedang bingung dengan segala bentuk kampanye, segala macam tawaran dari informasi yang berkembang. Nah, kegaduhan-kegaduhan itu sangat penting untuk diseleksi, dikoreksi dengan adanya pers nasional yang berkualitas.

Nanti pada gilirannya, saat rakyat menggunakan haknya sebagai pemilih, itu pemilihnya sudah harus betul-betul memiliki dasar informasi yang terkonfirmasi. Jadi tidak bingung lagi partai ini bagaimana, calon ini bagaimana. Jadi rakyat tidak dibikin bingung oleh berita berita liar.

Bagaimana Bapak melihat kehidupan pers Indonesia saat ini, terutama soal kebebasan pers Indonesia?

Sekali lagi, pers nasional dan kebebasan pers sudah cukup baik. Namun, karena kita memang berada di era keterbukaan, teknologi informasi, seperti media sosial makin deras tak terbendung. Informasi di sosial media mengalir deras juga tak terbendung, entah itu informasi dan berita



valid atau tidak. Ada yang mengancam keutuhan bangsa atau tidak itu sangat tidak bisa diterka. Sebab, media sosial sangat bebas dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. Untuk itu pers nasional harus mengambil peran untuk penyediaan informasi dan berita yang tepat benar dan bisa dipertanggung jawabkan.

Beberapa waktu lalu, kalangan pers, khususnya Dewan Pers, mengkritik UU KUHP yang baru saja disahkan karena beberapa pasal dalam UU KUHP itu bisa menghambat kebebasan pers Indonesia. Apa tanggapan Bapak?

Ya, kalau posisi saya dan partai saya kan jelas, yaitu menolak sejak RUU KUHP itu muncul. Pasal-pasal RUU KUHP itu ada yang kami terima dan ada yang kami tolak. Termasuk yang kami kritisi adalah pasal penghinaan kepada kepala negara. Pasal penghinaan yang ditolak oleh media itulah

yang juga ditolak PKS. Jadi, kami sangat memahami kondisi itu. Itulah sebabnya kami menolak dan mudah-mudahan masih ada ruang untuk melakukan perbaikan. Kalau terpaksa juga sekalian saja di Judicial Review di Mahkamah Konstitusi (MK).

Lebih rinci lagi, bagaimana Bapak melihat pasal-pasal yang menghambat kebebasan pers seperti pasal 218, 219, dan 220 tentang penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat presiden dan wakil presiden, pasal 240 dan 241 tentang pidana penghinaan terhadap pemerintah, pasal 263 tentang pidana penyebarluasan berita bohong. Pasal-pasal tersebut sangat berkaitan dengan pers. Padahal sudah ada UU yang mengatur tentang pers?

Ya, itu tadi semoga masih ada ruang untuk perbaikan. Kita lihat pelaksanaannya apakah adil atau malah mengekang dan menghilangkan kebebasan pers di Indonesia. Jika itu terjadi kami akan melakukan langkah-langkah seperti Judicial Review. Intinya, kita jaga bersama jangan sampai UU KUHP ini malah memberangus kebebasan pers Indonesia.

Menurut Bapak, apa yang masih perlu dibenahi oleh pers Indonesia?

Ya, ada yang harus dibenahi. Salah satunya apa yang disebut sebagai pemodal. Soal ini muncul karena banyak juga pihak yang sangat khawatir jangan-jangan pers nasional ini sudah dikuasai oleh oligarki. Kalau memang sudah dikuasai oleh oligarki, dikhawatirkan oligarki tidak akan lagi mementingkan kode etik jurnalistik. Yang ada hanya keberpihakan dalam produk persnya. □



Terima Ketua Parlemen Korea Selatan

Bamsoet Dorong **Optimalisasi** Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea

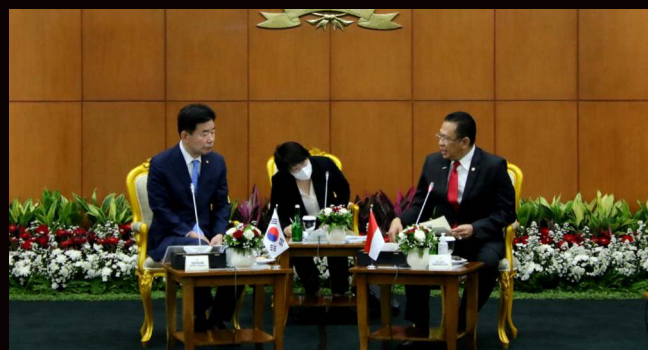
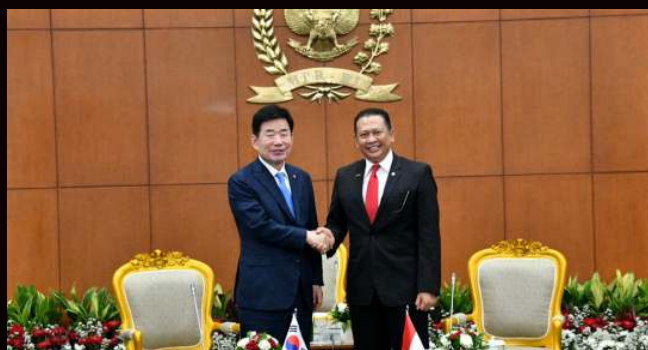


FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Indonesia dan Korea Selatan juga bisa memanfaatkan IK-CEPA kepada sektor privat dan bisnis, khususnya UMKM yang menjadi pilar perekonomian bagi Indonesia.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengajak Ketua Parlemen Korea Selatan Kim Jin Pyo untuk saling bekerjasama memastikan realisasi konkret dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA) yang telah ditandatangani pada 18 Desember 2020 di Seoul, dan sudah mulai berlaku mulai 1 Januari 2023. Sehingga dapat memperkuat hubungan kerjasama ekonomi, perdagangan, dan investasi antara kedua negara.

Indonesia dan Korea Selatan juga bisa memanfaatkan IK-CEPA kepada sektor privat dan bisnis, khususnya UMKM yang menjadi pilar perekonomian bagi Indonesia. Pengimplementasian IK-CEPA sekaligus menandai peringatan 50 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan Korea Selatan.

“Selain IK-CEPA, Indonesia dan Korea Selatan juga memiliki berbagai kerjasama penting lainnya yang perlu ditindaklanjuti. Antara lain, implementasi MoU pemindahan dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di bidang sistem penyediaan air bersih dan pembangunan smart city; kepastian Indonesia memenuhi cost-sharing proyek pengembangan jet tempur KF-X/IF-X, komitmen investasi Korea Selatan senilai USD 6,75 miliar di bidang industri baja, petrokimia, baterai kendaraan listrik dan kabel listrik, telekomunikasi, garmen, dan energi terbarukan, serta tindak lanjut

beberapa kesepakatan yang ditandatangani di sela-sela G20. Seperti kerjasama ekonomi digital, kerjasama UMKM dan startup, hingga pembentukan High-Level Dialogue on Investment,” ujar Bamsoet usai menerima Ketua Parlemen Korea Selatan Kim Jin Pyo, di Gedung MPR RI, Jakarta, Kamis (19/1/23).

Pertemuan ini juga dihadiri Pimpinan MPR RI, antara lain: Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, dan Fadel Muhammad. Hadir pula para anggota Parlemen Korea Selatan, antara lain PARK Kwangon, CHUN Jaesoo, KIM Hoi Jae, YOO Sang Bum, dan LEE Jong-Seong. Serta Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia LEE Sang Deok, dan Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistiyanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini juga mengapresiasi penandatanganan MoU antara Indonesia dan Korea Selatan yang telah dilakukan pada 15 November 2022 lalu, terkait kesepakatan untuk mengembangkan moda raya terpadu (MRT) Fase IV lintas Fatmawati-Kampung Rambutan. Menunjukkan bahwa Indonesia senantiasa memberikan perhatian besar terhadap berbagai investasi Korea Selatan.

“Perhatian Indonesia terhadap investasi Korea Selatan juga dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Antara lain pada 15 September 2021, Presiden Joko Widodo melakukan groundbreaking



pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik PT. HKML Battery Indonesia di Karawang. Pada 16 Maret 2022, Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik PT. Hyundai Motor Manufacturing Indonesia di Cikarang, sekaligus menyaksikan peluncuran IONIQ 5 sebagai mobil listrik pertama yang dibuat di Indonesia. Serta pada 8 Juni 2022, Presiden Joko Widodo melakukan peresmian pembangunan tahap 2 pabrik baterai mobil listrik konsorsium LG Energy Solution senilai

USD 9,8 miliar di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah. Industri ini mendukung produksi 3,5 juta unit baterai dengan kapasitas 200 megawatt per tahun, serta diperkirakan menyerap ribuan tenaga kerja Indonesia,” jelas Bamsoet.

Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, kerjasama di sektor industri mobil listrik dan baterai listrik,

sebagai hasil dari Indonesia Korea Roundtable Investment Dialog 8 April 2021, merupakan sektor investasi yang sangat menjanjikan bagi Indonesia dan Korea Selatan. Mengingat data US Geological Survey melaporkan, cadangan nikel Indonesia mencapai 21 juta metrik ton, terbesar (40%) dari total cadangan nikel dunia. Jika dikelola dengan optimal, Indonesia dan mitra investasinya bisa menjadi pemain utama supplier baterai kendaraan listrik.

“Terlebih secara global pangsa pasar kendaraan listrik terus menunjukkan tren peningkatan. Sebagai contoh, hingga akhir tahun 2022, pangsa pasar motor listrik global diproyeksikan mencapai 17,25 miliar US dollar atau sekitar Rp 257,6 triliun. Sedangkan pada tahun 2030, diproyeksikan meningkat hingga 30,52 miliar US dollar atau sekitar Rp 455,7 triliun. Secara global, jumlah pengguna kendaraan listrik pada tahun 2021 juga telah meningkat empat kali lipat dibandingkan tahun 2019. World Economic Forum menyebutkan bahwa setiap tahun penjualan mobil listrik meningkat sebanyak 30% dalam dekade terakhir,” pungkas Bamsoet. □

Rapim MPR RI

Pergantian Pimpinan MPR dari Unsur DPD, Tunggu Proses Hukum Inkracht

Pimpinan MPR RI menghormati dan menunggu proses hukum yang berlangsung berkekuatan hukum tetap (inkracht) apapun keputusannya, sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Pimpinan MPR RI.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama Pimpinan MPR RI lainnya di dalam Rapat Pimpinan MPR RI tanpa kehadiran Fadel Muhammad pada Kamis (19/1/23) menyepakati untuk tetap menghormati sikap lembaga DPD RI dan tidak akan mencampuri urusan internal DPD RI terkait usulan penggantian Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad dari unsur DPD RI. Pimpinan MPR RI juga menghormati dan menunggu proses hukum yang berlangsung berkekuatan hukum tetap (inkracht) apapun keputusannya, sehingga tidak mengandung konsekuensi masalah hukum di kemudian hari bagi Pimpinan MPR RI.

“Meningat setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak gugatan Pak Fadel Muhammad terkait pergantian dirinya

sebagai Wakil Ketua MPR dari unsur DPD, Pak Fadel Muhammad kemudian mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan

tersebut. Dengan demikian, proses hukumnya masih akan berlanjut. Karena itu, Pimpinan MPR RI menunggu sampai dengan





proses hukum ini berkekuatan hukum tetap (inkracht),” ujar Bamsoet usai memimpin Rapat Pimpinan MPR RI di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (20/1/23).

Hadir antara lain Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Syarief Hasan, Hidayat Nur Wahid, Arsul Sani, dan Yandri Susanto.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, sebelumnya pimpinan MPR telah menerima surat dari Kelompok DPD tertanggal 5 September

2022, dengan Nomor: 30/KEL.DPD/IX/2022, perihal usul penggantian Pimpinan MPR dari unsur DPD. Isi surat tersebut menyampaikan usul penggantian Fadel Muhammad dengan Tamsil Linrung.

“Pimpinan MPR RI juga menerima surat pernyataan tertanggal 5 September 2022 dari Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin terkait penarikan tandatangan dalam Keputusan Pencabutan Mandat Wakil Ketua MPR RI dari Utusan DPD RI. Pimpinan MPR RI juga telah menerima pointers hak jawab Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono tentang

penarikan tandatangan,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain surat dari unsur DPD tersebut, pimpinan MPR RI juga menerima beberapa surat lainnya. Antara lain, surat dari Elza Syarief Law Office Advocates & Legal Consultants selaku kuasa hukum Fadel Muhammad, perihal keberatan dan penolakan atas mosi tidak percaya terhadap Fadel Muhammad selaku Wakil Ketua MPR RI, tertanggal 19 Agustus 2022. Serta surat dari Dahlan Pido & Partners selaku kuasa hukum Fadel Muhammad, perihal permohonan penghentian proses pemberhentian dan penggantian Fadel Muhammad dari Wakil Ketua MPR-RI unsur DPD-RI masa jabatan 2019-2024, sehubungan adanya pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tertanggal 5 September 2022.

“Berbagai surat masuk tersebut telah diproses sesuai ketentuan yang berlaku di MPR. Karena itu, kita berikan kesempatan kepada DPD RI untuk menyelesaikan hal ini di internal DPD RI, serta menunggu proses hukum yang berjalan berkekuatan hukum tetap,” pungkas Bamsoet. □



Kunjungan Delegasi Republik Maldives

HNW: Jangan Lagi Menuding Islam dan Timur Tengah Panghasil Terorisme

Indonesia dan Maladewa memiliki akar sejarah yang sama. Karena agama Islam yang menyebar di Indonesia dan Maladewa dibawa oleh ulama yang sama,



DUA orang menteri dari Republik Maldives, yaitu: Menteri Dalam Negeri Sheikh Imran Abdullah dan Menteri Agama Sheikh Ilyas Jamal, Rabu (11/1/2023), melakukan kunjungan kehormatan ke MPR. Keduanya diterima oleh Wakil Ketua MPR RI, Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA., di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Jakarta. Pertemuan ini menjadi menarik, karena Hidayat Nur Wahid dan kedua tamunya sama-sama alumni Universitas Islam Madinah, Arab Saudi.

Di hadapan tamunya dari Republik Maldives, HNW—sapaan Hidayat Nur Wahid – menceritakan bahwa pada tahun 2011, saat menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, pernah berkunjung ke Maldives. Kunjungan dia kala itu untuk mengundang Pimpinan Parlemen Maldives hadir pada pertemuan Parlemen Organisasi Kerjasama Islam (OKI). “Waktu itu, Indonesia adalah presiden dari Parlemen OKI, sedangkan Maldives adalah anggota OKI, tetapi belum menjadi anggota Parlemen

OKI,” papar HNW.

Pada pertemuan tersebut Pimpinan Parlemen Maldives setuju bergabung menjadi anggota Parlemen OKI. Dan, alhamdulillah keanggotaan Maldives sudah terealisasi pada tahun 2012. Karena itu, HNW yang saat itu menjadi Ketua Steering Committee Pembentukan Forum MPR se Dunia kembali

mengundang Ketua Parlemen Maldives untuk ikut hadir di Bandung, agar eksistensi lembaga-lembaga permusyawaratan dalam lingkungan Parlemen OKI bisa memperkuat praktik demokrasi di negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam.

“Pertemuan tadi adalah bukti bahwa alumni Timur Tengah, seperti Universitas Madinah, memiliki peran dalam penguatan kerja-kerja berdemokrasi. Pertemuan tersebut menegaskan, apa yang dipelajari di Timur Tengah bukan takfiry, anti demokrasi, eksklusif dan anti sosial, sebagaimana sering dituduhkan. Pertemuan itu bukti bahwa alumni Timur Tengah juga mementingkan kemaslahatan masyarakat, dan mencintai bangsa dan negara. Karena, seperti dirinya, saat ini mereka juga adalah pimpinan negara yang dipercaya sebagai menteri di negaranya,” ungkap HNW.

Pertemuan Hidayat dengan tamunya berjalan dengan akrab dan penuh kekeluargaan. Karena mereka memiliki latar belakang pendidikan yang sama, sebagai alumni Universitas Islam di Madinah, Arab Saudi. Bahkan, tujuan utama Mendagri dan Menag Republik Maldives ke Indonesia





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

adalah untuk menghadiri Forum Pertemuan Alumni Universitas Arab Saudi se-ASEAN dan Asia Pasifik di Indonesia.

Pertemuan dengan dua menteri asal Maldives, menurut Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II meliputi Luar Negeri, Jakarta Pusat dan Selatan, ini diharapkan bisa mengoreksi tuduhan bahwa Timur Tengah adalah kawasan penghasil terorisme dan radikalisme. Buktinya, banyak alumni Timur Tengah di Maldives, Indonesia, dan di banyak negara lainnya, yang membuktikan bahwa Islam yang dipelajari adalah agama yang

menghadirkan sikap hidup kooperatif dan kolaboratif, bermusyawarah, menjaga ukhuwah islamiyah sekaligus ukhuwah insaniyah dan wathaniyah, serta menghadirkan sikap hidup yang berorientasi untuk berkontribusi mewujudkan Islam yang Rahmatan lil alamin.

Pada kesempatan itu, HNW menyatakan, sepakat dengan tetamunya para Menteri dari Maldives, agar kedua negara saling meningkatkan hubungan kerjasama. Baik hubungan antarpemerintah, parlemen, warga maupun partai politik. "Saya sempat

sampaikan, peningkatan hubungan dan kerjasama itu juga akan lebih cepat terealisasi jika Maldives membuka penerbangan langsung Indonesia-Maldives, tanpa harus melalui Singapura maupun Srilanka," pungkasnya.

Republik Maldives/Maladewa adalah sebuah negara kepulauan di Samudra Hindia. Negara ini terletak di sebelah selatan-barat daya India, sekitar 700 km sebelah barat daya Sri Lanka. Seluruh penduduk Maladewa beragama Islam. Konstitusi negeri itu bahkan mengatur, warga negara yang berganti agama, berarti keluar dari negara

Maldives adalah negeri yang aman. Di sana rumah-rumah tidak berpagar, dan saat waktu salat tiba, masyarakatnya melaksanakan salat. Ketaatan masyarakat Maladewa terhadap agamanya menghadirkan ketaatan terhadap hukum. Ini sesuai dengan agama Islam yang mereka peluk. Karena sesungguhnya "Islam" juga memiliki makna dan mengajarkan keamanan, keselamatan, dan kesejahteraan.

Indonesia dan Maladewa memiliki akar sejarah yang sama. Karena agama Islam yang menyebar di Indonesia dan Maladewa dibawa oleh ulama yang sama, yaitu Ibnu Batutuh. Sebelum menyebarkan agama Islam di Aceh, Ibnu Batutuh sudah terlebih dahulu menyebarkan Islam di Maladewa. □



Pembukaan APLI Award 2022

Bamsoet Dorong Tingkatkan Perekonomian Nasional

Di tengah tantangan kehidupan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, industri penjualan langsung masih akan tetap eksis dan menyediakan lapangan serta peluang usaha yang dapat diakses oleh siapa pun.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menuturkan, selama hampir tiga tahun pandemi Covid-19 menggerus sektor perekonomian, banyak sektor industri yang collapsed dan tumbang, karena tidak mampu menyesuaikan diri dengan berbagai tantangan yang mengemuka. Mulai dari perubahan pola perilaku konsumen hingga perubahan paradigma dalam proses bisnis di masa pandemi.

Namun, industri penjualan langsung tetap menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Ini tercermin dari laporan Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia atau WFDSA (World Federation of Direct Selling Associations) yang mencatat, industri penjualan langsung secara global mengalami peningkatan sebesar 2,3% pada tahun 2020, yaitu sebesar USD 179,3 miliar dari sebelumnya USD 175,3 miliar pada 2019. Dan, jika merujuk pada data realisasi tahun

2021, dari lebih 128 juta distributor penjualan langsung di seluruh dunia telah menghasilkan pendapatan sekitar USD 186 miliar.

“Gambaran fakta di atas menunjukkan bahwa industri penjualan langsung memiliki karakter bisnis yang tangguh dan adaptif, mampu menyesuaikan diri dan berinovasi dalam merespon dinamika pasar. Menurut penilaian World Direct Sales Association, industri penjualan langsung dianggap sebagai salah satu model bisnis yang cukup menjanjikan, yang memiliki tingkat pertumbuhan tahunan yang konsisten sebesar 1,7%,” ujar Bamsoet saat memberikan sambutan dalam acara Pembukaan Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia (APLI) Awards 2022 di Jakarta, Sabtu malam (14/1/23).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, kontribusi penting sektor penjualan langsung terhadap perekonomian nasional tidak hanya

tercermin dari besarnya nilai transaksi yang mencapai puluhan triliun rupiah. Namun, juga dari jutaan mitra usaha yang terlibat, yang sebagian besar adalah para pelaku UMKM dan para pengusaha pemula.

Kontribusi lain yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa bisnis penjualan langsung juga turut ‘berjasa’ dalam menjaga dan melindungi produk dalam negeri. Di mana lebih dari separuh atau sekitar 51,86% produk yang dijual adalah produk dalam negeri.

“Karena itu, saya sangat mengapresiasi keberadaan APLI dalam ekosistem perekonomian di Indonesia. APLI tidak hanya menjadi induk organisasi penjualan langsung yang memiliki peran penting dan strategis dalam perekonomian nasional, namun juga dipercaya sebagai satu-satunya asosiasi penjualan langsung di Indonesia yang diakui oleh Federasi Asosiasi Penjualan Langsung Dunia (WFDSA),” kata Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum,



Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini meyakini, di tengah tantangan kehidupan perekonomian yang semakin kompleks dan dinamis, industri penjualan langsung masih akan tetap eksis dan menyediakan lapangan dan peluang usaha yang dapat diakses oleh siapa pun. Dalam industri penjualan langsung, setiap orang dapat menjadi entrepreneur yang dibutuhkan hanyalah motivasi bisnis, semangat

berusaha, dan komitmen kuat untuk mengembangkan potensi diri.

“APLI harus dapat memanfaatkan setiap peluang dan momentum untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Khususnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Investasi, untuk bersama-sama menjalankan fungsi edukasi mengenai model bisnis, potensinya, dan

dampaknya terhadap perekonomian nasional. Ini selaras dengan amanat Permendag Nomor 70 Tahun 2019 tentang Distribusi Barang Secara Langsung, di mana perusahaan penjualan langsung wajib melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan para penjual langsung, agar bertindak dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab,” pungkas Bamsuet. □

Terima Delegasi BEM ITB Ahmad Dahlan

HNW: Konstitusi Indonesia Dukung Pengembangan Ekonomi, Termasuk Ekonomi Syariah

Elemen yang paling efektif melakukan koreksi terhadap kesalahpahaman tentang relasi syariah dengan NKRI, antara lain adalah Muhammadiyah, melalui track recordnya juga melalui jalur lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah.

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA atau HNW menerima kunjungan enam pimpinan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) ITB Ahmad Dahlan, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1/2023).

HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, memanfaatkan kesempatan itu untuk dialog dan berdiskusi interaktif dengan anggota delegasi sebagai upaya menyerap aspirasi. Presiden Mahasiswa ITB Ahmad Dahlan, Laode Tumada, membuka diskusi dengan membahas tentang penerapan ekonomi syariah di Indonesia, yang menurutnya, masih



dalam tataran konsep dan implementasi. “Kami melihat hal ini sangat penting untuk

dipahami anak bangsa, khususnya generasi milenials. Kami sendiri, alhamdulillah sudah



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

bergerak dengan meluncurkan gerakan 'Youth Sharia Economic Forum'. Kami berharap, dukungan dari berbagai elemen bangsa, termasuk Bapak Hidayat, selaku Wakil Ketua MPR, sehingga gerakan ini bisa berkembang, berkontribusi dalam mengatasi masalah bangsa, dan menambah wawasan kita semua," ujarnya.

Merespon hal tersebut, Pimpinan MPR dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memberikan sangat mengapresiasi terhadap gerakan 'Youth Sharia Economic Forum' (YSEF) yang digagas mahasiswa ITB Ahmad Dahlan (perguruan tinggi di lingkungan persyarikatan Muhammadiyah). "Kegiatan pengembangan dan peningkatan ekonomi syariah di Indonesia, seperti yang digagas oleh Pimpinan BEM ITB Ahmad Dahlan, adalah legal dalam konteks hukum dan mendapatkan dukungan konstitusional. Dan, malah sudah dipraktikkan dengan

dukungan penuh dari Pemerintah Indonesia," katanya.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini mengungkapkan, pemerintah terbukti sangat mendukung penerapan ekonomi syariah di Indonesia. Dalam satu kesempatan, Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi menegaskan bahwa pada tahun 2024 Indonesia akan menjadi pusat ekonomi syariah. Penegasan Presiden itu ditindak lanjuti oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menekankan bahwa tahun 2025 Indonesia sudah harus menjadi pusat ekonomi syariah.

Ketika kebijakan dasar seperti ini disuarakan lebih lanjut oleh rekan-rekan Mahasiswa dan komunitas pemuda Muhammadiyah serta dari BEM ITB Ahmad Dahlan, lanjut HNW, tentunya akan semakin melapangkan jalan penerapan ekonomi syariah secara benar, dalam sistem hukum yang diakui di Indonesia. Sekaligus

mengoreksi pihak-pihak yang masih saja salah paham soal syariah dengan memframing secara negatif bahwa syariah sama dengan khilafah, dan penerapan ekonomi syariah akan mengubah sistem yang ada di Indonesia. "Tentu, itu semua adalah pemahaman yang salah, yang layak dikoreksi oleh masyarakat kampus dan profesional seperti BEM ITB Ahmad Dahlan ini" papar Ketua MPR Periode 2004-2009 ini.

Wakil Ketua Majelis Syura PKS ini menegaskan bahwa salah satu elemen yang paling efektif melakukan koreksi terhadap kesalahpahaman tentang relasi syariah dengan NKRI, antara lain adalah Muhammadiyah, melalui track recordnya juga melalui jalur lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan Muhammadiyah.

"Mengapa saya sebut Muhammadiyah. Sebab, tidak ada yang meragukan keislaman dan nasionalisme ke-Indonesiaan Muhammadiyah, organisasi Islam terbesar setelah NU ini," tutur dia.

Peran Muhammadiyah bagi penyelamatan Pancasila dan Proklamasi Kemerdekaan RI, lanjut HNW, sangatlah diakui, terutama saat menerima penghapusan 7 kata dalam sila pertama Pancasila menjadi Ketuhanan YME, dan kemudian mengeluarkan 'Amanat Jihad' tanggal 28 Mei 1946.

Menurut HNW, Amanat Jihad yang dikeluarkan oleh PB Muhammadiyah di Yogyakarta ini berisi tiga seruan, yakni: *Pertama*, mendukung kemerdekaan Indonesia sebagai bagian dari jihad; *Kedua*, memaksimalkan potensi perempuan untuk terlibat dalam jihad membela kemerdekaan Indonesia dari sisi logistik dan kesehatan; Dan, *ketiga*, memaksimalkan doa untuk mendukung perjuangan pembela kemerdekaan Indonesia.

Intinya, sebut HNW, jika Muhammadiyah di era kekinian melalui kampus dan mahasiswanya mendukung adanya penguatan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia, semestinya tidak dipermasalahkan lagi, malah harus didukung. Juga untuk mengoreksi salah paham soal relasi antara NKRI dan pengetrapan ekonomi syariah. "Saya sebagai Pimpinan MPR mendukung kegiatan BEM dan mahasiswa ITB Ahmad Dahlan. Maksimalkan potensi dan jaringan di kalian demi kemajuan dan kejayaan umat, bangsa dan Negara Indonesia," pungkasnya. □



Peringatan Hari Patriotik

Fadel Pejuangkan Nani Wartabone Jadi Nama Bandara Gorontalo

Sebelum Soekarno Hatta memproklamkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo telah terlebih dahulu menyampaikan Proklamasi Indonesia, 23 Januari 1942.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. Ir. H. Fadel Muhammad Al-Haddar, M.M., yang juga Ketua Organisasi Keluarga Besar Masyarakat Gorontalo (Lamahu) menjadi pemimpin upacara peringatan Hari Patriotik ke-81, Senin (23/1/2023), di Makam Kalibata, Jakarta Selatan. Prosesi peringatan Hari Patriotik tahun 2023 itu ditandai dengan penghormatan dan mengheningkan cipta mengenang jasa para pahlawan. Ada juga tabur bunga serta doa di pusara para pahlawan dari Gorontalo. Selama prosesi peringatan Hari Patriotik berlangsung, sekitar 150 peserta yang hadir terlihat khusuk, mereka mengikuti seluruh rangkaian acara dengan tertib.

Usai upacara, Fadel Muhammad menyebut, 23 Januari 1942 adalah hari yang sangat istimewa bagi masyarakat Gorontalo. Karena itu, masyarakat Gorontalo yang ada di luar, terus berjuang, agar hari istimewa itu juga

dikenal serta diketahui masyarakat luas.

Nani Wartabone sendiri, menurut Fadel, adalah pribadi yang layak menjadi panutan anak muda saat ini. Ia adalah sosok yang sangat mencintai NKRI. Buktinya, meski sudah memproklamkan kemerdekaan Indo-

nesia, Nani memilih bergabung dengan Indonesia, sesaat setelah Soekarno-Hatta membacakan naskah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 1945.

“Nani Wartabone adalah sosok seorang pemberani. Ia tidak takut untuk mem-





FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

proklamkan kemerdekaan Indonesia di tengah ancaman penjajah Belanda. Salah satu cita-cita Nani Wartabone adalah melihat Indonesia meraih swasembada pangan. Karena itu, kami di Gorontalo terus memacu produksi jagung agar terjadi ketersediaan pangan yang memadai, seperti yang dicita-citakan Nani Wartabone,” ujar Fadel Muhammad.

Pada kesempatan itu, anggota MPR dari Kelompok DPD itu juga menyampaikan keinginan masyarakat Gorontalo untuk mengabadikan Nani Wartabone menjadi nama bandara di Gorontalo. Sedangkan nama Jalaludin, yang selama ini dipakai untuk sebutan Bandara Gorontalo digunakan untuk menamai Bandara AURI yang ada didekat Badara Gorontalo.

“Kami sudah menyiapkan segala persyaratan untuk penggantian nama tersebut.

Persyaratan administrasi sudah selesai. Pemerintah daerah, baik Kabupaten Gorontalo maupun Pemprov Gorontalo, sudah menyiapkan suratnya tinggal mengantarkan kepada Menteri Perhubungan. Bila sudah, nanti saya akan perjuangkan meminta menteri perhubungan memenuhi aspirasi masyarakat,” ujar Fadel.

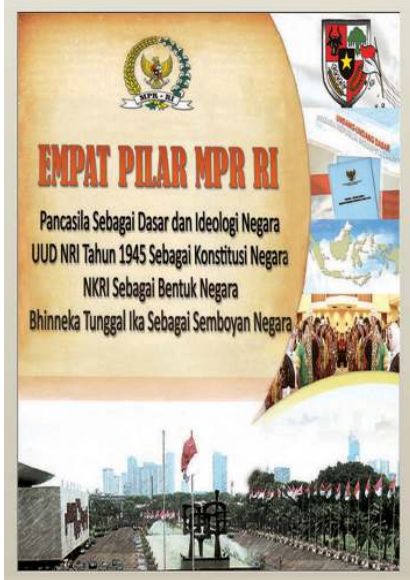
Peringatan Hari Patriotik dilakukan setiap tanggal 23 Januari. Peringatan Hari Patriotik dilakukan untuk mengenang jasa Dwi Tunggal asal Sulawesi, Nani Wartabone dan Kusno Danupoyo, yang memproklamkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan di provinsi Gorontalo. Bersama rakyat Gorontalo, Nani berjuang melawan para penjajah Belanda. Berkat peristiwa ini, pemerintah menetapkan tanggal 23 Januari 1942 sebagai Hari Patriotik. □

MBO



Implementasi Sila-sila Pancasila

-  - Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur
-  - Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.
-  - Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan
-  - Berhenti silang pendapat, mulailah mencari muafakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah
-  - Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi



Terima Perwakilan Kepala Desa

Bamsoet Dukung Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa

Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar, sehingga status mereka juga sudah harus ada kejelasan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menerima perwakilan kepala desa yang berunjuk rasa di depan Gedung MPR, DPR, DPD RI, setelah sebelumnya mereka juga telah diterima Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR. Peserta aksi mencapai 5 ribu kepala

desa dari berbagai wilayah Indonesia.

Berbagai aspirasi yang disampaikan, antara lain revisi terbatas UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya pada pasal 39 terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari saat ini enam tahun dengan masa jabatan maksimal tiga periode menjadi sembilan tahun dengan masa jabatan

maksimal dua periode. Selain itu, juga revisi pada Pasal 72 agar dana desa dikembalikan ke fungsi awal untuk menjaga keutuhan desa berdaulat.

“Revisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sudah masuk Prolegnas DPR RI 2019-2024. Diharapkan bisa segera masuk Prolegnas Prioritas 2023, sehingga DPR dan pemerintah bisa segera duduk bersama membahas usulan para kepala desa tersebut secara efektif dan efisien, agar tidak berlarut dan mengganggu stabilitas politik. Mengingat, saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Peran kepala desa dalam menstabilkan suhu politik sangat besar, sehingga status mereka juga sudah harus ada kejelasan,” ujar Bamsoet usai menerima para kepala desa, di Jakarta, Selasa (17/1/23).

Para kepala desa yang hadir berasal dari Paguyuban Kepala Desa Reksa Praja Kabupaten Kebumen, salah satu kabupaten daerah pemilihan (Dapil) Bamsoet. Antara lain, Tasrip, Kasimin, Aristanto, A Bahrun, Anam Lutfi, Imdad Durokhan, Sobirin, Daniati, Mutamimah Retno Utami, dan Aris Hargiantara.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, para kepala desa juga menyampaikan aspirasi seputar pengelolaan dana desa yang tidak hanya bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk kemakmuran masyarakat desa melalui berbagai program pembangunan. Melainkan juga untuk kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa.

“Presiden Joko Widodo senantiasa peduli dengan kepala desa. Dibuktikan pada akhir tahun 2022 lalu, sesuai aspirasi dari para kepala desa, pemerintah melalui Kementerian Desa dan PDT telah mengeluarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023. Dengan demikian, pada tahun anggaran 2023 ini pemerintah desa sudah bisa



membelanjakan 3% dari dana desa untuk kebutuhan belanja operasional pemerintah desa. Ditindaklanjuti dengan surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.3.2.3/6149/BPD tanggal 14 November 2022 perihal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa yang ditujukan kepada bupati/walikota yang memiliki desa,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pemerintah melalui Kementerian Sosial harus bekerjasama dengan kepala desa dalam meng-update data penerima bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan lain

sebagainya. Mengingat, berdasarkan laporan dari para kepala desa, tidak jarang ditemui penerima berbagai bantuan sosial tersebut tidak tepat sasaran.

“Karena itu, kepala desa seharusnya dilibatkan dan diberikan kewenangan oleh Kementerian Sosial untuk mengajukan daftar penerima bantuan sosial, termasuk juga menganulir jika ada penerima bantuan sosial yang dinilai tidak tepat sasaran. Karena pada dasarnya, kepala desa yang paling mengetahui kondisi masyarakat di desanya,” terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum FKPPi dan Wakil Ketua Umum SOKSI ini menambahkan, para kepala desa juga mengusulkan agar selain bantuan langsung tunai, dalam memberikan bantuan

sosial kepada warga, pemerintah juga bisa melakukannya melalui berbagai program seperti Bantuan Pangan Non Tunai atau program Kartu Sembako sebagaimana yang pernah dilakukan beberapa tahun silam. Sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian desa, karena pengadaan pangannya dilakukan oleh berbagai unit usaha yang dimiliki warga desa setempat.

“Atas berbagai pengabdian yang dilakukan kepala desa dan perangkat desa, pemerintah perlu mengupayakan agar setelah mereka pensiun, BPJS Kesehatannya tetap dibayarkan oleh negara. Sehingga ketika pensiun di usia 60 tahun, mereka bisa tetap memperoleh fasilitas pengobatan yang memadai,” pungkas Bamsoet. □

Silaturahmi Keluarga Besar Mathla’ul Anwar

Yandri Susanto Berharap, Pemerintah Tetapkan K.H. Mas Abdurrahman Menjadi Pahlawan Nasional

Wakil Ketua MPR, Yandri Susanto, berpesan kepada keluarga besar Mathla’ul Anwar untuk menjadikan Mathla’ul Anwar sebagai organisasi massa Islam dan lembaga pendidikan Islam yang kuat, berwibawa, dan berdiri kokoh di republik ini.



WAKIL Ketua MPR Yandri Susanto, S.Pt., mengharapkan, pemerintah Republik Indonesia menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada K.H. Mas Abdurrahman, pendiri organisasi massa Islam dan lembaga pendidikan Islam –yang termasuk salah satu tertua dan terbesar di Indone-

sia— Mathla’ul Anwar. K.H. Mas Abdurrahman bersama organisasi massa Mathla’ul Anwar telah ikut berjasa dan melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara Indonesia.

Harapan itu disampaikan Yandri Susanto di depan keluarga besar Mathla’ul Anwar yang memenuhi Gedung Nusantara IV

Kompleks MPR/DPR RI Senayan, Jakarta, dalam Silaturahmi Keluarga Besar Mathla’ul Anwar pada Ahad, 29 Januari 2023. Silaturahmi Keluarga Besar Mathla’ul Anwar ini dihadiri Ketua Umum PB Mathla’ul Anwar K.H. Embay Mulya Syarief, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri BUMN Erick Thohir, Pj. Gubernur Banten Al Muktabar, anggota MPR Desy Ratnasari, dan Eko Patrio, serta keluarga besar Mathla’ul Anwar (para kepala sekolah, ketua perguruan, dan para santri).

Menurut Yandri Susanto, Mathla’ul Anwar mempunyai satu cita-cita yang belum terkabul, yaitu menjadikan tokoh pendiri Mathla’ul Anwar sebagai pahlawan nasional. Padahal pemerintah Indonesia telah menetapkan para pendiri organisasi massa Islam, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Al Khairiyah, dan beberapa ormas Islam lainnya sebagai pahlawan nasional.

“Karena itu pesan dari pertemuan silaturahmi keluarga besar Mathla’ul Anwar



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ini sebenarnya adalah untuk meneguhkan perjuangan agar K.H. Mas Abdurrahman ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Maka, mari kita bersama-sama berjibaku dan berjuang. Saya yang akan memimpin langsung agar K.H. Mas Abdurrahman ditetapkan sebagai pahlawan nasional,” katanya.

Wakil Ketua MPR dari Fraksi PAN itu menyebutkan, dengan ditetapkannya K.H. Mas Abdurrahman sebagai pahlawan nasional maka organisasi massa Islam Mathla'ul Anwar bisa sejajar dengan ormas-ormas Islam lainnya, seperti NU dan Muhammadiyah. “Mathla'ul Anwar telah berjuang dengan darah dan keringat untuk republik yang sangat kita cintai ini. Maka,

tiba saatnya negara juga membalas perjuangan Mathla'ul Anwar itu,” ujarnya.

Yandri menambahkan, bila K.H. Mas Abdurrahman ditetapkan sebagai pahlawan nasional maka akan menjadi darah segar untuk perjuangan Mathla'ul Anwar di masa-masa yang akan datang. “Saya yang akan memperjuangkan semua aspirasi Mathla'ul Anwar di lembaga yang terhormat ini, bahwa Mathla'ul Anwar juga punya andil di lembaga terhormat ini,” tutur Yandri.

Untuk itu, Yandri juga berpesan kepada keluarga besar Mathla'ul Anwar untuk menjadikan Mathla'ul Anwar sebagai organisasi massa Islam dan lembaga pendidikan Islam yang kuat, berwibawa, dan berdiri kokoh di republik ini. Yandri pun

mengajak seluruh komponen di Mathla'ul Anwar untuk mewujudkan Mathla'ul Anwar yang kuat, berwibawa, dan berdiri kokoh.

“Saya yakin kita pasti bisa. Tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting adalah kompak, teratur, dan terukur. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri BUMN Erick Thohir juga mendukung Mathla'ul Anwar. Kita bisa melakukan sesuatu yang terbaik untuk Mathla'ul Anwar,” kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Banten II, meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang dan kota Cilegon ini.

Sementara itu, Ketua Umum Pengurus Besar Mathla'ul Anwar, K.H. Embay Mulya Syarif, juga menyebutkan pihaknya sedang mengupayakan agar K.H. Mas Abdurrahman mendapat anugerah sebagai pahlawan nasional. Organisasi massa Islam dan lembaga pendidikan Islam Mathla'ul Anwar didirikan pada tahun 1916. Mathla'ul Anwar sudah cukup tua dan lebih tua dari Nahdlatul Ulama (NU).

“Mathla'ul Anwar mengutus K.H. Mas Abdurrahman ke Jawa Timur mengikuti Muktamar NU perdana beberapa bulan setelah NU berdiri. K.H. Mas Abdurrahman juga ikut menandatangani Resolusi Jihad yang mendorong terjadinya perang 10 November di Surabaya dan dikenal sebagai Hari Pahlawan. Untuk itulah kita berusaha dan mengupayakan agar K.H. Mas Abdurrahman agar mendapat penghargaan sebagai pahlawan nasional dari pemerintah Republik Indonesia,” katanya. □





H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Berfokus Pada Kemajuan dan Kesejahteraan dengan PPHN

SETELAH 77 tahun meraih kemerdekaan, sudahkah negara-bangsa mampu menyejahterahkan seluruh rakyat? Dan, ketika usia reformasi saat ini menuju durasi waktu seperempat abad, sudahkah semua warga negara mendapatkan akses seluas-luasnya untuk menggapai kemajuan seturut perubahan dan kemajuan zaman? Inilah esensi renungan tentang urgensi Pokok-pokok Halauan Negara (PPHN).

Tanpa PPHN yang wajib dipatuhi penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, pembangunan berskala nasional maupun skala daerah selalu berpotensi kehilangan arah, atau tidak berfokus pada kewajiban utamanya menyejahterakan rakyat. Potensi kehilangan fokus lazimnya disebabkan orientasi administrasi pemerintahan yang lebih mengutamakan realisasi atas program-program yang tidak relevan dengan prioritas kebutuhan masyarakatnya.

Misalnya, menghambur-hamburkan anggaran sekadar untuk membiayai realisasi program demi legacy, kendati program atau proyek itu bukan menjadi kebutuhan utama masyarakat setempat. Untuk memahami kecederungan seperti itu, rasanya cukup dengan melihat potret Jakarta sebagai contoh kasus. Pembangunan Jakarta yang demikian pesat dalam dekade-dekade terakhir terbukti belum dapat mengatasi kemiskinan sebagian warganya.

Selain itu, Jakarta masih mempunyai masalah yang berkaitan dengan bayi kurang gizi (stunting) hingga masalah anak putus sekolah. Kalau di Jakarta yang berstatus ibu kota negara saja masih menyimpan persoalan-persoalan mendasar seperti itu, ada banyak daerah lain yang juga memiliki persoalan serupa.

Memang, mengacu pada laporan Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa persoalan mendasar itu adalah fakta yang bisa dijumpai di berbagai daerah.

Jumlah penduduk miskin per Maret 2022 tercatat 26,16 juta orang. Belasan juta penduduk Indonesia masih mengalami kekurangan gizi, termasuk bayi. BPS juga mencatat, angka putus sekolah meningkat pada 2022 di seluruh jenjang pendidikan; dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Fakta dan data-data itu menjelaskan bahwa belum semua warga negara terjangkau dan terlayani oleh pembangunan. Puluhan tahun merdeka dan hampir seperempat abad melakoni reformasi, negara belum mampu menyejahterakan seluruh rakyatnya. Pun, kemiskinan dan keterbatasan menjadi penghambat bagi mereka untuk merespons perubahan dan kemajuan zaman. Di era modern sekarang, fakta seperti ini mestinya tidak ada lagi jika saja pelaksana pembangunan selalu berfokus pada kewajiban utama negara menyejahterakan rakyat.

Ada beragam teori atau pendekatan pembangunan yang memungkinkan negara mampu menyejahterakan seluruh rakyat. Namun, kunci utamanya tetap saja konsistensi dan fokus pada kewajiban utama negara. Agar konsistensi dan fokus itu tetap terjaga, negara-bangsa harus memiliki PPHN yang dipatuhi setiap pemerintahan, baik pusat maupun daerah.

Banyak contoh tentang negara-bangsa yang konsisten dan fokus membangun demi mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Untuk era terkini, lagi-lagi Tiongkok patut untuk dijadikan contoh atau pembelajaran, karena fakta bahwa negara ini telah menjelma menjadi raksasa ekonomi dunia. Padahal, generasi orang tua masa kini masih ingat betul bahwa Tiongkok yang berselimut kemiskinan masih sangat kuat.

Memang, pada era itu Tiongkok mulai dan sedang membangun di segala sektor. Semuanya dimulai oleh pemimpin Tiongkok masa itu, Deng Xiaoping, dengan

gagasan tentang reformasi dan keterbukaan, yang populer dengan ungkapan Gaige Kaifang. Di Forum Rapat Partai Komunis China (PKC) tahun 1978, Deng mengumumkan dan memerintahkan kepada semua instrumen negara agar segera mengimplementasi Gaige Kaifang.

Tiongkok kemudian fokus pada modernisasi empat pilar – dikenal dengan ungkapan *Sì gè Xiàn Dàihuà*— yang mencakup sektor pertanian, industri, teknologi, dan pertahanan. Tiongkok juga mengakhiri ketertutupannya dengan bersedia menerima modal dan investor asing. Gaige Kaifang adalah PPHN Tiongkok yang masih dipatuhi para pemimpin Tiongkok hingga era terkini. Berkat konsistensi dan fokus yang terjaga, Tiongkok kini menjadi raksasa ekonomi dunia.

Maka, kalau pembangunan nasional selalu konsisten dan fokus pada kewajiban negara menyejahterakan rakyat, Indonesia akan mampu mewujudkannya. Terlebih Indonesia sangat kaya akan sumber daya alam (SDA) hayati dan SDA barang tambang. Jangan juga lupa bahwa sumber-sumber energi terbarukan atau energi hijau cukup melimpah di seluruh wilayah nusantara. Kalau konsisten dan fokus, hilirisasi SDA seperti nikel, tembaga dan bauksit akan menghasilkan nilai tambah berlipat-lipat untuk kesejahteraan dan kemakmuran seluruh rakyat.

Para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan telah menyiapkan haluan negara sebagai road map pembangunan masa depan bangsa. Pada era Presiden Soekarno, misalnya, ada beberapa Ketetapan MPRS sebagai landasan perencanaan pembangunan. Misalnya Tap MPRS Nomor 1/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN, Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969, dan Tap MPRS Nomor IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan.

Pada era Presiden Soeharto, GBHN diproyeksikan sebagai perencanaan pembangunan 25 tahunan. Untuk merealisasikan GBHN, ditetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun yang terwujud dalam APBN. GBHN dan turunannya dijadikan sebagai pengejawantahan dari UUD 1945.

Pada era reformasi, berdasarkan amandemen ketiga dan keempat konstitusi, MPR tidak lagi berwenang menetapkan GBHN.. Perencanaan pembangunan digantikan dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang ditetapkan undang-undang,

dan diturunkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah, dan Pendek.

Akibatnya, presiden terpilih pada era Reformasi ini memiliki paradigma pembangunannya masing-masing. Presiden Abdurrahman Wahid yang kemudian dilanjutkan Presiden Megawati Soekarnoputri menghasilkan peraturan perundangan yang menjadi konsep *clean and good government*. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghasilkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Dan, Presiden Joko Widodo dengan Nawacita. Masing-masing paradigma tidak memiliki keterkaitan, sehingga tidak salah jika terkesan pembangunan yang dilakukan antarperiode pemerintahan tidak selaras dan tidak berkesinambungan.

Gagasan menghadirkan kembali haluan negara yang kini diberi nomenklatur PPHN dapat menjamin keselarasan dan kesinambungan pembangunan antara pusat dan daerah, dan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. PPHN juga memastikan terwujudnya kesinambungan pembangunan antara satu periode pemerintahan ke periode penggantinya, baik di tingkat pusat hingga daerah.

Selain itu, PPHN pun memastikan pembangunan tidak hanya direalisasikan dengan sepenuhnya memanfaatkan APBN. Pelaksanaan pembangunan terlebih dahulu harus didasarkan pada perencanaan yang matang, seperti rencana pembangunan ibu kota baru Indonesia (IKN) di Kalimantan Timur. Dengan pola seperti itu, ada kepastian proyek tidak akan mangkrak di tengah jalan.

PPHN merupakan dokumen hukum bagi penyelenggara pembangunan nasional yang berbasis kedaulatan rakyat. Artinya, rakyat melalui wakil-wakilnya dalam lembaga MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD berhak merancang dan menetapkannya. Dokumen itu menjadi rujukan bagi presiden dan penyelenggara negara lainnya dalam menyusun berbagai program pembangunan sesuai kewenangannya masing-masing.

PPHN akan membuat pembangunan nasional kembali menemukan roh dan jati dirinya sebagaimana ditegaskan dalam pembukaan konstitusi. PPHN juga mengingatkan pada gagasan pentingnya perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dikemukakan oleh pendiri bangsa pada tahun 1947 (75 tahun yang lalu) yang terlihat dalam tujuh bahan pokok indoktrinasi, yang tujuannya adalah mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan makmur. □

Memilih Sistem Pemilu Yang Terbaik Buat Rakyat

Menjelang Pemilu Legislatif 2024, publik dan partai politik dikejutkan wacana perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Upaya membuat sistem pemilu menjadi tertutup ramai-ramai ditolak oleh rakyat dan 8 partai politik yang ada di parlemen. Lalu apa baik dan buruknya sistem terbuka dan tertutup? Berikut pendapat dari para wakil rakyat.

Yanuar Prihatin, Anggota MPR Fraksi PKB

Sistem Tertutup Menghidupkan Oligarki

SISTEM pemilu proporsional tertutup akan berpotensi menutup kompetisi antarsesama kader dalam satu partai sehingga berpeluang menghidupkan oligarki dalam tubuh partai politik. Hal demikian diungkapkan dalam *press release* yang tertuang di *dpr.go.id*, 4 Januari 2023. Dikatakannya, bagi partai politik yang punya tradisi komando yang kuat dan sedikit otoriter, sistem pemilu proposional tertutup ini lebih disukai. Sistem seperti itu menjadi peluang karir terbesar untuk kader partai politik dengan karakter tersebut.

Sistem proporsional tertutup itu dinilai akan menghidupkan oligarki di dalam partai di masa lalu itu. Sementara oligarki politik relatif mendapatkan hambatan untuk tumbuh melalui sistem proporsional terbuka

Tertutupnya kompetisi antara sesama kader. Juga melahirkan para politisi yang lebih mengakar ke atas daripada ke bawah. Dirinya khawatir, sistem proporsional tertutup dimanfaatkan oleh kader partai politik yang berjiwa oportunistis, elitis, dan tidak mampu berkomunikasi dengan publik.

Lebih lanjut dalam *web* itu, jika ada pihak yang mengusulkan sistem proporsional tertutup, maka menurutnya, mereka ingin membawa musibah dan kecelakaan dalam demokrasi. Apalagi, jika Mahkamah Konstitusi (MK) turut melegalisasi sistem tertutup tersebut.

Dirinya meminta tidak ada satu pihak pun



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

yang bermain-main dengan sistem kepilluan yang sudah ada di Indonesia. Tak ingin, kegairahan dan partisipasi politik rakyat yang sudah terjadi melalui sistem pemilu proporsional terbuka, hilang karena sistem Pemilu tertutup.

Ditegaskan kita semua sudah

berinvestasi besar untuk menumbuhkan kegairahan dan partisipasi politik rakyat, memperkuat hubungan timbal balik antara rakyat dan wakilnya, serta membangun budaya kompetisi yang masih terukur. □

AWG

Christina Aryani, Anggota MPR Fraksi Partai Golkar

Sistem Terbuka Cerminan Aspirasi Rakyat

CHRISTINA Aryani dalam berbagai berita online termasuk dalam saluran *youtube* yang dimiliki secara tegas mengatakan, pertemuan delapan pimpinan partai politik yang digelar beberapa waktu yang lalu untuk memastikan dukungan pada sisrem pemilu legislatif yang tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka. Sistem ini sudah digunakan tiga kali pemilu. Sistem terbuka merupakan cerminan aspirasi mayoritas rakyat.

Dalam *golkarpedia.com*, 9 Januari 2023, ia mengatakan sesungguhnya mayoritas rakyat tetap ingin memilih sendiri siapa wakil rakyat yang mereka kehendaki. Partainya menangkap aspirasi itu dan menilai proporsional terbuka tetap jauh lebih baik.

Disebut pilihan sistem proporsional terbuka merupakan bagian dari komitmen menjaga demokrasi yang substansinya adalah ruang partisipasi rakyat yang terbuka lebar. Dijelaskan dalam web partai itu, proporsional terbuka efektif dijalankan karena sudah digunakan selama tiga kali pemilu dan sesuai amanat Putusan MK Nomor 22-24/PUU 6/2008. Ia bertutur, era sekarang cukup mudah bagi masyarakat untuk langsung menilai kapasitas, kinerja atau 'track record' seseorang yang maju sebagai calon legislatif.

Sistem proporsional terbuka, menurutnya, masyarakat bisa memastikan seorang calon



anggota legislatif bukan orang yang hanya muncul saat pencalonan tanpa melalui proses berpartai secara matang. Ditegaskan, jangan membatasi ruang partisipasi masyarakat dalam "pesta demokrasi" karena rakyat Indonesia mulai cerdas untuk memilih yang terbaik.

Diungkapkan, saat ini KPU sudah berproses dengan tahapan-tahapan pemilu dengan anggaran yang sudah disiapkan. Untuk itu, tidak tepat jika tiba-tiba dilakukan perubahan saat KPU sudah memulai

tahapannya. Disampaikan dalam web itu, pelaksanaan Pemilu 1999 yang dilakukan secara tertutup, apakah ada jaminan kualitas anggota legislatif yang terpilih.

Ditambahkan, sistem terbuka maupun tertutup tidak ada yang betul-betul sempurna, namun dalam konteks berdemokrasi, sistem terbuka memberikan hak rakyat menentukan pilihannya sendiri secara langsung, sebagai kehendak rakyat dan bukan elit partai. □

AWG

Berhasil Pertahankan Disertasi PPHN Tanpa Amandemen

Bamsoet Raih Doktor Ilmu Hukum dengan Predikat Cumlaude

Sebuah disertasi berbasiskan ilmu pengetahuan dan realita yang ada, dan juga memberikan solusi berupa menghadirkan PPHN tanpa amandemen.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mengakui, tidak mudah bagi dirinya yang berlatar belakang non hukum untuk mempelajari hukum. Hingga akhirnya bisa meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat cumlaude, IPK 4.0 dari Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Ketua Promotor Prof. Dr. Ahmad Ramli bahkan menilai, disertasi Bamsoet tentang "Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara Sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan Dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas" sebagai hasil penelitian yang realistis sekaligus futuristic. Karena, disertasi ini berbasiskan ilmu pengetahuan dan realita yang ada, dan juga memberikan solusi berupa menghadirkan PPHN tanpa amandemen, yakni melalui konvensi ketatanegaraan dari delapan lembaga tinggi negara, sehingga bisa diterapkan sebagai landasan pembangunan nasional yang berkesinambungan di masa mendatang.

Bamsoet mengungkapkan, motivasi belajar ilmu hukum, banyak dilatarbelakangi oleh pekerjaan dirinya sebagai wartawan, anggota Komisi III DPR RI yang membidangi Hukum, Keamanan, dan HAM, Ketua Komisi III DPR RI, pimpinan dan anggota berbagai Pansus RUU seperti Pansus Angket Bank Century, serta sebagai Ketua DPR RI yang berhasil mendorong revisi UU KPK dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang bertahun-tahun mengalami kemacetan, serta meletakkan dasar pembahasan RUU KUHP dan berbagai undang-undang lainnya yang mengalami kebuntuan.

"Hingga kini sebagai Ketua MPR RI yang banyak berhubungan dengan hukum, utamanya saat ini adalah hukum tata negara. Menjadikan semangat saya semakin kuat dan



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

tinggi, khususnya untuk menghadirkan perangkat hukum berupa PPHN agar pembangunan nasional bisa berjalan berkesinambungan, tidak serampangan apalagi mangkrak dan berhenti di tengah jalan," ujar Bamsoet usai lulus Sidang Promosi Terbuka Doktor Ilmu Hukum dari FH Unpad, Bandung, Sabtu (28/1/23).

Turut hadir pimpinan lembaga negara dari tiga cabang kekuasaan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Antara lain para Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, Lestari Moerdijat, Jazilul Fawaid, Hidayat Nur Wahid, Yandri Susanto, dan Fadel Muhammad. Ketua BPK Isma Yatun, Ketua MK Prof. Anwar Usman bersama istri Idayati, Ketua KY Prof. Mukti Fajar Nur Dewata, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR RI sekaligus Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, serta Wakil Ketua DPD RI Sultan Najamudin.

Hadir pula jajaran Kabinet Indonesia Maju, antara lain Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST. Burhanuddin, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri

Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Serta Ketua KPU Hasyim Asy'ari, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sekaligus mewakili Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Ketua LPS Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua KPPU M. Afif Hasbullah. Lalu, Sestama Badan Intelijen Negara (BIN) Komjen Pol Bambang Sunarwibowo, Sestama BPIP Karyoto, Kepala BSSN Letjen TNI AD (P) Hinsia Siburian. Serta jajaran anggota Komisi III DPR RI, antara lain Habib Aboe Bakar Al-Habsy, Sarifuddin Sudding, Arteria Dahlan, Masinton Pasaribu, Herman Herry, dan Sari Yuliati.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, selain mengikuti perkuliahan sebagai persyaratan untuk bisa maju promosi doktor, dirinya juga telah melakukan pemeriksaan kemiripan/plagiasi penulisan dengan "Turnitin, hanya 9 persen". Bamsoet juga sudah menulis dua artikel yang telah diterbitkan pada Jurnal terindeks Scopus. Pertama, dengan judul



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

“The Principles Of State Guidelines As Legal Basis And Legal Politic For Sustainable Development In Facing The Industrial Revolution 5.0”. Kedua, berjudul “The Staples Of The State Policy As The Legal Basis For Sustainable Development To Face The Industrial Revolution 5.0 and Golden Indonesia”.

“Penelitian ini menemukan kebenaran ilmiah terkait konseptual PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan dalam rangka menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas. Indonesia tidak mungkin melepaskan pengaruh Industri 5.0. Perlu ada landasan hukum yang kuat agar pembangunan Indonesia tidak hanya berkelanjutan, tetapi juga berkesinambungan dengan ekonomi yang terus tumbuh. Sehingga menjadikan Indonesia sanggup bersaing secara global,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, terkait PPHN dalam dimensi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas, dirinya menekankan bahwa PPHN harus mampu memosisikan keberadaannya dalam perubahan dunia

yang sangat cepat, sangat kompetitif, dan berbasis transformasi digital. PPHN harus mampu melanjutkan seluruh temuan teknologi dan ekosistem yang lahir dari perkembangan Industri 5.0 yang merupakan koreksi bahwa pendekatan teknologi dan ekosistem harus berpusat pada peran manusia.

“PPHN juga harus mampu mewujudkan seluruh teknologi digital agar diperuntukkan dan tetap berada di bawah kendali manusia, mampu menghadapi kompetisi global yang sangat keras melalui kesinambungan pembangunan dari satu periode ke periode berikutnya, hingga menata berbagai kebijakan dan regulasi nasional dengan tujuan memperkuat kedaulatan dan pertumbuhan ekonomi, serta kehidupan sosial politik dan budaya yang mendukung pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan,” terang Bamsuet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, penelitian ini juga menghasilkan saran agar MPR RI dapat segera membentuk Tim Persiapan Pembentukan PPHN yang bertugas sebagai

unit persiapan pelebagaan PPHN, termasuk konsepsi substansi dan struktur hukum PPHN. MPR RI sebagai lembaga negara perlu melakukan konsolidasi internal dan eksternal dalam rangka memperkuat kedaulatan rakyat sesuai UUD NRI Tahun 1945, yang dimanifestasikan dalam PPHN.

“Selain juga mendorong DPR melakukan perubahan/revisi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan menghapus Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b, Mendorong DPR melakukan perubahan/revisi terhadap UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD dengan menambah kewenangan MPR membentuk TAP MPR yang bersifat mengatur atau regeling, dan langkah konkret melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi UU Nomor 12 Tahun 2011, dengan meniadakan penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b,” pungkas Bamsuet. □

Bamsuet: Kita Butuh Haluan Negara yang Dikuatkan dengan Landasan Hukum Lebih Kuat

Di hadapan Penguji Promosi Doktor, Bamsuet Ingatkan Pentingnya MPR Memiliki Kewenangan Subyektif Superlatif Guna Antisipasi Terjadinya Kondisi Kahar Fiscal Akibat Krisis Ekonomi Dunia

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengingatkan Indonesia tidak boleh menjadi negara gagal dan mengalami kebangkrutan seperti Sri Lanka dan Ghana. Tidak boleh juga seperti tiga negara lainnya yang saat ini terancam sebagai negara gagal, yaitu Pakistan, Mesir dan Bangladesh. Indonesia juga tidak boleh terancam mengalami krisis perekonomian, khususnya krisis keuangan yang dikategorikan sebagai kahar fiscal.

Karena itu kata Bamsuet, Indonesia perlu menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai produk hukum yang dapat mencegah sekaligus menjadi solusi mengatasi persoalan yang dihadapi oleh negara dengan menggunakan kewenangan subjektif superlatif MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara.

“Kewenangan subjektif superlatif itu juga penting berada di MPR jika negara dihadapkan pada situasi kebuntuan politik



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

antarlembaga negara atau antarcabang kekuasaan. Misalnya, kebuntuan politik antara lembaga kepresidenan (pemerintah/eksekutif) dengan lembaga DPR (legislatif) atau kebuntuan politik Pemerintah dan DPR dengan lembaga Mahkamah Konstitusi (yudikatif). Siapa yang berhak memutuskan jika terjadi suatu kondisi *force majeure* atau kahar fiscal dalam skala besar, namun terjadi kebuntuan antara presiden dan DPR?

Mengingat, dalam Pasal 22 UUD NRI Tahun 1945 yang terdiri atas tiga ayat. Ayat pertama, dalam hal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Ayat kedua, peraturan pemerintah harus mendapat persetujuan DPR. Ayat ketiga, jika tidak mendapat persetujuan DPR, maka peraturan pemerintah itu harus dicabut. Lalu, jika terjadi perseteruan antara presiden (pemerintah) dan DPR, sementara negara masih dalam situasi kedaruratan yang tinggi siapa yang menengahi? "Menurut saya, yang paling tepat adalah MPR sebagai representasi pemegang kedaulatan rakyat," ujar Bamsoet menjawab pertanyaan Prof. Mahfud MD dan Yusril Izza Mahendra dalam Sidang Terbuka Promosi Doktor Ilmu Hukum dari FH Unpad, di Bandung, Sabtu (28/1/23).

Para penguji terdiri dari Ketua Sidang Rektor Unpad Rina Indiasuti, Sekretaris Sidang Huala Adolf, Ketua Tim Promotor Ahmad Ramli dan Co Promotor Ary Zulfikar, dan Representasi Guru Besar I Gde Pantja Astawa. Serta oponen ahli yang terdiri dari Menkumham Yasonna H Laoly, Menkopolkum Mahfud MD, Guru Besar Tata Negara Yusril Izza Mahendra, Adrian E Rompis, dan Prita Amalia.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, hari ini Indonesia dihadapkan pada fakta bahwa tidak lagi memiliki roadmap atau bintang pengarah berjangka panjang yang jelas, yang bisa menuntun kemana kapal besar bangsa ini akan dibawa berlabuh. Sehingga siapapun tidak akan mampu menjawab wajah Indonesia 2045. Padahal, bangsa Indonesia adalah pemilik berbagai sumber daya alam (SDA) terbesar dunia, antara lain nikel nomor 1 di dunia, batubara nomor 2 di dunia, emas nomor 9 di dunia, tembaga nomor 7 di dunia, dan gas alam nomor 13 di dunia.

"Ironisnya, sampai hari ini rakyat kita yang tinggal di berbagai lokasi sumber daya alam tersebut justru hidupnya masih berada di bawah garis kemiskinan. Bahkan di beberapa daerah Sulawesi yang merupakan wilayah kaya nikel, masih banyak yang

hidupnya miskin ekstrim, dengan pendapatan rata-rata hanya Rp 600 ribu per tahun," jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Wakil Ketua Umum FKPPi ini menerangkan, Indonesia butuh suatu perencanaan jangka panjang yang tepat, konsisten, berkelanjutan dan berkesinambungan dari suatu periode pemerintahan yang satu dengan pemerintahan berikutnya, serta antara pusat dan daerah. Sehingga mampu memanfaatkan sumber daya alam yang luar biasa tersebut untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Mewujudkan cita-cita dan impian para pendiri bangsa untuk menghadirkan Indonesia yang sejahtera dan bahagia.

"Kita butuh memiliki haluan negara yang dikuatkan dengan landasan hukum yang lebih kuat, bukan sekedar melalui undang-undang yang setiap saat dapat ditorpado dengan Perppu atau di judicial review ke MK. Landasan hukum yang kuat tersebut yakni berupa TAP MPR yang berada dibawah UUD NRI Tahun 1945 dan berada diatas undang-undang," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum SOKSI dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menambahkan, padahal para pendiri bangsa sejak awal kemerdekaan telah



menyiapkan haluan negara sebagai road map pembangunan masa depan bangsa, yang dikuatkan dengan landasan hukum TAP MPR. Pada saat itu, Bung Karno dan Bung Hatta menyebutnya dengan nama Pola Pembangunan Semesta Berencana (PPSB) sebagai landasan program pembangunan nasional berdasarkan Ketetapan MPRS No.I/MPRS/1960 tentang Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai GBHN.

“Terdapat juga Ketetapan MPRS No.II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pembangunan Nasional Semesta Berencana 1961-1969 dan Ketetapan MPRS No.IV/MPRS/1963 tentang Pedoman-pedoman Pelaksanaan GBHN dan Haluan Pembangunan. Begitu juga di masa Orde Baru. Semua perencanaan jangka panjang yang merupakan haluan negara atau peta jalan bangsa dikuatkan dengan TAP MPR,” pungkas Bamsuet. □

Bamsuet Apresiasi Dukungan Presiden, Wakil Presiden, dan Berbagai Pihak Lainnya

Disertasi Bamsuet sangat relevan untuk kepentingan kita menatap tantangan masa depan menuju Indonesia yang maju, Indonesia Emas 2045.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo

mengapresiasi dukungan Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali, KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo, serta berbagai pihak lainnya atas keberhasilan dirinya meraih gelar Doktor bidang Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung dengan predikat cumlaude.

Presiden Joko Widodo mengungkapkan, disertasi Bamsuet mengenai “Peranan dan Bentuk Hukum Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) sebagai Payung Hukum Pelaksanaan Pembangunan Berkesinambungan dalam Menghadapi Revolusi Industri 5.0 dan Indonesia Emas”, memiliki relevansi secara akademik dan akan berkontribusi dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia. Wakil Presiden RI KH Maruf Amin menuturkan, disertasi Bamsuet dapat menjadi referensi esensial untuk mewujudkan visi Indonesia Emas, khususnya dalam merespon

perubahan dan tantangan global yang membutuhkan sumbangan pemikiran dari berbagai cabang keilmuan.

“Dukungan Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden KH Maruf Amin, dan berbagai pihak lainnya terkait kajian tentang PPHN dalam disertasi ini menjadi angin segar agar bangsa Indonesia bisa segera menghadirkan PPHN tanpa melalui amendemen, melainkan dengan konvensi ketatanegaraan delapan lembaga tinggi negara. Sehingga berbagai program pembangunan yang dilakukan Presiden Joko Widodo, seperti pembangunan IKN Nusantara, menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, serta pembangunan dan penyempurnaan Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia, bisa tetap dilanjutkan oleh siapapun presiden penggantinya,” ujar Bamsuet usai dinyatakan lulus Sidang Promosi Terbuka Doktor Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, di Bandung, Sabtu (28/1/23).

Selain Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa hasil disertasi Bamsuet tentang PPHN melengkapi kerja gotong royong bangsa Indonesia dalam pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti meyakini, gelar doktor yang didapat



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Bamsoet bukan saja bermanfaat bagi dirinya pribadi, melainkan juga untuk kebaikan umat, bangsa dan negara.

Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan melihat, disertasi tentang PPHN ini mencerminkan keinginan kuat dari Bamsoet untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada negeri tercinta mengenai pemahaman pentingnya pembangunan berkesinambungan dalam menghadapi perubahan dunia yang begitu cepat.

“Saya harap disertasi ini dapat menjadi bacaan serta rujukan dalam mewujudkan

konsistensi arah pembangunan negara serta bangsa kedepan. Hal tersebut sangat kita butuhkan karena saat ini Indonesia pada posisi negara yang sangat baik. Presiden Jokowi sudah membuat sebuah arah yang bagus. Untuk itu saya berharap, disertasi ini dapat dibuat sebagai rujukan yang berkelanjutan bagi penyusunan peraturan perundangan meskipun terjadi pergantian dalam struktur kepemimpinan nasional dalam waktu yang akan datang. Bamsoet telah memberikan sumbangan yang penting bagi bangsa dan negara, karena dapat dinikmati oleh anak-anak muda Indonesia,” ujar Luhut



Pandjaitan.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno berpandangan, disertasi Bamsoet tersebut sudah ditunggu oleh para akademisi dan masyarakat luas. Karena selain kontribusinya untuk bidang ilmu hukum, disertasi ini juga akan menjadi bagian penting untuk memperkaya pemikiran hukum tata negara dan tata pemerintahan di Indonesia.

“Sumbangsih pemikiran yang telah dituangkan oleh Bamsoet dalam disertasinya tersebut dapat memperkokoh pondasi negara menuju Indonesia Emas, serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi generasi penerus bangsa,” tutur Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Disisi lain, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan bahwa capaian prestasi akademik Bamsoet dalam meraih gelar Doktor diharapkan dapat memotivasi untuk memberikan sumbangsih terbaik bagi bangsa dan negara. Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo berharap, capaian disertasi ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan pembangunan dan pemulihan ekonomi nasional.

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurachman menuturkan, disertasi Bamsoet memberikan sumbangsih pada dunia ilmu pengetahuan untuk selanjutnya diimplementasikan bagi kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara, serta memperluas cakrawala ilmu pengetahuan bagi generasi penerus bangsa.

KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali menilai, disertasi ini akan memperkaya referensi akademik bidang hukum dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional. Sedangkan KSAU Marsekal TNI Fadjar Prasetyo meyakini, pencapaian gelar Doktor Ilmu Hukum ini dapat memberikan manfaat yang seluasnya bagi diri Bamsoet pribadi, bangsa dan negara.

“Disertasi ini sangat relevan untuk kepentingan kita menatap tantangan masa depan menuju Indonesia yang maju, Indonesia Emas 2045. Kita tidak mungkin mampu mencapai mimpi besar pada saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia, apabila tidak bisa menyusun rencana pembangunan jangka panjang yang berorientasi kepada kepentingan bangsa dan negara,” jelas Duta Besar RI untuk Singapura Suryopratomo yang juga mantan wartawan. □



Bosccha Nama Abadi di Langit dan Bumi

Satu Abad sudah Observatorium Bosccha berdiri dan mengabdikan pada ilmu astronomi. Observatorium yang berdiri di Lembang itu tak terpisahkan dengan sosok yang bernama Karel Albert Rudolf (K.A.R.) Bosscha. Pria berdarah Belanda-Jerman itu sosok yang peduli pada dunia pendidikan. Banyak sekolah didirikan, termasuk cikal bakal ITB. Dia pun membiayai pembangunan observatorium. Untuk mengenang jasanya yang sangat besar dalam dunia astronomi maka nama Bosscha diabadikan pada observatorium dan disematkan pada salah satu planet.

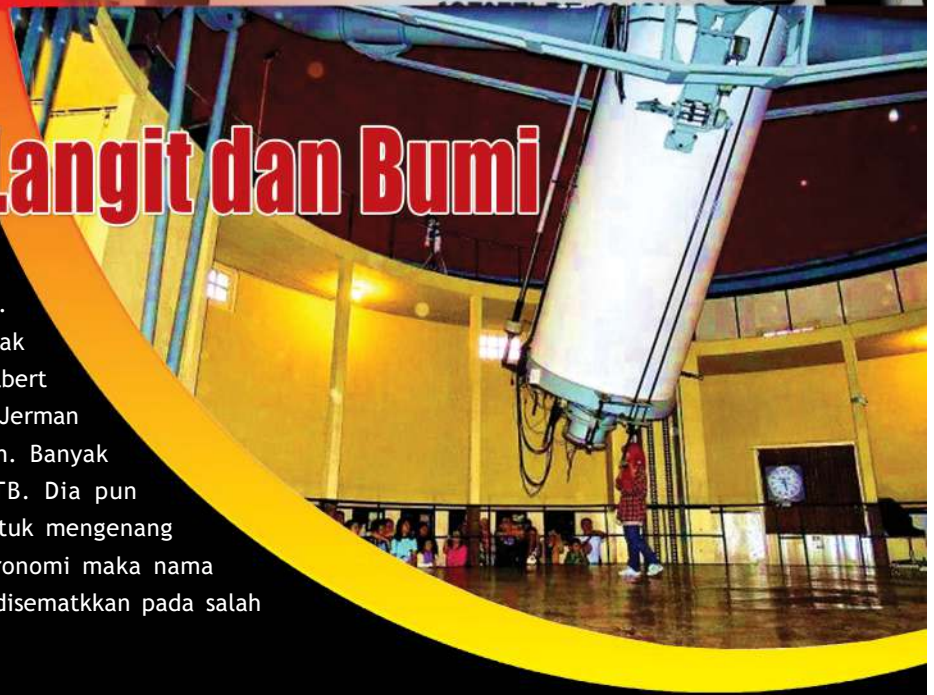


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

HOTEL Savoy Homann menyimpan banyak cerita tentang kehidupan manusia. Hotel yang dibangun pada masa kolonialisme Belanda itu menjadi saksi bisu atas apa yang terjadi di Bandung. Bila dinding-dindingnya bisa bercerita, ia akan serius memaparkan bagaimana Konferensi Asia Afrika yang digelar pada tahun 1955.

Tak hanya itu peristiwa yang akan diungkap oleh dinding-dinding hotel. Di situ juga terpapar cerita menceritakan bagaimana tamu-tamu besar, seperti Soekarno, Jawaharlal Nehru, serta pemimpin dunia lainnya pernah ngamar di sana. Dinding-dinding itu juga pasti pernah menyaksikan bagaimana komedian dunia Charlie Chaplin singgah di Homann.

Suatu ketika ada pertemuan besar di sana. Tanggal 12 September 1920, puluhan orang berkulit putih berkumpul di salah satu ruangan Homann. Mereka ada yang berasal dari kalangan akademisi, peneliti, tuan tanah, dan perwakilan perusahaan bisnis. Salah satu dari ratusan orang itu adalah Karel Albert Rudolf (K.A.R.) Bosscha.

Meski berasal dari berbagai latar, namun ada satu kepedulian yang sama pada mereka, yakni adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang astronomi. Pada hari, bulan, dan tahun itu, mereka mendirikan Perhimpunan Astronomi Hindia Belanda atau *Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereniging* (NISV). Dari berbagai sumber yang mengisahkan Observatorium Bosscha, terdapat cerita bahwa NISV dibentuk dengan maksud untuk mendirikan dan memelihara observatorium astronomi di Hindia Belanda, selain demi memajukan ilmu astronomi.

Dalam rapat terjadi perdebatan soal rencana pembangunan observatorium. Perdebatan tidak hanya soal di mana lokasi bangunan, namun juga siapa yang menanggung biaya pendirian observatorium. Di tengah perdebatan yang semakin memanas, di tengah sejuknya hawa Bandung, tiba-tiba Bosscha mengangkat tangannya. Apa yang dilakukan itu membuat peserta rapat kaget, apa gerangan yang diinginkan dari pria yang lahir di tahun 1865



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

itu. Keheningan rapat pecah saat pria berdarah Jerman-Belanda itu dengan tegas mengatakan, “saya bersedia menjadi penyandang dana utama dan berjanji akan memberikan bantuan pembelian teropong bintang”. Apa yang disampaikan itu membuat peserta rapat bergembira ria. Rapat yang awalnya panas menjadi sejuk, dan selesai

sudah apa yang menjadi persoalan dalam rapat itu.

Dalam *Wikipcdia* diungkapkan, sosok tentang Bosscha. Ia merupakan baron, tuan tanah yang kaya raya, namun juga peduli pada pendidikan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Diceritakan dalam laman itu, Bosscha pada Agustus 1896 *babad alas* di



Hotel Savoy Homann



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bandung untuk mendirikan perkebunan teh di Malabar. Perkebunan teh yang dibuka dengan luasnya berhektar-hektar itu mampu menempatkan dirinya sebagai juragan teh terbesar di Pangalengan.

Bosscha sebagai pemilik kebun teh tidak hanya sekadar menanam dan memetik tetapi juga mengolah daun-daun teh selepas panen. Usaha yang dikelola dari hulu sampai hilir tersebut mampu membuat dirinya membangun dua pabrik teh. Dua pabrik teh itu, satu di Malabar, satunya lagi di Tanara.

Sebagai baron, Bosscha bukan sosok baron yang diceritakan dalam telenovela atau drama-drama film yang kejam, suka menyiksa buruhnya, dan pelit. Ia adalah orang yang peduli pada sesama. Meski dirinya orang kulit putih tetapi suka mengangkat derajat kaum pribumi. Diceritakan dalam laman di atas, pada tahun 1901 ia mendirikan sekolah dasar bernama *Vervoloo* Malabar. Sekolah dasar itu dibuat untuk memberi kesempatan belajar secara gratis bagi kaum pribumi. Anak-anak buruh perkebunan dan pabrik teh miliknya tak perlu membayar bila sekolah di sekoah dasar yang didirikan.

Orang-orang ITB pun saat ini juga

menghormati Bosscha, sebab dia mempunyai peran penting atas berdirinya *Technische Hoogeschool te Bandoeng*, sekarang menjadi ITB. Dirinya tidak hanya sekadar menyumbang, namun juga menjadi Ketua *College van Directeureun* (Rektor). Jabatan itu membuat dirinya tak hanya mengurus kebutuhan material buat pembangunan sekolah itu, namun juga memikirkan kegiatan perkuliahan.

Bosscha terusik untuk peduli hingga bersedia menjadi penyandang dana pembangunan observatorium, sebagai



Karel Albert Rudolf Bosscha

tindak lanjutnya dari pertemuannya dengan Joan George Erardus Gijsbertus Voûte. Ia adalah seorang astronom. Meski orang Belanda, namun Voute kelahiran Madiun. Sebagai seorang astronom, dia pernah bekerja di observatorium milik pemerintah Belanda yang ada di Tanjung Harapan, Afrika Selatan. Observatorium itu digunakan untuk melakukan penelitian astronomi di bumi bagian selatan. Dirinya ingin agar penelitian astronomi di sana diperkuat dan dikembangkan.

Harapan Voute untuk memajukan ilmu astronomi di Tanjung Harapan rupanya tidak direspon oleh pemerintah. *Ngambek* dan *mutung* atas tidak responsifnya pemerintah Belanda membuat Voute memilih pulang kembali ke Hindia – Belanda.

Setelah berada di Hindia – Belanda, dirinya tetap ingin memajukan ilmu astronomi. Ia memengaruhi teman-teman di Belanda yang juga astronom untuk membangun observatorium di Hindia – Belanda. Dirinya bersyukur setelah bertemu Bosscha. Pertemuan Bosscha dan Voute ini mengundang rekan-rekannya yang lain untuk bahu-membahu membangun observatorium. Setelah itu datanglah kemenakan Bosscha,

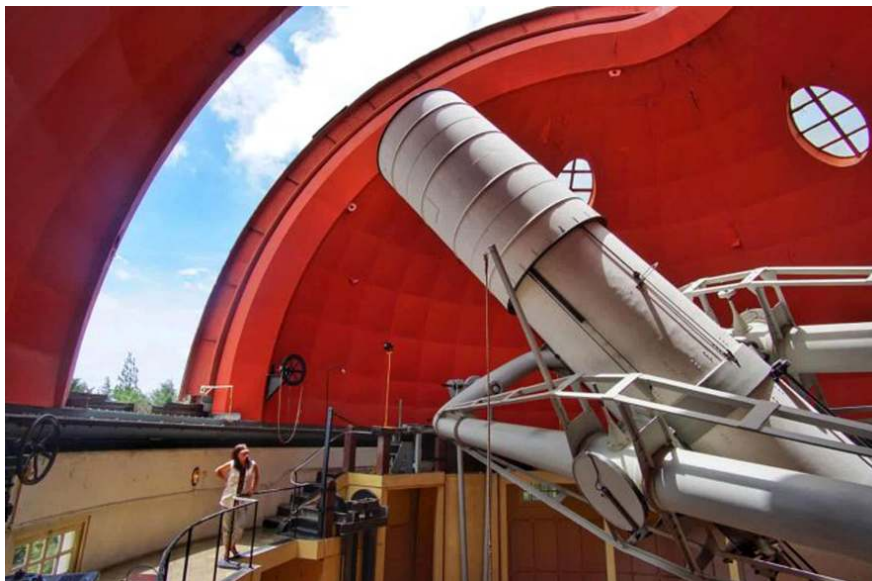


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

R.A. Kerkhoven, yang juga siap membantu.

Setelah urusan dana pembangunan selesai, selanjutnya dipikirkan di mana observatorium didirikan. Setelah dilakukan survei dan gelar pendapat, akhirnya Lembang dipilih sebagai lokasi berdirinya observatorium. Alasan Lembang dijadikan tempat pengamatan, sebab secara topografi Lembang pada posisi cukup aman untuk melihat gugus galaksi di langit sisi selatan. Tanah yang sekarang telah berdiri observatorium itu merupakan sumbangan dari peternak sapi perah dari Keluarga Ursone dan Baroe Adjak. Mereka telah menyumbangkan sebidang tanah.

Semua masalah sudah selesai dan pembangunan pun dimulai. Kontraktor pembangunan itu adalah *De Hollandsche Beton Maatschappij* dengan arsitek Wolff Schoemaker. Setelah berproses akhirnya pada 1 Januari 1923 observatorium itu diresmikan. Meski sudah diresmikan, namun teropong pengamatan yang dipesan belum datang. Bosscha sebenarnya sudah memesan teropong dari salah satu perusahaan optic di Jerman, Carl Zeiss, dengan diameter 0,6 meter atau 60 sentimeter dengan panjang fokus 10 meter sejak awal tahun 1921. Sambil menunggu teropong pesanan datang, pengamatan yang dilakukan masih terbilang menggunakan instrumen seadanya.

Untuk membeli teropong yang diinginkan, Bosscha dan Voute lebih dahulu bertukar pikiran atau berbagi pendapat dengan Direktur Observatorium Leiden, Ejnar Hertzsprung. Dari tukar pikiran itu diperoleh dua keputusan, yaitu: Pertama, meminta Observatorium Leiden sebagai konsultan pengawas dari pembelian teropong; dan kedua, meminta saran mengenai pembelian dan pendapat soal sistem pikul teropong.

Harga teropong yang diinginkan bisa dibilang mahal, sehingga Bosscha saat itu menunggu kurs mata uang Jerman, Mark, jatuh sehingga teropong bisa dibeli dengan harga murah tanpa mengurangi kualitas. Jatuhnya Mark sangat mungkin, sebab saat itu Eropa selepas mengalami Perang Dunia I.

Sepertinya harapan Bosscha agar Mark jatuh terjadi sehingga teropong yang diinginkan bisa terbeli. Untuk menunggu pesanan teropong memerlukan waktu sekitar 7 tahun. Bagi Carl Zeiss tak mudah menciptakan teropong yang disebut terbesar ketiga di bumi bagian selatan.

Akhirnya, pesanan yang ditunggu-tunggu tiba pada 7 Juni 1928, dan teropong itu pun dipasang. Tidak mudah memasang dan menempatkan teropong di observatorium, sehingga sampai-sampai Voute harus berulang kali mengkalibrasi teropong. Disebut butuh waktu 2 tahun untuk mencapai kalibrasi yang diinginkan.

Teropong itu sampai saat ini masih berfungsi. Saat penulis berkunjung ke sana, betapa besar dan canggihnya teropong itu. Dalam *Wikipedia* disebutkan, teropong itu berfungsi untuk mengamati fisik dan perilaku bintang, terutama bintang biner dan gugus bintang. Teropong yang berwarna putih tersebut juga dimanfaatkan untuk mengamati komet dan planet tata surya melalui teknologi CCD.

Setelah teropong terpasang, hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan observatorium sangat berarti bagi kemajuan ilmu astronomi tidak hanya di Hindia-Belanda, namun juga dunia internasional. Hal demikian mengundang perhatian banyak pihak untuk ikut memberi bantuan kepada observatorium.

Dalam *kompas.com*, 8 Agustus 2022, disebut NISV menerima sumbangan dana dari *De Bataafsche Petroleum Maatschappij*, *De Javasche Bank*, *De Stoomvaart Mij "Nederland"*, *De Stoomvaart Mij "Rotterdamsche Llyod"*, dan *De Nederlandsche Handel Maatschappij*. Instansi tersebut menyumbangkan dana kepada NISV masing-masing sebesar 10.000 gulden. Sementara, Prof. JG van de Sande Bakhuyzn menyumbangkan koleksi perpustakaan.

Tak lama setelah teropong buatan Jerman terpasang dan menghasilkan penelitian yang membantu kemajuan peradaban zaman, Bosscha meninggal dunia. Tercatat, ia menghembuskan nafas yang terakhir pada 26 November 1928. Untuk mengenang jasa-jasa atas berdirinya observatorium itu maka tempat itu dinamakan Observatorium Bosscha. Nama itu abadi hingga saat ini.

Namanya tidak hanya abadi di bumi. Dalam *Wikipedia* diungkapkan, pada tanggal 28 September 2007 sebuah *planetoid* (11431) diberi nama *Karelbosscha*. Sebutan Bosscha disematkan pada planet katai berdiameter sekitar 5 km dan berorbit di antara Planet Mars dan Planet Jupiter, dengan jarak rata-rata dari matahari 71 juta km (kala revolusinya 5,58 tahun) untuk mengenang jasa-jasa Bosscha yang sangat berarti dalam dunia astronomi. □

AWGI/dari berbagai sumber



Kedap-Kedip Observatorium Bosscha

Keberadaan Observatorium Bosscha seperti kedap-kedip bintang di langit, terang dan redup. Dalam masa normal, banyak penelitian yang dihasilkan. Saat terjadi peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang dan di masa awal kemerdekaan, observatorium mengalami kemangkrakan dari penelitian dan bangunan.

Meski sekarang sudah menjadi obyek vital, namun ada isu Bosscha hendak ditutup karena lingkungan, Lembang, sudah tidak mendukung. Banyak cahaya dan polusi yang membuat langit menjadi tercemar.

DAMPAK invasi Jepang ke Asia Tenggara dalam Perang Dunia II yang ditimbulkan tidak hanya Jepang menduduki negara-

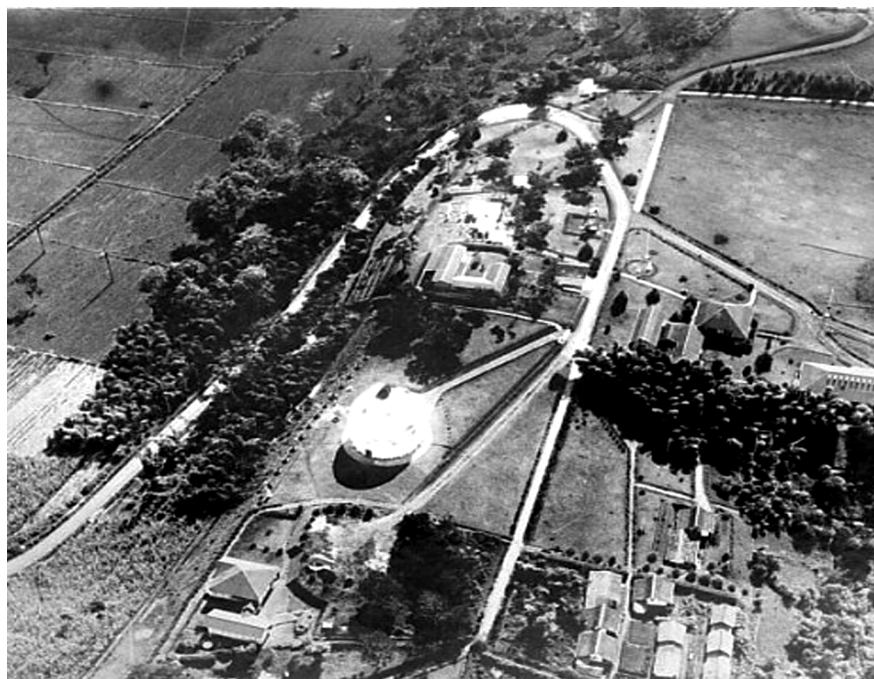
negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, namun juga pada aktivitas di Observatorium Bosscha. Giat-giatnya penelitian yang dilakukan oleh Voute dan

astronom lainnya menjadi terganggu saat tentara Jepang juga tertarik bahkan berminat menguasai observatorium.

Sebagai invasi yang bertujuan menghancurkan dan menyingkirkan orang-orang Belanda di Indonesia, maka langkah pertama menguasai observatorium adalah mengganti seluruh peneliti dan karyawan dari orang-orang Belanda dengan pegawai dan peneliti dari Jepang ditambah dari Indonesia. Direktur Observatorium Bosscha yang awalnya dipegang oleh Aernout de Sitter diganti oleh Kapten Masashi Miyadi dari Angkatan Bersenjata Jepang.

De Sitter, menurut *Wikipedia*, adalah astronom Hindia Belanda. Dirinya merupakan putera dari astronom terkenal Belanda, Willem de Sitter. Dipercaya oleh NISV sebagai Direktur Observatorium Bosscha dari tahun 1940 hingga 1942. Kedatangan Jepang tak hanya membuat dirinya dicopot dari jabatan sebagai direktur, namun membuatnya juga dimasukkan ke dalam kamp tahanan di Sumatera. Di sana, tahun 1944, dia meninggal akibat siksaan yang demikian kejinya.

Jepang merasa bingung dan tak bisa mengelola observatorium, sebab Miyadi bukan astronom. Observatorium pun saat awal-awal peralihan dari Belanda ke Jepang tidak melakukan kegiatan peneropongan ke langit. Agar observatorium itu kembali berfungsi dan ikut mendukung cita-cita Jepang dalam upaya menguasai Asia maka Miyadi meminta Voute ikut mengelola observatorium. Voute bisa jadi dianggap tidak berbahaya bagi Jepang sehingga dirinya diminta bertugas untuk membantu mengelola observatorium. Dalam kesempatan itu, Voute melanjutkan penelitian terhadap bintang biner yang telah dilakukan sebelumnya.



Willem de Sitter

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Diceritakan dalam *Wikipedia*, Jepang menguasai Observatorium Bosscha sebagai dukungan kepada bidang astronomi dan biologi di Hindia-Belanda mengacu pada ideologi politik Kekaisaran Jepang, yaitu Asia Raya. Ideologi ini bercita-cita menciptakan modernitas Asia dengan gaya Jepang sebagai tandingan dari modernitas Barat.

Pendudukan Jepang di Indonesia seumur jagung. Penguasaan kepada observatorium pun juga senasib. Menyerah tanpa syarat kepada Sekutu sebagai tanda kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, observatorium pun diserahkan begitu saja kepada Voute.

Kekalahan Jepang membuat Indonesia merdeka. Kemerdekaan ini membuat seluruh

berbagai pepohonan. Bangunan yang ada pun tertutup pepohonan sehingga seperti rumah tua di tengah hutan.

Bagi NISV dan Belanda, Observatorium Bosscha merupakan aset penting dan vital, sehingga Belanda yang belum mengakui kemerdekaan Indonesia menunjuk Dr. Chris H. Hins sebagai Direktur Observatorium Bosscha menggantikan de Sitter yang meninggal di kamp tahanan Jepang di Sumatera. Tugas Hins pertama kali adalah merehabilitasi observatorium setelah mengalami kerusakan akibat peralihan pengelola di masa-masa tahun 1942-1946.

Untuk merehabilitasi observatorium diperlukan waktu 3 tahun dan akhirnya observatorium bisa difungsikan kembali.

Prof. Dr. Antonie Pannekoek, dengan judul disertasi 'Een Onderzoek van Lijnintensiteiten in Eenige Sterspectra van het Tweede Type' (Telaah Intensitas Garis Spektrum Bintang unik Tipe II).

Sejak Indonesia merdeka, Observatorium Bosscha mengalami kesulitan pembiayaan operasional. Pemerintah Belanda yang sudah mulai hengkang dari Indonesia membuat NISV 'bangkrut' sehingga tidak memiliki anggaran untuk membiayai observatorium. Agar penelitian tetap berlanjut pada tahun 1948 dijalin kesepakatan antara NISV dengan Th. M. Leeman. Leeman adalah Dekan Fakultas Ilmu Pasti dan Ilmu Alam Universitas Indonesia Bandung (Sebelum menjadi ITB).

Dari waktu ke waktu NISV semakin tidak memiliki anggaran dan program terhadap Observatorium Bosscha. Agar tidak menjadi beban yang semakin berat maka pada 17 Oktober 1951, NISV menyerahkan observatorium itu kepada pemerintah Indonesia.

Dalam *kompas.com*, 8 Agustus 2022, diceritakan, observatorium "dititipkan" untuk menjadi bagian dari FIPIA Universitas Indonesia yang kemudian menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB). Setelah menjadi milik ITB, observatorium difungsikan sebagai lembaga penelitian dan pendidikan formal astronomi di Indonesia.

Perguruan tinggi (ITB) yang beralamat di Jl. Ganeca Bandung itu merupakan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang menjalankan pendidikan sarjana, magister, dan doktoral dalam astronomi dan astrofisika.

Dalam laman itu disebutkan, Observatorium Bosscha merupakan observatorium astronomi terbesar di Indonesia dengan kontribusi dalam penelitian dan pendidikan astronomi yang signifikan di Asia Tenggara.

Agar keberadaannya terjaga, pemerintah pada tahun 2004 menetapkan Observatorium Bosscha sebagai Cagar Budaya Nasional pada tahun 2004. Statusnya pada 2008, menjadi Objek Vital Nasional. □

AWGI/dari berbagai sumber



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

aset milik bangsa dan orang Belanda direbut dan diduduki oleh para pejuang dan rakyat Indonesia, termasuk Observatorium Bosscha. Voute yang merasa gembira setelah menguasai observatorium kembali berduka sebab dirinya diusir oleh masyarakat di sana setelah Indonesia merdeka.

Praktis setelah Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945 dan Voute diusir oleh masyarakat di sana, membuat Observatorium Bosscha mangkrak dan tak terurus. Taman yang biasa diurus oleh tukang kebun menjadi terbengkalai. Akibatnya, di observatorium dan sekitarnya tumbuh

Tugas Hins sukses untuk mengembalikan fungsi observatorium. Saat di Lembang dirinya dibantu oleh Gale Bruno van Albada. Ia tiba di Indonesia pada Mei 1949. Tak hanya membantu Hins tetapi juga menjadi asisten dosen di THB. Dirinya mempunyai jam untuk tugas-tugas mengajar. Jabatan Hins sendiri berakhir pada tahun 1951. Dia diganti oleh van Albada.

Dalam *Wikipedia* ditulis panjang tentang siapa van Albada. Yang pasti dalam laman itu disebut, dia merupakan seorang astronom Belanda. Lahir di Amsterdam. Memperoleh gelar Doktor dari Universiteit van Amsterdam (UvA) di bawah bimbingan



Harapan dan Tantangan Pada Bosscha

ITB, alumni, masyarakat astronomi, dan Gubernur Jawa Barat memperingati 100 Tahun Observatorium Bosscha. Tantangan dan harapan ada di depan observatorium itu. Semua mengajak untuk peduli dan melindungi keberadaan observatorium. Ini penting, sebab Bosscha merupakan cagar budaya bangsa dan dunia yang tengah dirundung bahaya polusi udara.

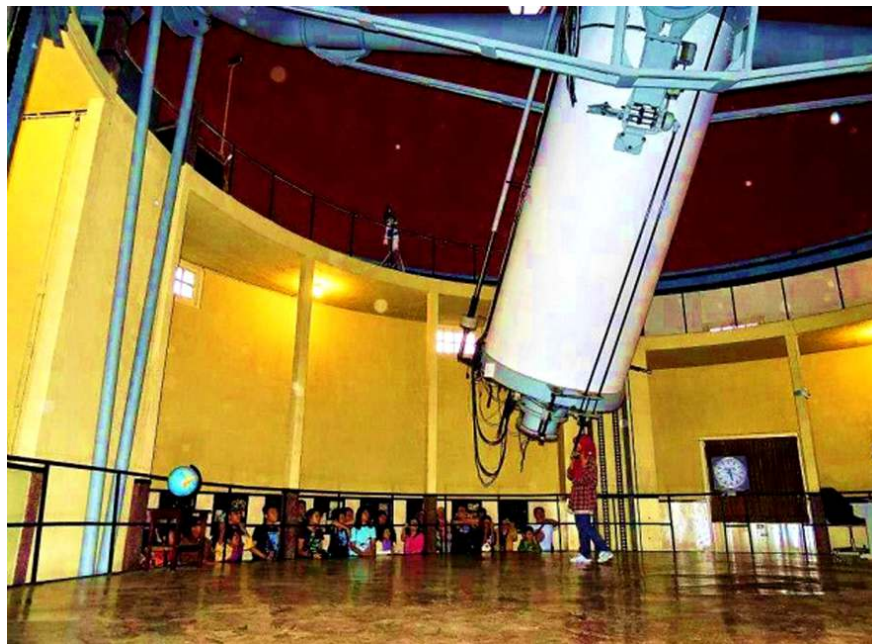


FOTO-FOTO: ISTIMEWA

DI WEB itb.ac.id pada Januari 2023 tertulis dengan jelas dan besar suatu maklumat yang menyatakan, 'Peringatan 100 Tahun Observatorium Bosscha, Januari 1923 - Januari 2023.' Dalam maklumat tersebut diterangkan

secara panjang lebar bahwa: Observatorium Bosscha yang diresmikan pada tanggal 1 Januari 1923 atas prakarsa K.A.R. Bosscha bersama *Nederlandsch-Indische Sterrenkundige Vereeniging*, merupakan observatorium astronomi

modern pertama di Asia Tenggara. Dengan itu, ilmu astronomi di Indonesia mulai memberikan kontribusi internasional bagi perkembangan astrofisika pada topik bintang, tata surya, dan galaksi.

Lebih lanjut dalam maklumat itu dinyatakan, pada tanggal 30 Januari 2023, kami akan merayakan peringatan 100 tahun Observatorium Bosscha dengan semangat kolaboratif, untuk menghormati kontribusinya sekaligus menghormati semua individu dan kelompok yang telah bekerja dengan observatorium selama bertahun-tahun. Sejalan dengan pola pikir kolaboratif, kami sedang mengembangkan strategi masa depan untuk meningkatkan astronomi di Indonesia dan memastikan bahwa Observatorium Bosscha terus berperan penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya di seluruh dunia.

Membaca maklumat di itb.ac.id tersebut, merupakan cara untuk melihat dan merasakan kehebatan Observatorium Bosscha dari dekat. Sebagai pengelola observatorium, Institut Teknologi Bandung (ITB) memberi ruang khusus pada observatorium. Di bosscha.itb.ac.id, kita bisa melihat aktivitas keseharian dari observatorium itu.

Dijelaskan dalam web itu, Observatorium Bosscha adalah lembaga riset yang berada di bawah naungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Institut Teknologi Bandung (FMIPA ITB). Hingga saat ini, Observatorium Bosscha merupakan satu-satunya observatorium besar di Indonesia. Bersama-sama dengan Program Studi Astronomi, FMIPA ITB, Observatorium Bosscha menjadi pusat penelitian, pendidikan, dan pengembangan ilmu Astronomi di Indonesia.

Selain mengemban tugasnya dalam penelitian dan pendidikan, Observatorium





Reini Wirahadikusumah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bosscha melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat, baik dalam bentuk kegiatan rutin maupun kegiatan yang sifatnya insidental bergantung pada terjadinya fenomena astronomi yang menarik. Observatorium Bosscha pun membuka peluang kolaborasi dan belajar bagi mahasiswa maupun peneliti dari berbagai tempat di seluruh dunia. Peneliti dan mahasiswa dari berbagai tempat telah datang untuk melakukan pengamatan astronomi, melakukan analisis data astrofisika, belajar instrumentasi, dan lain sebagainya.

Observatorium Bosscha juga menerima mahasiswa maupun peneliti yang ingin belajar topik-topik non-astronomi yang relevan, misalnya tentang sejarah, bangunan, manajemen, serta lingkungan di Observatorium Bosscha.

Dalam 100 Tahun Observatorium Bosscha digelar berbagai macam acara. Pada acara puncak hadir para civitas akademika, para alumni, dan masyarakat lainnya. Pada acara puncak 30 Januari 2023, Rektor ITB, Prof. Reini Wirahadikusumah, seperti termuat dalam *celebrities.id*, 30 Januari 2023, mengatakan, Observatorium Bosscha merupakan aset bangsa dan juga internasional. Berbagai aktivitas penelitian astronomi harus tetap berjalan dan dilindungi dari ancaman polusi cahaya dan alih fungsi lahan. Meskipun diakuinya sekarang untuk

pengamatan sudah tidak ideal dan terganggu.

Menurutnya, semua harus memiliki kepedulian yang sama dalam melindungi Observatorium Bosscha. Apalagi kami juga punya wacana mendirikan pusat studi ilmu kebumihan dan antariksa, semoga bisa didukung dan terealisasi.

Alumni ITB sekaligus Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dalam web yang sama menyampaikan pesan bahwa Observatorium Bosscha istimewa karena posisinya berada di ekuator, yang menguntungkan dalam

pengamatan benda langit. Jadi, harus tetap dijaga keberadaan dan fungsinya.

Lebih lanjut dalam *celebrities.id* itu dikatakan, saat ini kesempatan menjadi momen bersejarah karena 100 tahun Observatorium Bosscha telah berdiri dan tetap berkontribusi terhadap ilmu ke astronomian nasional dan dunia. Sehingga semua pihak harus menjaga dan mendukung keberadaan Bosscha sebagai aset ilmu pengetahuan yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua manusia.

Keberadaan observatorium dikatakan oleh Ridwan Kamil bahwa Bosscha harus dilestarikan sebagai cagar budaya yang tidak boleh dirusak. Ke depan harus dibuatkan kajian mendalam agar bagaimana perkembangan ekonomi dan pembangunan di sekitarnya tidak mengganggu fungsi dan peran Observatorium Bosscha dalam pengamatan astronomi.

"Ini adalah salah satu objek cagar budaya dunia yang harus dilestarikan. Nantinya harus dilakukan zonasi master plane soal penetapan cagar budaya bangunan dan mengkaji RDTR agar kehidupan ekonomi bisa seimbang dan tidak mengganggu penelitian di Bosscha yang terancam akibat polusi cahaya," tuturnya seperti yang ada di *celebrities.id*. □

AWG/dari berbagai sumber



Ridwan Kamil



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc

Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas)

Perekonomian KTI Harus Ditingkatkan

KAMI di Unhas sangat memberikan apresiasi kepada pejabat lembaga publik, seperti Prof. Fadel Muhammad yang sangat peduli dengan pengembangan perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI).

Dengan beliau saya berbincang mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur. Karena, IKN akan menarik dan sebagai magnet ekonomi buat kawasan di sekelilingnya, termasuk KTI. Kami mendukung ini dan akan kami sampaikan kepada pemerintah, khususnya kepada Presiden.

Kami juga menyampaikan terima kasih karena Unhas diberi kepercayaan sebagai mitra strategis dalam mendiskusikan urgensi IKN terhadap akselerasi pembangunan KTI dan sekaligus membantu pemerintah yang selalu berkeinginan mengurangi gap pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.

Ini momentum terbaik. Insya Allah Unhas dengan segenap kemampuan dan potensinya beserta mitra-mitranya yang juga cukup banyak dari Timur Indonesia akan terus mem-back up upaya-upaya strategis ini. □

DER

Neyla

Mahasiswi Gorontalo

Penerima Beasiswa Harus Diperbanyak dan Diperluas

GENERASI muda bangsa adalah generasi penerus, namun banyak sekali dari mereka (pelajar dan mahasiswa) putus sekolah atau tidak meneruskan pendidikannya, karena tidak mampu. Hal ini sangat disayangkan karena di antara mereka itu banyak yang pintar, walaupun hanya anak desa.

Saya salah satu penerima beasiswa pendidikan dari programnya Pimpinan MPR, *alhamdulillah* meneruskan pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi. Program ini sangat berarti buat saya dan teman-teman lainnya, ini menjadi harapan kami untuk masa depan yang lebih baik. Ini bisa jadi teladan bapak pejabat-pejabat lainnya.

Saya berharap, program beasiswa ini diperbanyak dan diperluas kalau bisa sampai ke pelosok seluruh Indonesia, agar bisa menjangkau anak-anak desa yang tidak mampu. □

DER



Sugian Noor, sang Motivator

Kebahagiaan Terbesarku Adalah Keluarga



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BAGI anak-anak difabel di lingkungan Yayasan Pembinaan Anak-Anak Cacat (YPAC) Surakarta, Sugian Noor (57), bukan hanya sesosok senior yang merangkap menjadi pembina musik. Lebih dari itu, Sugian Noor sudah menjelma menjadi motivator, dan juga orangtua bagi anak-anak difabel di YPAC.

Menjadi motivator, karena — Om Sugi begitu Sugian Noor biasa disapa— tidak pernah lelah memberi semangat kepada anak didiknya. Dia juga kerap memberi tantangan kepada mereka untuk maju, dan lebih maju lagi. Dan, sebagai orang tua, Sugian tidak semata mengajar untuk menunaikan kewajiban, tapi Dia juga menyertakan hati serta kasih sayangnya saat bersama anak didiknya.

“Saya selalu katakan pada anak-anak, jangan pernah merasa dirimu tak berguna. Kalau kamu merasa dirimu tidak bisa apa-apa, itu salah. Kamu tidak bisa apa-apa, itu hanya istilah, tetapi sesungguhnya kamu bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat, bukan hanya untuk dirimu sendiri tetapi juga bagi orang lain,” kata Om Sugi saat bertemu Majalah *Mejelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Sugian sadar, tidak ada manusia yang hidup dengan sempurna, semua memiliki

kekurangannya sendiri-sendiri. Bagi Om Sugi, kaki merupakan ketidaksempurnaan yang harus dia terima. Dan, itu membuatnya sangat bergantung pada kursi roda.

Ketergantungan Sugian Noor terhadap kursi roda sudah berlangsung lama, sejak ia masih duduk di kelas enam Sekolah Dasar. Diduga, penyebabnya adalah virus yang menggerogoti kaki. Kemudian berakibat kakinya lemas, tidak bisa digunakan untuk berdiri, laksana benang

basah yang mustahil untuk berdiri.

Tetapi, dengan kelemahan yang menempel di badannya itu, Om Sugi tak pernah merasa bahwa hidupnya adalah kesia-siaan saja. Dengan berbagai cara dan upaya, Om Sugi berusaha untuk memaknai hidupnya. Salah satunya adalah menjadi pembina dan pembimbing musik bagi anak-anak difabel yang bernaung di bawah Yayasan Pembinaan Anak Cacat Solo.





Menjadi pembina musik bagi anak-anak difabel adalah salah satu bukti bahwa Sugian Noor tidak menyerah pada keadaan. Ia tetap berusaha agar bermanfaat bagi diri dan orang lain. Meskipun gaji yang diperoleh sebagai pembimbing musik bagi anak difabel di YPAC relative kecil. Tetapi karena tugas tersebut dilakukan dengan hati dan penuh tanggung jawab, sekecil apapun honor yang diterima, pekerjaan tersebut ditekuninya sepenuh hati.

"Kalau kita bekerja dengan hati maka urusan gaji tidak menjadi persoalan. Seperti itulah guru dan Pembina di YPAC, dan itu perlu ditiru oleh para pejabat. Kalau mereka bisa bekerja dengan hati, niscaya dia tidak akan korupsi, sekalipun misalnya tidak ada KPK," kata laki-laki kelahiran Jakarta Jakarta, 12 Juni 1965, ini.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan

dua anaknya, Om Sugi tak segan untuk ngamen, menjadi sales hingga menerima proyek-proyek tertentu. Ia juga kerap terlihat mengiringi para penyanyi memberi hiburan di tempat hajatan.

"Sebagai orangtua, tentu saya ingin selalu membahagiakan keluarga. Tetapi keinginan tersebut tidak bisa saya lakukan setiap saat. Adakalanya, saya harus mengelus dada, karena tidak dapat memenuhi permintaan anak-anak," ucapnya.

Menolak Pulang

Sejak kaki Sugian terlihat tidak tumbuh sebagaimana mestinya, Asmuni Noor dan Rukiyah yang tak lain orangtua Sugian, telah mengajak anaknya berobat di berbagai tempat. Dokter, tukang urut dan orang pitar, semua sudah dilakukan. Tetapi hasilnya sama saja, kaki Sugian tidak bisa digunakan,

sampai akhirnya ia harus bergantung kepada kruk dan kursi roda.

Karena ingin anaknya bisa mandiri, Sugian pun dititipkan di YPAC Surakarta, hingga lulus SLTA dan mengambil Fakultas Hukum di Uniba. Di tengah-tengah perjalanan tersebut Sugian diminta YPAC membantu mengawasi anak-anak belajar musik.

"Orang tua sempat meminta pulang, tetapi saya tolak. Saya yakin, kalau di rumah saya malah tidak mandiri. Sana sini prihatin dan mau membantu. Itu membuat saya bergantung pada orang lain," ungkapnya.

Sejak itu, Sugian mantap berada di Surakarta. Apalagi setelah diterima menjadi pegawai YPAC. Untuk menambah penghasilan Om Sugi melakukan berbagai pekerjaan yang bisa memenuhi kebutuhan. Dalam situasi itu, dia bertemu Ratna Wijayanti, seorang gadis, yang mau dinikahinya. Tetapi sayang Sugian harus merelakan kuliahnya. Risiko itu dia ambil, karena saat sudah berani menikah, keluarganya menganggap Sugian siap mandiri dan tidak menggantungkan kehidupannya dari bantuan keluarga.

Kini, dia sudah dikaruniai dua orang anak, pria dan perempuan. Keinginan besarnya adalah membahagiakan mereka, meski acapkali kesulitan juga menghampiri hidupnya. Tetapi, ia tidak berpangku tangan. Dengan keterbatasannya, Sugian terus berjuang dan berusaha memenuhi setiap kebutuhan anak dan istrinya.

"Kebahagiaan saya adalah membahagiakan keluarga. Saat tertentu yang memungkinkan, saya juga menggunakan kesempatan jalan dan makan bersama anak-anak. Karena merekalah yang membuat saya tetap berarti," pungkasnya. □

MBO

Bahas RUU Penjaminan

Fadel Berharap, Pemda Diberi Peran Lebih Besar untuk Pemberdayaan UMKM

Ada beberapa masalah sering dihadapi para pelaku UMKM di daerah-daerah dalam upaya mengembangkan usahanya. Salah satunya, soal persyaratan penjaminan untuk bisa memperoleh modal di perbankan.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad meminta pemerintah daerah di seluruh Indonesia memiliki peran yang lebih besar untuk melindungi dan mempermudah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, kegiatan ekonomi inilah yang paling banyak dikelola rakyat kecil bahkan sampai ke pelosok daerah.

"UMKM tidak boleh dianggap enteng. Sektor ini terbukti menjadi sumber pendapatan rakyat kecil, bertahan dalam kondisi yang sangat ekstrim dan sangat sulit saat pandemi Covid-19 yang sempat meluluhlantakkan perekonomian nasional dan global," ujarnya, usai mengikuti Rapat Kerja Komisi IV DPD bersama Pemprov Sulawesi Selatan, di Ruang Rapat Pimpinan lantai 2, Kantor Gubernur Sulsel, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (30/1/2023).

Kegiatan yang membahas seputar penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah

(DIM) RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ini, juga dihadiri Pimpinan dan anggota Komite IV DPD, Perwakilan Gubernur Sulsel, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel, serta sejumlah pelaku UMKM.

Pimpinan MPR dari Kelompok DPD Dapil Provinsi Gorontalo ini mengungkapkan, ada beberapa masalah sering dihadapi para pelaku UMKM di daerah-daerah dalam upaya mengembangkan usahanya. Salah satunya, soal persyaratan penjaminan yang sangat



memberatkan pelaku UMKM untuk bisa memperoleh modal di perbankan dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

“Nah, saat rapat kerja tadi saya sampaikan dalam perubahan UU tentang Penjaminan itu ditekankan agar peran pemerintah daerah lebih besar atau lebih ditingkatkan untuk melindungi dan memberi kemudahan kepada pelaku UMKM soal permodalan. Intinya, UU Penjaminan harus bisa mendorong berkembangnya UMKM di

Indonesia yang semakin banyak memerlukan layanan akses permodalan yang mudah dari lembaga keuangan,” terang Fadel Muhammad.

Peran pemerintah daerah, lanjut Fadel Muhammad, memang sangatlah besar untuk UMKM. “Hal itu saya rasakan dan alami serta lakukan sendiri, saat saya menjabat Gubernur Provinsi Gorontalo selama dua periode. Waktu itu, saya anggarkan APBD salah satunya untuk meningkatkan UMKM.

Alhamdulillah, banyak UMKM maju,” tambahnya.

Fadel Muhammad sekali lagi menekankan bahwa UMKM, apalagi di daerah-daerah terpencil harus diperhatikan. “Mudah-mudahan UU Penjaminan ini ke depan akan semakin menumbuhkan kuantitas dan kualitas UMKM di Indonesia dan pada ujungnya akan memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat tanpa kecuali,” pungkasnya. □

Bamsoet Kembali Terima Penghargaan DataGovAI Award 2022

Penghargaan diberikan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) atas kontribusi Bamsoet dalam memajukan dunia big data dan artificial intelligence (AI) di Tanah Air.

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menerima penghargaan DataGovAI Award 2022, kategori Best Data and AI Governance untuk sektor Lembaga Legislatif RI. Penghargaan diberikan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI) atas kontribusi Bamsoet dalam memajukan dunia big data dan artificial intelligence (AI) di Tanah Air.

Bamsoet juga mengapresiasi peran ABDI yang konsisten menyelenggarakan Web Summit sejak tahun 2018. Pada tahun 2023, ABDI akan kembali menyelenggarakan Web Summit dengan tiga event utama. Antara lain, DataSecurAI 2023 yang diselenggarakan pada 7 dan 9 Maret 2023, Satu Data Indonesia 2023 pada 4 dan 6 Juli 2023 dan DataGovAI 2023 pada 7, 9 dan 14 November 2023.

Melalui Web Summit 2023, lanjut Bamsoet, ABDI bisa semakin menyemarakkan dunia big data dan artificial intelligence (AI). Khususnya dalam membangun ekosistem blockchain, sehingga Indonesia juga bisa memiliki platform jual beli NFT berkualitas internasional, tidak lagi bergantung kepada OpenSea atau platform sejenis dari luar negeri.

“Mengingat potensi industri blockchain Tanah Air masih terbilang besar. Menurut laporan Asosiasi Blockchain Indonesia (ABI) dan Indonesia Crypto Network (ICN), per



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Oktober 2022, jumlah investor kripto di Tanah Air mencapai 16,4 juta orang, melampaui investor pasar modal sebesar 9,98 juta orang, dengan transaksi mencapai Rp 279,8 triliun,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus ABDI, di Jakarta, Kamis (2/02/23).

Pengurus ABDI yang hadir antara lain, Chairman Rudi Rusdiah, Wakil Ketua Umum Windi Astono, Wakil Ketua Bidang Program Kasmirus Adrian, Sekretaris II FX. Winarto, serta Jurnalis Komite.id Firly.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan

Keamanan ini menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Peraturan Presiden 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. Menjadi landasan kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antarinstansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

“Presiden Joko Widodo sudah

menekankan bahwa data merupakan “new oil”, sumber kekayaan baru yang sangat berharga, bahkan nilainya bisa lebih berharga daripada minyak. Pemanfaatan big data telah sukses dilakukan oleh berbagai produsen teknologi, seperti Netflix, Facebook, Instagram, Tik Tok. Bahkan juga oleh para produsen fashion dan otomotif, seperti Ralph Lauren, Roll Royce, serta Shell. Mereka secara berkesinambungan selalu

memperbarui data profil konsumennya. Sehingga produsen sudah tahu apa, siapa, dan kapan, serta bagaimana keinginan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Melalui Perpres 39/2019 tersebut, diharapkan bisa mempercepat transformasi kementerian/lembaga serta BUMN dalam memanfaatkan big data untuk meningkatkan kinerja,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, selain memanfaatkan big data, pemerintah bersama seluruh stakeholders terkait juga harus mewaspadai berbagai potensi penyalahgunaan big data melalui artificial intelligence (AI) yang dilakukan berbagai pihak tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan tanpa mempertimbangkan resikonya. Beberapa tahun lalu dunia dikejutkan dengan Kasus Cambridge Analytica yang menambang data 50 juta pengguna Facebook untuk kepentingan kontestasi politik Amerika Serikat.

“Peristiwa tersebut menjadi catatan penting betapa inovasi digital dan data bisa dimanipulasi untuk kepentingan politik sesuai dengan pesanan kelompok tertentu. Untuk memberikan perlindungan data pribadi, Presiden Jokowi telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi pada 17 Oktober 2022. Sehingga bisa mengantisipasi serangan siber dari oknum kejahatan siber yang mengakibatkan kebocoran data pribadi dari beberapa platform yang ada Indonesia,” pungkas Bamsoet. □



Hindari Polarisasi

Syarief Hasan: Kontestan Pilpres Harus Lebih dari Dua Pasang Calon

Pemilihan Presiden 2019 nyaris membuat bangsa Indonesia terpecah. Inilah akibat dari Pilpres yang hanya diikuti dua pasang kontestan. Karenanya, pada Pilpres 2024 pesertanya harus ada tiga kontestan peserta.

WAKIL Ketua MPR RI, Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM., MBA., mengaku prihatin mengamati suasana kurang baik yang menyertai perkembangan dunia politik jelang Pemilihan Presiden 2024. Beberapa pihak melakukan kampanye hitam, untuk menyerang lawan politiknya. Tak jarang, mereka juga melakukan politik pecah belah, mencaci maki, hingga menyebar fitnah.

Kasus terakhir terkait pengiriman satu karung ular kobra ke rumah mantan

Gubernur Banten Wahidin Halim di Jalan H. Djiran, Pinang, Kota Tangerang, Rabu dini hari (25/1/2023). Kasus itu patut diduga karena ada unsur politik di belakangnya. Apalagi, pada hari yang sama, Wahidin bersiap menyambut kedatangan bakal calon presiden Anies Baswedan.

Menanggapi peristiwa itu, Sjarifuddin Hasan atau biasa disapa Syarief Hasan mengatakan, ketegangan yang terjadi sekarang ini adalah sisa-sisa perpecahan yang diakibatkan oleh pelaksanaan pemilu

sebelumnya, khususnya pada 2019. Saat itu, pemilu hanya menghadirkan dua kontestan calon presiden dan wakil presiden, sehingga polarisasinya sangat besar. Teman berantem, rumah tangga bubar, saudara tidak saling tegur, hingga tetangga marahan karena mereka memiliki pilihan politik yang berbeda.

“Situasi seperti itu tidak boleh terjadi lagi, cukup pada Pemilu 2019 saja. Untuk menghindari berulangnya ketegangan akibat pemilu kita harus memiliki calon presiden lebih



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

dari dua orang, minimal tiga kandidat. Agar tidak terjadi polarisasi yang sangat besar seperti pemilu sebelumnya. Dan, kalau masih tetap dua pasang saja, kita khawatirkan eksekutif negatiffnya akan semakin besar,” kata Syarif Hasan, disela

kunjungannya ke Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Ahad (29/1/2023).

Untuk mengurangi potensi munculnya akibat negatif pelaksanaan pemilu, menurut Menteri Koperasi dan UMKM di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, KPU

dan pihak terkait harus melakukan sosialisasi bahwa pemilu merupakan upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, setiap lima tahun sekali. Karena tidak semestinya pemilu dilakukan dengan memecah belah masyarakat, menghina, mencaci maki atau bahkan menfitnah lawan politik.

Rakyat, kata Syarif Hasan, harus siap menerima apapun hasil dari perwujudan kedaulatan rakyat itu. Apapun hasilnya, menang atau kalah harus dihormati, karena itu merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan, setelah pemilu, semua harus kembali seperti sediakala. Tidak boleh ada perbedaan, apalagi hingga terjadi pertikaian serta perpecahan.

“Yang menang biarkan mereka bekerja dengan baik, memenuhi janji-janji politik yang disampaikan saat pemilu. Yang kalah, silakan menerima kekalahannya, mengevaluasi dan menyiapkan diri untuk mengikuti kontestasi berikutnya, jika masih punya keinginan memimpin bangsa,” pungkasnya. □

MBO

Sudah Saatnya MPR Diatur dengan Undang-undang Tersendiri

Rapat Pimpinan MPR telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang MPR.

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Sjarifuddin Hasan mengungkapkan, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah saatnya diatur dengan satu undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang tentang MPR.

Dengan undang-undang ini maka kewenangan, tugas pokok dan fungsi MPR sebagai sebuah lembaga negara dan lembaga politik yang merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia memiliki payung hukum yang kuat.

“Saya pikir MPR memang perlu memiliki undang-undang tersendiri atau UU khusus tentang MPR. Karena itu kita sedang mengupayakan penyusunan Rancangan

Undang-undang tentang MPR,” kata Sjarifuddin Hasan di sela-sela kegiatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (2/2).

Sebelumnya, Rapat Pimpinan MPR pada Jumat (20/1/23) telah memutuskan untuk dimulainya proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang MPR. Dengan demikian, keberadaan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi MPR RI bisa diatur dengan undang-undang tersendiri.

Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, menjelaskan, dengan Rancangan UU tentang MPR ini maka MPR akan diatur dengan UU tersendiri dan tidak lagi masuk atau diatur dalam UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) seperti saat ini. Sebab, UU MD3 belum mengatur banyak hal tentang

MPR, seperti alat-alat kelengkapan di MPR.

“Misalnya, kita ingin membentuk Badan Kehormatan MPR, atau lainnya memerlukan payung hukum. UU tentang MPR ini nanti bisa menjadi payung hukum. Karena itu, saya pikir RUU tentang MPR ini gagasan yang bagus,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat ini.

Syarief Hasan mengakui bahwa kewenangan, tugas, dan fungsi MPR memang telah diatur dalam UU MD3 (UU Nomor 17 tahun 2014, yang telah beberapa kali direvisi, terakhir UU Nomor 13 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 17 tahun 2014). Namun, hanya beberapa pasal saja yang mengatur tentang MPR.

Sebaliknya, UU MD3 mengatur secara



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

lengkap tentang DPR dan DPD. Selama ini, UU MD3 tidak mengatur lebih rinci dan eksplisit tentang alat-alat kelengkapan MPR.

“Dengan adanya RUU tentang MPR ini maka MPR diatur secara khusus dalam UU, sehingga menjadi UU *lex specialis*. UU tentang MPR ini akan mengatur kewenangan, tugas, dan fungsi MPR serta alat-alat kelengkapan MPR, Badan Kehormatan MPR, dan lainnya. Jadi,

memang UU ini nanti banyak mengatur tentang MPR yang selama ini belum masuk dalam UU MD3,” jelasnya.

Dalam proses penyusunan RUU tentang MPR, lanjut Syarif Hasan, tetap mengacu pada UU MD3. Tetapi, RUU tentang MPR nanti akan mengatur dan mempertegas apa yang belum diatur dalam UU MD3.

“Kita ingin satu UU sebagai payung hukum

yang khusus mengatur tentang MPR, tetapi tidak keluar dari apa yang sudah diatur dalam UU MD3,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Menurut Syarif Hasan, dalam proses pembuatan UU dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu: pertama, diusulkan oleh DPR sebagai hak inisiatif dan, kedua, diusulkan oleh pemerintah. Dalam proses ini, MPR sedang memulai dengan melakukan kajian-kajian untuk penyusunan naskah akademik untuk penyusunan RUU tentang MPR.

“Jadi kita yang memasukkan usulan RUU tentang MPR,” sebutnya.

Proses penyusunan RUU tentang MPR sampai diusulkan ke DPR, hingga dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional, masih membutuhkan waktu yang cukup lama.

Syarief Hasan berharap, proses penyusunan RUU tentang MPR hingga dibahas di DPR bisa berjalan dalam waktu yang tidak terlalu lama.

“Karena (RUU tentang MPR) ini menyangkut kepentingan bersama, saya berharap, tidak membutuhkan waktu lama. Sehingga sudah bisa berlaku pada MPR periode mendatang,” pungkasnya. □

Hadiri Rakernas PBB

Bamsoet Dukung Pernyataan Yusril sebagai Bentuk Antisipasi Keadaan Darurat

Dalam Rakornas Partai Bulan Bintang (PBB), Rabu (11/1/23), Ketua Umum PBB, Prof. Yusril Ihza Mahendra, antara lain berbicara tentang tatacara pengisian jabatan publik disebabkan penundaan Pemilu, dan menyoroti mengenai Utusan Golongan.

KETUA DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tidak adanya ketentuan hukum tentang tatacara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu, menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amandemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Presiden Joko Widodo menghadiri Rapat

Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Musyawarah Dewan Partai (MDP) Partai Bulan Bintang (PBB) Tahun 2023. Dirinya mendukung pernyataan Ketua Umum PBB Prof. Yusril Ihza Mahendra terkait perlunya bangsa Indonesia memikirkan tentang tata cara pengisian jabatan publik yang pengisian jabatannya dilakukan melalui Pemilu, seperti Presiden dan Wakil Presiden, Anggota MPR RI, DPR RI, DPD RI, hingga DPRD Kabupaten/Kota, apabila di suatu saat terjadi penundaan Pemilu yang disebabkan berbagai hal kedaruratan lainnya. Misalnya disebabkan

gempa bumi megathrust di selatan Pulau Jawa, kerusuhan massal, maupun karena pandemi global yang terulang kembali.

“Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya dalam Pasal 431 telah mengatur tentang penundaan Pemilu, yakni disebabkan karena terjadinya kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian dan atau seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu tidak dapat dilaksanakan. Namun, tidak ada ketentuan dalam konstitusi maupun dalam



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

perundangan manapun tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena penundaan Pemilu,” ujar Bamsuet usai menghadiri Rakornas dan MDP PBB Tahun 2023, di Jakarta, Rabu (11/1/23).

Rakornas itu juga dihadiri, antara lain Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni, dan Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Serta hadir pula Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, tidak adanya ketentuan hukum tentang tata cara pengisian jabatan publik yang disebabkan karena

penundaan Pemilu menjadi salah satu yang terlewatkan pada saat melakukan amandemen konstitusi yang dimulai pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Padahal, bisa saja suatu saat nanti bangsa Indonesia menghadapi kondisi force majeure yang luar biasa sehingga menyebabkan Pemilu tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan.

“MPR RI saat ini berbeda dengan MPR RI sebelum amandemen konstitusi. Di UUD 1945 yang lalu, MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara, bisa mengeluarkan sejumlah TAP MPR guna mengatasi krisis konstitusi. Bahkan pada saat melantik Presiden dan Wakil Presiden saja, MPR RI tidak mengeluarkan TAP MPR tentang pelantikan, melainkan hanya mengeluarkan Berita Acara Pelantikan. Hal ini jugalah yang perlu dibahas

dan didalami lebih lanjut, tentang penataan kewenangan kelembagaan sekaligus penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara,” jelas Bamsuet.

Wakil Ketua Umum FKPPi sekaligus Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia, ini menerangkan, Prof. Yusril juga menyoroti tentang komposisi keanggotaan MPR RI yang saat ini hanya terdiri dari anggota DPR RI dan anggota DPD RI. Tidak ada lagi Utusan Golongan yang bisa merepresentasikan kelompok masyarakat, seperti Suku Dani dan Suku Dayak. Akibatnya, tidak ada lembaga yang merepresentasikan seluruh kepentingan bangsa Indonesia.

Bamsuet menjelaskan, MPR RI juga telah menerima aspirasi serupa tentang pentingnya Utusan Golongan dalam komposisi keanggotaan MPR RI. Sebagaimana disuarakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PP Muhammadiyah), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Majelis Tinggi Agama Konghucu (MATAKIN), serta Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi). “Menanggapi hal ini, MPR RI akan mengajak para pakar hukum tata negara serta para tokoh bangsa untuk berdiskusi lebih dalam tentang urgensi menghadirkan kembali Utusan Golongan, sehingga bisa merepresentasikan seluruh aspirasi dan kepentingan rakyat secara komprehensif,” pungkas Bamsuet. □



Kunjungan Delegasi Pemerintahan Otonom Bangsa Moro

Setelah Diberi Izin Membentuk Pemerintahan Otonom

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid, berharap, wilayah otonom Bangsa Moro harus menjadi bagian yang menguatkan hubungan antara Filipina dengan Negara-Negara ASEAN.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KEPUTUSAN Pemerintah Filipina memberikan pemerintahan otonom kepada bangsa Moro harus disikapi secara bijak oleh internal Bangsa Moro sendiri dengan menjadikan keberadaan Bangsa Moro menjadi bagian yang menguatkan hubungan antara Filipina dengan negara-negara ASEAN.

Bangsa Moro juga harus bersatu padu menjalin sinergitas untuk kemudian bisa memberikan kontribusi yang sangat baik bagi keamanan nasional, kemajuan ekonomi nasional, kemajuan kualitas pendidikan nasional, termasuk perpolitikan nasional. Itu menjadi sangat penting, agar Filipina yakin bahwa keputusannya benar memberikan pemerintahan otonom kepada Bangsa Moro.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA/ HNW, dalam penjelasannya usai menerima kunjungan persahabatan dan berbincang dengan Penasihat Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsa Moro/ Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM) Abdulhadie Ibn As-Shaheed Butuan Gumander di Ruang Kerja, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen,

Senayan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Kunjungan persahabatan Abdulhadie tersebut, jelas HNW, selain untuk menyampaikan perkembangan di Filipina di mana umat Islam telah mendapatkan pemerintahan yang bersifat otonom di Mindanao, Abdulhadie juga berharap akan mendapatkan masukan dari Indonesia tentang bagaimana pengelolaan dan masa depan yang lebih baik untuk Bangsa Moro.

“Saya sampaikan kepada beliau bahwa yang paling penting adalah kita sebagai bangsa, sebagai warga bangsa, harus mencari dan menemukan yang paling baik, paling maslahat untuk bangsa secara keseluruhan. Satu yang saya tekankan, jangan menambah potensi perpecahan, potensi konflik, potensi masalah, potensi pecah belah di antara warga bangsa. Terwujudnya pemerintahan otonom ini adalah kesempatan yang sangat bagus, di mana Bangsa Moro diberi kepercayaan dan mereka mesti membuktikan bahwa keputusan pemerintah pusat itu tidak salah,” terang HNW.

Perlu atau tidaknya membentuk partai politik, lanjut HNW, juga dipertanyakan

Abdulhadie. HNW menjelaskan, yang paling baik bukan menambah parpol tetapi bagaimana menguatkan parpol yang sudah ada, untuk kemudian betul-betul bisa menghadirkan perpaduan yang harmonis, bisa menghadirkan politik yang berkualitas dan pada akhirnya bisa memajukan bangsa dan negara.

“Seperti di Indonesia, kita tidak bisa mencegah orang membuat parpol, sebab kita negara demokrasi. Tapi, pada ujung akhirnya parpol pasti akan diuji oleh sejarah, dipilih oleh rakyat. Ketimbang kita berspekulasi membuat baru, ya lebih bagus kuatkan saja yang ada. Sehingga tidak akan menambah faktor konflik dan masalah, apalagi seperti di Filipina di mana bangsa Moro baru saja diberikan izin membentuk pemerintahan yang bersifat otonom,” papar HNW.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari FPKS ini juga menyampaikan, mewakili Bangsa Moro, Abdulhadie memberikan apresiasi kepada Indonesia yang memiliki peran yang sangat besar dan menonjol terkait dengan usaha perdamaian di Filipina Selatan.

“Karena itulah, saya tadi sampaikan salah satu yang berperan besar adalah Muhammadiyah dan karenanya saya hubungkan beliau dengan Dr Junaidi, Ketua PP Muhammadiyah hubungan Luar Negeri. Sebab, Muhammadiyah adalah organisasi besar Islam yang dipercaya oleh negara Indonesia sejak lama, untuk membantu menghadirkan perdamaian dan dialog perdamaian di Filipina Selatan,” tandas HNW.

Di sesi penutup, Abdulhadie dan delegasi mengucapkan terima kasih atas sambutan dan penerimaan serta masukan dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. “Beliau juga akan mengundang saya berkunjung ke Filipina Selatan, bertemu langsung dengan Kepala Menteri Pemerintahan Otonom Bangsamoro, untuk memberikan masukan-masukan langsung. Saya katakan, secara prinsip tentu kita sebagai sesama bangsa ASEAN dan apalagi sebagai orang Indonesia tetanggannya Bangsa Moro, bila memang itu diperlukan,” pungkas HNW. □

Masa Jabatan Presiden

Syarief Hasan: MPR Akan Kawal Putusan MK Tentang Masa Jabatan Presiden

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan menegaskan, pada dasarnya setiap warga negara harus mengikuti konstitusi dan menghargai konstitusi. “Itu sudah menjadi kewajiban warga negara,” katanya.



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Sjarifuddin Hasan mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan masa jabatan presiden dua periode, tidak bisa menjadi calon wakil presiden. MPR, katanya, akan mengawal putusan MK yang menegaskan tentang masa jabatan presiden dua periode dan tidak bisa maju lagi menjadi calon wakil presiden.

“Sebenarnya (Pasal 7) UUD NRI tahun 1945 sudah mengatur tentang masa jabatan presiden bahwa masa jabatan presiden lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan,” kata Syarief Hasan, sapaan Sjarifuddin Hasan, di sela-sela kegiatan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (4/2/2023).

Sebelumnya, MK mengeluarkan putusan atas permohonan yang diajukan Partai Berkarya Muchdi Pr yang berharap, MK membolehkan presiden dua periode dapat maju menjadi calon wakil presiden. Partai Berkarya menguji Pasal 169 huruf n dan

Pasal 227 huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Partai Berkarya juga memandang Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 secara jelas tidak membatasi hak bagi presiden dan wakil presiden terpilih untuk mencalonkan lagi untuk masa jabatan selanjutnya.

Merespon permohonan itu, MK memutuskan, menolak untuk seluruhnya. Alasannya, pasal 169 huruf n dan pasal 227 huruf i UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu selaras (tidak bertentangan) dengan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945. “Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Anwar Usman dalam sidang pada Selasa, 31 Januari 2023. Dengan putusan ini, MK meneguhkan Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 tentang Masa Jabatan Presiden Dua Periode.

Menurut Syarief Hasan, MK telah menegaskan konstitusi dengan mengeluarkan amar putusan terhadap permohonan Partai Berkarya yang menginginkan presiden dua periode boleh

maju menjadi calon wakil presiden. “Memang sudah seharusnya konstitusi ditegakkan,” ujar anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini.

Dengan putusan MK ini, lanjut Syarief Hasan, masa jabatan presiden hanya sampai lima tahun atau hanya sampai 2024. “MPR akan mengawal putusan MK ini. Kita harus menegakkan konstitusi,” tuturnya. Perubahan masa jabatan Presiden hanya bisa dilakukan melalui amendemen UUD, sedangkan lembaga yang bisa melakukan amendemen (mengubah) dan menetapkan UUD hanya MPR. Dalam beberapa kesempatan, Pimpinan MPR menegaskan, tidak ada rencana amendemen UUD pada periode ini.

Syarief Hasan mengingatkan bahwa putusan MK adalah final dan mengikat. Karena itu, semua pihak diharapkan untuk mengikuti dan mematuhi putusan MK tersebut. “Pada dasarnya setiap warga negara harus mengikuti konstitusi dan menghargai konstitusi. Itu sudah menjadi kewajiban warga negara,” tegasnya.

Bila ada pihak-pihak yang masih mewacanakan presiden dua periode bisa maju kembali sebagai calon wakil presiden atau wacana masa jabatan presiden tiga periode hendaknya menghentikan wacana tersebut. “Memang wacana itu hak setiap negara, namun sebenarnya pintu untuk melanjutkan wacana tersebut sudah tertutup dengan putusan MK ini,” tambahnya.

Selain soal wacana masa jabatan presiden tiga periode, Syarief Hasan juga mengimbau pihak-pihak yang mewacanakan penundaan pelaksanaan Pemilu 2024 untuk menghentikan wacana itu, karena tidak sesuai dengan konstitusi. “Dalam UUD secara eksplisit ditegaskan bahwa Pemilu diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Ini harus dilaksanakan secara konsekuen. Kalau tidak dilaksanakan justru melanggar konstitusi,” pungkasnya. □

Dialog Kebangsaan Ikadi di Lombok

HNW
Para Juru **Dakwah** Harus Lanjutkan
Peran Ulama Pejuang



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA prihatin dengan masih adanya sikap dan penilaian yang keliru terkait peran para ulama terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disatu pihak, sering sekali masyarakat meneriakkan yel-yel NKRI harga mati. Tetapi, dipihak lain, mereka mencaci dan menzalimi, bahkan tidak menghargai umat Islam, khususnya jasa para ulama dan dai. Padahal NKRI yang sering digembar-gemborkan harga mati itu adalah buah dari perjuangan ulama pejuang juga.

NKRI yang menjadi cita-cita Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sesungguhnya sudah dimatikan oleh kolonialis Belanda dengan dilahirkannya Republik Indonesia Serikat, hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar pada 27 Desember 1949. Sejak saat itu, Republik Indonesia hanya menjadi salah satu di antara 16 negara bagian. RIS dipimpin oleh presiden Soekarno dan Perdana Menteri Moh. Hatta. Undang-undang dasarnya tak lagi UUD 45, melainkan menggunakan UUD RIS, parlemennya adalah DPR RIS.

"Pidato Moh. Natsir, Ketua Fraksi Partai Masyumi, di hadapan DPR RIS pada 3 April 1950 yang dikenal dengan istilah Mosi Integral, itulah tonggak mengembalikan Indonesia kembali menjadi NKRI. Dan, alhamdulillah pidato itu diterima oleh DPR RIS, dan kemudian disetujui oleh Presiden dan PM RIS; Soekarno dan Moh. Hatta. Sejak itu, NKRI

terlahir lagi dan diproklamirkan secara resmi pada upacara bendera 17 Agustus 1950. Upacara tersebut menandai kembalinya NKRI, dan itu berkat perjuangan Natsir, politisi muslim, ulama pejuang dan juru dakwah yang kondang," kata Hidayat Nur Wahid.

Pernyataan itu dikemukakan Hidayat Nur Wahid atau HNW saat menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada para pendakwah yang tergabung dalam Ikatan Da'i Indonesia (Ikadi). Acara tersebut berlangsung di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (21/1/2023). Selain HNW, ada satu pembicara lain yang ikut menyampaikan materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI (Dialog Kebangsaan) dengan tema Peran dan Kontribusi Da'i Dalam Kemajuan Bangsa. Dia adalah Guru Besar UIN Jakarta yang juga Ketua Dewan Syuro Ikadi, Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail.

Salah satu cita-cita kemerdekaan Indonesia, seperti yang tercantum pada alinea pertama Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, kata HNW, adalah menghapuskan penjajahan di atas dunia, termasuk membela perjuangan Palestina. Sikap itu ternyata sudah menjadi jati diri para tokoh bangsa dan umat Islam, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Itu dibuktikan oleh KH. Hasyim Asy'ari yang mengumpulkan para ulama dan menfatwakan keharusan membela bangsa Palestina melawan penjajahan Israel pada 1938.

"Para ulama bukan hanya mengimbau dan mendoakan. Tetapi KH.



Abdul Wahab Hasbullah, ulama, pengusaha dan jagoan silat, menfatwakan pentingnya mendukung Palestina dengan menyumbang dana. Tidak aneh jika kemudian pada 1944, sebelum proklamasi, Muhamad Amin Al-Husaini, Mufti Palestina, dalam perjuangan di Jerman mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan kemerdekaan ini tentu tak lepas dari dukungan Indonesia kepada Palestina sejak 1938,” kata HNW.

Mengaburkan Sejarah

Momentum perjuangan ulama membela bangsa dan negara, menurut HNW, harus terus diingat dan disebarluaskan. Termasuk oleh para da'i dan ulama, dan karenanya para juru dakwah dan ulama penting mendapat informasi yang utuh dan benar soal ini. Apalagi, saat ini muncul indikasi mengaburkan sejarah perjuangan para ulama, dengan mengatakan bahwa Palestina

bukan urusan Indonesia, tetapi persoalan Dunia Arab. Padahal PBB saja mengakui bahwa soal kemerdekaan Palestina bukan hanya masalah orang Arab.

“Mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka dengan kiprah para ulama dalam perjuangan membela tanah air adalah relasi yang tidak terbantahkan. Catatan ini harus dijaga, dan disosialisasikan juga agar bangsa Indonesia senantiasa mengingat perjalanan sejarahnya. Apalagi, terbukti ada upaya untuk mengaburkan sejarah bangsa Indonesia oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata HNW lagi.

Dalam konteks dukungan bangsa Indonesia terhadap Palestina, menurut Anggota DPR RI Dapil Jakarta II meliputi luar negeri, Jakarta Pusat dan Selatan, sudah dilakukan sejak Presiden pertama dan dilanjutkan oleh presiden selanjutnya, termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Semuanya memberikan dukungan, pembelaan dan

bantuan terhadap Palestina.

Pernyataan yang lain disampaikan Guru Besar UIN Jakrta, Prof. Dr. Ahmad Satori Ismail. Menurutnya, peran dan kontribusi ulama membangun bangsa sudah jelas. Terlebih jika memerhatikan peran yang dimiliki ulama sebagai pendidik bangsa. Yaitu, mempersiapkan pribadi muslim yang soleh dan soleha. Para da'i juga berkewajiban memelihara, mengembangkan, mengarahkan, dan memberdayakan potensi yang ada untuk memperoleh ridho Allah SWT.

“Tugas da'i sebagai mobilisator dan organisator tidaklah mudah. Seorang da'i harus mampu meningkatkan ketaqwaan dengan cara menyampaikan ajaran Islam yang indah dan lembut. Memunculkan dan mengembangkan kesadaran Islam, bahwa setiap orang memiliki tanggung jawab, untuk menjadi muslim dan muslimah yang kaffah,” kata Ahmad Satori Ismail lagi. □

MLS Belajar Kepemimpinan di MPR

HNW: Pemimpin Harus Mencintai Bangsa dan Negaranya



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEBANYAK 75 siswa dari Mardani Leadership School (MLS) pada Selasa 24 Januari 2023 memenuhi Ruang GBHN, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta. Kedatangan para pelajar generasi muda yang didampingi oleh Ketua Yayasan MLS Dr. Mardani Ali Sera, Kepala Sekolah MLS Luthfi Alfian Kamil, serta beberapa guru ke kompleks Parlemen untuk melakukan study tour tentang kepemimpinan.

Kehadiran mereka diterima langsung oleh Wakil Ketua MPR Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid MA (HNW). "Selamat datang di Kompleks MPR/DPR/DPD. Tempat para pimpinan dan wakil rakyat melaksanakan amanat kepemimpinannya," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu. Dia menerangkan, para siswa dan guru sedang

berada di Ruang GBHN.

Meski GBHN sekarang sudah tidak ada lagi, namun menurut pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu ruangan yang ada masih digunakan untuk rapat-rapat gabungan Pimpinan MPR dengan fraksi dan kelompok utusan daerah di MPR dan alat kelengkapan lainnya. "Serta untuk menerima delegasi dari luar MPR, seperti MLS ini," paparnya.

HNW mengatakan, mungkin di antara siswa dan guru ada yang kali pertama datang ke kompleks parlemen. Ia mengapresiasi para siswa yang bersemangat untuk belajar tentang leadership atau kepemimpinan di gedung parlemen. "Sungguh bagus belajar di luar sekolah. Memang demikianlah seharusnya, generasi muda apalagi yang ingin melanjutkan

kepemimpinan bangsa, harus kerap belajar di luar sekolah, untuk mengkaji dan mengambil pelajaran dinamika kehidupan riil, yang tidak didapat di sekolah", ucapnya. "Dengan demikian maka belajar di sekolah tidak menjadi menara gading, yang membuat peserta didik yang calon pemimpin malah tidak nyambung dengan yang akan dipimpinnya kelak," tambahnya.

Pergi ke suatu tempat, luar sekolah, menurut HNW, akan membuat kita mengetahui lingkungan yang lain. Mengetahui lingkungan yang lain merupakan sarana belajar menjadi pemimpin yang efektif dan benar. "Sehingga lulusan MLS akhlakunya makin teruji, skill kewirausahaannya terasah, dan logika literasinya akan semakin kuat", paparnya.

Dengan mengenal lingkungan luar maka



akan membuat siswa terbiasa bertemu dengan beragam sosok orang dan masyarakat. Di Indonesia, pemimpin menurut Wakil Ketua Badan Wakaf Pondok Gontor itu, akan memimpin bukan hanya satu jenis atau golongan saja namun beragam kelompok masyarakat. “Sebagai pemimpin nanti kalian akan memimpin masyarakat bukan memimpin bebek atau kambing”, tegasnya. “Memimpin bebek dan kambing perilakunya sejenis, lebih mudah, sebab dua hewan tersebut tinggal ikut perintah saja”, tambahnya.

Dijelaskan, dalam Islam banyak teori tentang kepemimpinan. Pemimpin itu seperti imam dalam salat. Sebagai imam, ia harus efektif dan tahu kondisinya para yang dipimpinya, yaitu makmum. Makmum itu beragam ada yang tua, muda, laki-laki dan

perempuan, serta mempunyai banyak kepentingan. “Maka kalau jadi imam harus memerhatikan kondisi makmum”, tegasnya. “Jangan semau gue”, tambahnya. Dijelaskan oleh pria yang pernah tinggal selama 13 tahun di Arab Saudi itu bahwa Rasulullah pernah menegur seorang imam yang bacaan salatnya berkepanjangan sehingga meresahkan salahsatu makmum.

Agar menjadi imam yang bagus, menurut HNW, maka penting sang imam sudah terbiasa menjadi makmum. Bila seseorang sudah terbiasa menjadi makmum maka ia akan mempunyai sifat empati dan simpatik. “Mengerti apa yang harus diperbuat dan diputuskan,” paparnya. “Ia akan menjadi imam (pemimpin) yang bijak dan benar,” tambahnya. Dan, Rasulullah SAW yang



sangat mencintai negeri di mana beliau berada (Mekah atau Madinah), adalah teladan yang tetap relevan sebagai Pemimpin yang sukses di dunia dan akhirat.

Disimpulkan untuk menjadi pemimpin yang bagus ia harus juga meneladani Rasulullah SAW, dan mempunyai spirit terbiasa dipimpin supaya saat memimpin, memimpinya penuh dengan kebijakan untuk kemaslahatan, sebagaimana diteladankan oleh Rasulullah SAW. “Pemimpin bukan hanya memimpin dirinya, tetapi terkait juga dengan orang yang dipimpin”, tuturnya.

Diingatkan kepada mereka bahwa pemimpin itu juga harus membumi, mencintai bangsa dan negara, serta tempat di mana bumi dipijak langit dijunjung. “Pemimpin adalah pihak yang memikirkan kemaslahatan nasib bangsa dan negaranya,” ucapnya. Dia mencontohkan, pada tahun 1920-an para pemuda terpelajar Indonesia sudah memikirkan kemerdekaan. Kemerdekaan pada masa itu menghadirkan Indonesia merdeka merupakan mimpi, namun para pemuda terpelajar baik yang ada di Belanda, Timur Tengah, maupun Batavia (Jakarta) mengelola mimpi itu dengan berorganisasi. “Mulai dari Perhimpunan Indonesia, hingga Sumpah Pemuda Tahun 1928”, ungkapnya.

Dalam Sumpah Pemuda dinyatakan tekad bertanah air, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Di antara organisasi para pemuda yang ber-Kongres II Pemuda itu adalah salah satu kelompok yang berlatar belakang agama Islam, “Mereka adalah Jong Islamieten Bond”, ujarnya. Jadi, menurut HNW, Indonesia Merdeka hadir, dipersiapkan oleh generasi muda, calon pemimpin Bangsa, yang di dalamnya ada keterlibatan pemuda muslim bersama-sama para pemuda dari berbagai latar belakang lainnya. Lalu, 20 tahunan berikutnya para pemuda terpelajar ini memimpin persiapan Indonesia Merdeka dan mempertahankan agar Indonesia tetap merdeka, dan kita semua sekarang ini merasakan berkah dari hasil perjuangan para pemimpin muda itu.

“Maka sudah seharusnya bila kurikulum maupun kegiatan yang dikembangkan untuk para calon pemimpin juga yang membuat mereka bangga dengan sejarah dan kiprah para pemuda Pemimpin Bangsa,” tutupnya. □

Bertemu Rektor Unhas

Fadel Muhammad Diskusi Soal PPHN dan IKN



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. Ir. Fadel Muhammad berkesempatan melakukan kunjungan silaturahmi dan diskusi dengan Rektor Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., dan civitas akademika Unhas.

Pertemuan yang digelar di Ruang Rektorat Unhas, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (30/1/2023), membahas dua wacana penting yang menjadi isu nasional terhangat, yakni: Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur, serta dampak positifnya buat perekonomian Kawasan Timur Indonesia (KTI).

“Saya bersilaturahmi dengan Pak Rektor bertujuan untuk berdiskusi terkait PPHN yang sudah menjadi agenda MPR yang saat ini masih berjalan. Kami meminta masukan terkait hal itu, dan alhamdulillah Rektor sangat mendukung demi kebaikan bangsa dan negara,” ujar Fadel Muhammad, dalam keterangan persnya kepada wartawan, usai acara.

Fadel Muhammad mengungkapkan, Rektor menyebut bahwa PPHN adalah sesuatu yang sangat penting, dan pihak Unhas akan membantu dengan melakukan pengkajian secara mendalam, signifikan serta komprehensif soal PPHN. “Kami menunggu kajian dan masukan tersebut agar PPHN semakin matang dan hasilnya akan sesuai

dengan harapan MPR dan bangsa Indonesia,” tambahnya.

Soal diskusi seputar IKN dan dampaknya buat perkembangan perekonomian KTI, Fadel Muhammad yang juga sebagai penggagas dan Ketua Umum Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia (BP2KTI) ini mengungkapkan bahwa dirinya dan Rektor sangat mendukung pembangunan IKN yang digagas dan menjadi program besar negara oleh Presiden Joko Widodo.

“IKN diharapkan menjadi magnet pertumbuhan ekonomi baru, sehingga tidak terpusat di Pulau Jawa semata. Itulah mengapa berbagai elemen masyarakat di Kawasan Timur Indonesia (KTI), termasuk BP2KTI mendukung IKN, karena akan berimbas baik buat KTI,” kata Pimpinan MPR dari Kelompok DPD RI ini.

Kebetulan, lanjut Fadel Muhammad, BP2KTI menjalin bekerjasama dengan akademisi Unhas untuk melakukan studi dan kajian-kajian akademis terkait IKN. “Nanti kami akan menghadap Presiden RI untuk memberikan hasil kajian sebagai bentuk dukungan kami kepada program IKN,” imbuh Gubernur Gorontalo dua periode ini.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Unhas Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., memberikan apresiasi kepada Fadel Muhammad dan BP2KTI, yang telah memberikan kepercayaan kepada Unhas sebagai mitra strategis dalam mendiskusikan urgensi IKN terhadap akselerasi pembangunan Kawasan Timur Indonesia dan sekaligus membantu pemerintah, yang selalu berkeinginan mengurangi gap pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Indonesia.

“Ini momentum terbaik. Insya Allah Unhas dengan segenap kemampuan dan potensinya serta mitra-mitranya yang juga cukup banyak dari Timur Indonesia, akan terus mem-back up upaya-upaya strategis ini. Saya harap BP2KTI menjadi salah satu lembaga yang mampu mendinamisasi, mengakselerasi dan menjadi katalis dalam percepatan perubahan KTI,” tandasnya. □



Dialog Bersama PP Pemuda Hidayatullah

HNW Ajak Generasi Muda Kembangkan Potensi dan Keahlian



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, MA, Kamis (02/2/2023) menerima kunjungan delegasi Panitia Pelaksana Munas VIII Pemuda Hidayatullah, di Ruang Kerjanya, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Kunjungan yang dipimpin Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Organisasi DPP Hidayatullah, Asih Subagyo, serta dihadiri Ketua Umum Imam Nawawi dan empat orang PP Pemuda Hidayatullah ini, selain bersilaturahmi dan berdialog, juga menyampaikan undangan resmi kepada

Wakil Ketua MPR, HNW, untuk hadir dan menjadi salah satu pembicara dalam kegiatan Munas Ke-VIII Pemuda Hidayatullah, pada tanggal 17-19 Februari 2023.

Kepada delegasi, Pimpinan MPR dari PKS ini menyampaikan terima kasihnya dan mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan oleh PP Pemuda Hidayatullah. "Saya memaknai kegiatan Munas yang dilaksanakan menandakan bahwa organisasi kepemudaan ini berjalan dengan program-program yang baik. Maka wajar bila eksistensi organisasi PP Pemuda Hidayatullah sudah menyebar di berbagai provinsi dan kabupaten, malah sudah berdiri pula di provinsi-provinsi baru di Papua," ujarnya.

Ditambahkan HNW, berjalan baiknya organisasi kemasyarakatan di Indonesia, seperti Pemuda Hidayatullah, merupakan bukti bahwa di negara demokrasi, umat Islam atau warga lainnya bisa mengembangkan potensi dan keahliannya, ilmunya dan semua potensi dirinya, untuk ikut berperan dalam meningkatkan kualitas kehidupan berkeumatan, berbangsa dan bernegara.

"Kondisi ini tidak didapatkan di negara-negara yang tidak demokratis. Ini penting disadari dan dijadikan sarana oleh umat apalagi pemuda Islam, untuk merealisasikan berbagai masalah untuk umat sebagaimana dicontohkan oleh para Kiyai dan Ulama Founding Fathers Indonesia," kata anggota Komisi VIII DPR FPKS ini.

Organisasi, lanjut HNW, memang sangat penting untuk dimaksimalkan perannya agar masalah bisa diwujudkan dan mafsadat bisa dikoreksi. "Namun, harus diingat, dalam menjalankan organisasi harus menerapkan prinsip mulia dalam Islam, selain akhlak dan amanah (profesionalitas) juga Ta'awun atau kemampuan membuka diri untuk berkolaborasi. Sebab, organisasi tidak mungkin berjalan sendiri. Dia harus berkolaborasi dengan sekitarnya. Lagi pula, dalam Islam kita tidak hanya diajarkan hanya

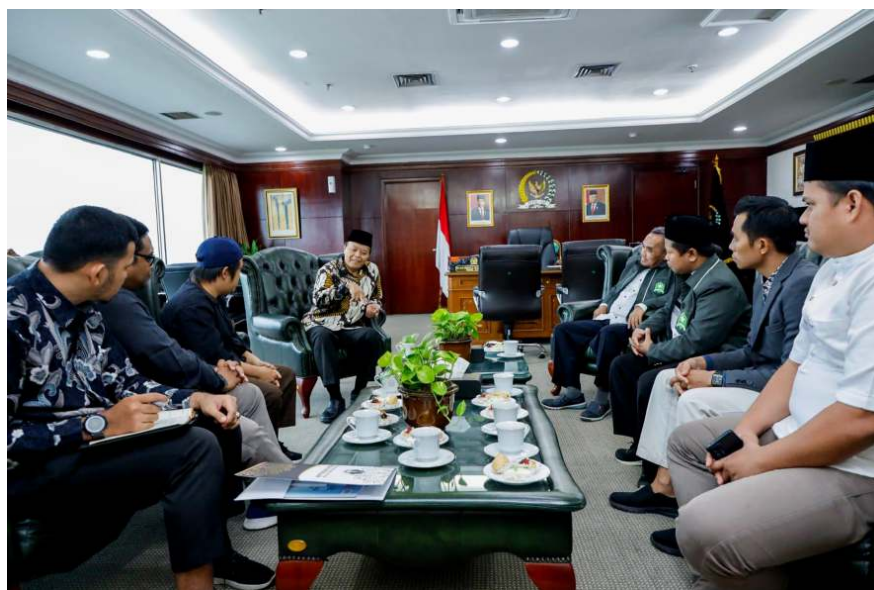




FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

peluang yang ada, kembali ke Gorontalo berikan sumbangsih kalian di sana,” harap Fadel Muhammad.

Diutarakan Fadel Muhammad, berkontribusi untuk Gorontalo harus menjadi semangat seluruh masyarakat, baik tua atau muda. Sebagai warga Gorontalo, Fadel mengaku, sampai saat ini masih berupaya sekuat tenaga memberikan sumbangsih kepada daerah. Contohnya, Fadel Muhammad saat ini aktif berkiprah di Paguyuban Lamahu (organisasi yang menghimpun masyarakat Gorontalo diperantauan) sebagai Ketua Umum.

“Saya diminta untuk menjadi Ketum Lamahu, padahal saya sudah tua. Tapi, saya pikir ini untuk kepentingan rakyat, saya bersedia. Di situlah saya berkarya dan

berkiprah, antara lain mengembangkan program-program, termasuk pengembangan sumber daya manusia (SDM), program beasiswa untuk mereka yang mau sekolah tapi tidak mampu, dan sekarang kita lagi giat-giatnya melakukan promosi kebudayaan Gorontalo secara nasional,” terang Fadel.

Kegiatan promosi kebudayaan yang terbaru, lanjut Fadel, adalah Festival Budaya Betawi dan Gorontalo tahun 2022 lalu. Festival ini dilaksanakan di DKI Jakarta dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan waktu itu. Festival kemudian dilanjutkan di Gorontalo.

“Dengan kegiatan itu, masyarakat luas menjadi kenal dengan budaya Gorontalo dan Betawi, dan ternyata dua budaya ini memiliki

akar budaya yang sama, yakni Melayu. Festival ini, ke depan akan terus dikembangkan kualitasnya dan diperluas kalau bisa sampai ke seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri,” tambahnya.

Pada kesempatan itu, Fadel Muhammad juga menyampaikan bahwa pelajar dan mahasiswa di luar Gorontalo juga harus concern pada perkembangan kepemimpinan daerah. Gorontalo saat ini membutuhkan pemimpin pilihan rakyat yang mampu membawa Gorontalo menjadi Provinsi besar dan mampu memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyatnya.

“Tidak lama lagi tepatnya Tahun 2024, Indonesia akan menggelar Pemilu Serentak 2024. Pilkada serentak untuk memilih kepala daerah akan diselenggarakan bulan November 2024. Untuk itu, kalian harus bijak memilih. Mulai dari sekarang kalian harus jeli melihat kriteria pemimpin daerah yang bagus dan lakukan edukasi juga kepada masyarakat,” ungkap Fadel Muhammad.

Kepada para mahasiswa, Fadel Muhammad menyampaikan beberapa kriteria calon pemimpin daerah yang baik. “Dari pengalaman saya menjabat Gubernur Gorontalo selama dua periode, ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan kriteria calon pemimpin yang baik. Pertama, memiliki kemauan dan kemampuan membuat terobosan-terobosan. Kedua, keberanian membuat inovasi baru, dan ketiga, dia harus memiliki *network* yang kuat di tingkat nasional,” pungkasnya. □

DER



Terima ILUNI (Ikatan Alumni UI)

Bamsoet Dukung Pelaksanaan Zero Discrimination Day 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo bersama Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) didukung UNAIDS Indonesia, serta Diesel One Solidarity Community yang difasilitasi oleh lembaga ReThinkbyAWR Strategic Partnership, akan menyelenggarakan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersamaan dengan acara Zero Discrimination Day 2023 dalam rangka menyambut Hari Tanpa Diskriminasi Sedunia.

Rencananya acara itu diselenggarakan pada 1 Maret 2022 di Gedung Nusantara V MPR RI. Peserta ditargetkan mencapai 200 orang. Terdiri dari mahasiswa, pengurus

organisasi kemasyarakatan, pengurus partai politik, filantropi, aparaturnegak hukum, hingga kalangan masyarakat umum lainnya. “Visi acara ini untuk mendorong agar perempuan dan anak-anak pada khususnya bisa hidup di dunia yang bebas dari segala bentuk diskriminasi,” ujar Bamsoet usai menerima pengurus ILUNI UI di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III MPR RI, Jakarta, Jumat (20/1/23).

Hadir pengurus ILUNI UI, antara lain Ketua Umum Didit Ratam, Sekjen Ahmad Fitrianto, Wakil Ketua Muhammad Adnan, Wakil Ketua Policy Center Marlon Samuel Kansil, Wakil Sekjen Ayuningtyas Widari Ramdhaniar,

serta Founder and Advisor ReThinkbyAWR Strategic Partnership Fitri Wigati Mumpuni.

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan ini menjelaskan, Hari Tanpa Diskriminasi dicetuskan oleh program gabungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang HIV/AIDS bernama UNAIDS. Diperingati sebagai upaya mempromosikan gerakan solidaritas global untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi.

“Menurut UNAIDS, selain diskriminasi terhadap penderita HIV/AIDS, diskriminasi seputar pendapatan, gender, usia, status, kesehatan, pekerjaan, kecacatan, orientasi seksual, penggunaan narkoba, etnis, ras, kelas, suku, dan agama juga masih menjadi masalah hingga saat ini. Ketidaksetaraan tersebut tumbuh lebih dari 70% dari populasi global yang memicu risiko perpecahan serta menghambat pembangunan ekonomi dan sosial,” jelas Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila dan Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Pertahanan dan Keamanan KADIN Indonesia ini menerangkan, pada Hari Tanpa Diskriminasi tahun ini, UNAIDS menentang diskriminasi yang dihadapi perempuan dan anak perempuan dalam segala keragamannya. Sehingga bisa meningkatkan kesadaran serta memobilisasi aksi untuk mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan bagi perempuan dan anak perempuan.

“Di Indonesia sendiri, diskriminasi dalam bentuk Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan masih cukup mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Komnas Perempuan, terjadi peningkatan signifikan kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan, dari 226.062 kasus di tahun 2020 menjadi 338.506 kasus pada tahun 2021. Komnas Perempuan juga mencatat peningkatan pengaduan mencapai 80%, yaitu dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus di tahun 2021,” pungkas Bamsoet. □



Terima Delegasi SMP Negeri I Karanglewas

Sesjen MPR Ajak Generasi Muda Bermimpi Meraih Cita-Cita yang Tinggi



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIS Jendral (Sesjen) MPR RI Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., menyambut kehadiran para guru dan siswa siswi SMP Negeri I Karanglewas Purwokerto di kompleks MPR, DPR, dan DPD RI Senayan, Jakarta. Ma'ruf Cahyono berharap, kehadiran rombongan dari Purwokerto itu bisa menjadi bagian dari proses belajar dan wisata Sistem Tata Negara. Apalagi, di Senayan terdapat tiga lembaga legislative, yaitu: MPR, DPR dan DPD RI.

Sejak masuk di kawasan parlemen Jakarta, para siswa bisa menyerap dalam pikiran, untuk belajar tentang sistem ketatanegaraan. Lalu melihat langsung simbo-simbol ketatanegaraan yang ditampilkan oleh MPR, DPR, dan DPD. Karena ketiganya merupakan representasi lembaga legislatif di Indonesia.

"Waktu semester III di Unsoed, saya juga pernah datang ke MPR sampai berfoto-foto di depan Gedung kura-kura. Tidak dinyana sekarang saya malah berkantor di sini. Bahkan, gedung kura-kura itu sekarang ada di depan ruangan saya. Karena itu, jangan pernah takut bermimpi. Bercita-citalah setinggi langit. Karena sejarah itu bisa berulang, siapa tahu setelah saya akan ada siswa SMP Negeri I Karanglewas yang

mengulang apa yang saya capai," ujar Ma'ruf Cahyono.

Sesjen MPR menyampaikan hal itu pada saat menerima delegasi SMP Negeri I Karanglewas, Purwokerto, Jawa Tengah, yang pada Kamis (2/2/2023) melakukan kunjungan ke lembaga negara, MPR. Dalam kesempatan itu, delegasi SMP Negeri I Karanglewas yang dipimpin oleh kepalanya, Dwi Riyano Darma Setyaningsih, S.Pd., M.Pd., ini juga mendapat materi sosialisasi Empat Pilar MPR yang disampaikan oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono.

Kepada para siswa SMP Negeri I Karanglewas, Ma'ruf Cahyono meminta seluruh pengalaman yang diperoleh selama mengunjungi lembaga legislatif bisa diceritakan kepada saudara-saudara dan teman-teman di Purwokerto. Ini perlu agar mereka yang belum pernah berkunjung ke Senayan juga bisa mengerti. Mereka juga bisa melihat foto-foto yang sudah diambil agar menjadi inspirasi dan semangat untuk berani bercita-cita setinggi langit.

Kehadiran rombongan SMP Negeri I Karanglewas ke MPR, menurut Ma'ruf Cahyono, harus bisa menambah wawasan,

terutama bagi para siswa. Karena Indonesia yang luas dan beragam ini juga bisa ditemukan di MPR. Di MPR terdapat berbagai keberagaman, mulai dari bahasa, suku bangsa, dan agama, sebagaimana keberagaman Indonesia.

Ini tentu berbeda jika dibandingkan dengan Purwokerto. Di sana bahasa yang digunakan dan penduduknya hampir sama. Tetapi di MPR, bahasa sehari-hari bisa berbeda. Bahkan, ada juga yang budayanya berbeda, dan terbawa dalam performanya di MPR. Ada pula yang secara fisik memang berbeda, ada yang rambutnya kriting, ada juga yang lurus, bahkan kulitnyapun berbeda-beda. Itulah Bhinneka Tunggal Ika, begitulah Indonesia.

"Kita butuh wawasan yang luas agar makin percaya diri dalam bergaul. Bukan hanya untuk berhubungan dengan warga sesama bangsa Indonesia. Tetapi juga warga negara lain di seluruh dunia. Bersyukur, saat ini ada gadget sehingga kita semakin mudah mencari teman dan menambah wawasan. Tetapi, jangan menggunakan gadget untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kontraproduktif dan tidak bermanfaat bagi masa depan," pungkasnya. □



H. Bambang Soesatyo, SE., MBA.

Ketua MPR RI

Endapan Dana Pemda di Bank Tidak Boleh Menjadi Preseden

ENDAPAN dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan yang sudah berlangsung cukup lama harus segera dihentikan sebelum menjadi preseden. Sebagai masalah atau persoalan, kebiasaan pengguna anggaran dan kuasa anggaran mengendapkan dana pembangunan itu patut dipahami sebagai salah satu titik lemah dalam proses pembangunan nasional dewasa ini.

Layak disebut titik lemah dalam proses pembangunan, karena pengendapan menjadikan dana ratusan triliun rupiah itu tidak produktif. Padahal pembangunan berkelanjutan yang terus berproses hingga hari ini masih menghadapi fakta masalah tentang kemiskinan hingga kemiskinan ekstrim, masalah puluhan ribu balita yang gagal tumbuh ideal akibat kekurangan gizi kronis (stunting), puluhan ribu anak putus sekolah, masalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, hingga belum terpenuhinya infrastruktur dasar pada belasan ribu desa, termasuk kebutuhan masyarakat pedesaan akan jaringan internet.

Publik yang awam tentang disiplin pengelolaan dan penggunaan anggaran tentu akan kecewa atau marah. Akan muncul asumsi bahwa jika ada kemauan politik dari setiap pemerintah daerah, dana triliunan rupiah itu mestinya bisa digunakan untuk menyediakan gizi yang dibutuhkan puluhan ribu Balita, atau membantu anak-anak putus sekolah. Masalahnya adalah adakah kepedulian kuasa dan pengguna anggaran terhadap rangkaian masalah seperti itu.

Masalah pengendapan dana Pemda sudah berlangsung cukup lama, sehingga dikhawatirkan

menjadi preseden jika dibiarkan berlarut-larut. Kendati sudah berlangsung lama, tak pernah dihadirkan jalan keluar untuk mengatasi atau menyelesaikan masalah ini. Setiap kali menyikapi masalah ini, yang dikedepankan hanyalah kejengkelan yang diumumkan ke publik.

Akibatnya, dari waktu ke waktu, volume dana Pemda yang mengendap di perbankan terus bertambah besar. Per Agustus 2022 misalnya, dana Pemda yang mengendap di bank mencapai Rp 203,42 triliun. Ada tambahan Rp 9,96 triliun atau naik 5,15% dari bulan sebelumnya, karena per Juli 2022 masih berjumlah Rp193,46 triliun. Pada Agustus 2021, dana pemda yang mengendap di bank tercatat Rp178,95 triliun. Terlihat bahwa dalam rentang waktu setahun itu, simpanan dana Pemda bertambah dalam jumlah yang cukup signifikan.

Kuasa dan pengguna anggaran pada masing-masing daerah tentu punya argumentasi sebagai alasan mengendapkan dana itu di bank. Namun, akan selalu muncul pertanyaan mengapa harus diendapkan di bank? Untuk berapa lama lagi dana yang menjadi hak rakyat itu disimpan di bank. Dan, ketika kementerian keuangan sering menyoal fakta pengendapan dana itu, penyikapan yang demikian adalah bentuk lain dari kritik terhadap model pengelolaan sumber daya seperti itu. Bukan hanya tidak produktif, melainkan juga tidak memenuhi etika beranggaran.

Sering dikedepankan alasan bahwa kenaikan pendapatan daerah dan menurunnya belanja Pemda sebagai faktor utama penyebab endapan dana itu. Alasan ini terkesan mengada-ada, dan tentu saja mudah dimentahkan. Apakah ragam kebutuhan

daerah dan masyarakatnya sudah tercukupi sehingga menurunnya belanja daerah itu dapat dibenarkan begitu saja?

Persoalan endapan dana Pemda bernilai ratusan triliun ini di-update lagi oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 30 November 2022. Di forum Rapat Koordinasi Nasional Investasi hari itu, Presiden minta Pemda segera merealisasikan anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD), karena masih ada Rp 278 triliun dana mengendap di bank.

“Tahun lalu, biasanya di bulan-bulan seperti ini paling Rp 200 triliun, Rp 220 triliun. Pagi tadi, kita cek. Uang yang ada di bank masih Rp 278 triliun,” kata Jokowi saat itu. Artinya, hanya dalam hitungan beberapa bulan saja, timbunan dana Pemda di bank bertambah lebih dari Rp 75 triliun, karena di bulan Agustus tahun yang sama masih berjumlah Rp 203,42 triliun. Kalau tidak ada terobosan kebijakan yang segera, jumlah endapan dana Pemda di bank tahun ini akan bertambah lagi dan terus membesar.

Idealnya, fakta persoalan ini harus dilihat dan dipahami sebagai kecenderungan yang tidak sehat. Bahkan sulit diterima akal sehat. Kesannya menjadi sangat ironis, karena ada dana ratusan triliun rupiah yang justru tidak dimanfaatkan ketika proses pembangunan nasional harus diakselerasi mengikuti perubahan zaman. Akal sehat semua orang tentu akan melahirkan desakan agar pengelolaan anggaran yang tidak sehat itu segera diakhiri sebelum dia menjadi preseden.

MPR RI memberi perhatian khusus terhadap kecenderungan yang tidak sehat ini. Maka, pemerintah bersama DPR RI hendaknya segera berembuk guna merumuskan kebijakan untuk mengatasi masalah ini. Pemerintah dan DPR harus berpegang teguh pada prinsip bahwa pengelolaan anggaran yang tidak produktif tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sekali lagi, fakta masalah endapan dana Pemda di bank ini sudah berlangsung cukup lama, dan hingga hari ini belum ada kebijakan atau jalan keluar untuk mengatasinya.

Saat ini, ketika ratusan triliun rupiah dana pembangunan itu hanya disimpan oleh banyak Pemda di bank, sejumlah masalah mendasar

masih terbentang nyata. Masih begitu banyak masyarakat yang belum dijangkau atau dilayani oleh proses pembangunan yang sedang berjalan sekarang ini.

Masih ada fakta tentang kemiskinan ekstrim, termasuk di Jakarta dan beberapa wilayah di Pulau Jawa. Menurut Badan Pusat Statistika (BPS), jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Pada 2021, penduduk berstatus miskin ekstrim mencapai 4,8% dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 10,14 persen.

Data BPS lainnya yang juga patut disimak oleh semua Pemda adalah fakta tentang peningkatan jumlah anak-anak yang putus sekolah pada 2022. Anak putus sekolah terdapat pada semua jenjang pendidikan, dari Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Tingginya angka putus sekolah disebabkan banyak faktor, seperti kurangnya minat anak untuk sekolah, faktor ekonomi, faktor lingkungan hingga faktor kesehatan.

Persoalan Balita stunting pun hendaknya mendapat perhatian semua Pemda. Menjelang akhir Januari 2023, Kementerian Kesehatan mengumumkan bahwa prevalensi stunting masih di kisaran 21,6% pada 2022.

Selain itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) juga mencatat masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Angka kematian bayi tercatat 24 per 1.000 kelahiran. Angka kematian ibu juga masih cukup besar, yakni 230 per 100 ribu kelahiran hidup.

Jika saja semua Pemda mau untuk kreatif dalam mengelola anggaran, sebagian dana yang disimpan di bank itu dapat digunakan untuk mengatasi masalah stunting, anak putus sekolah atau membangun rastruktur dasar di daerahnya masing-masing.

Dana atau anggaran pembangunan yang hanya disimpan di bank jangan sampai menjadi preseden, karena bisa dipastikan bahwa model pengelolaan sumber daya seperti itu tidak dapat menyelesaikan ragam persoalan yang mengemuka di daerah masing-masing. □

Penandatanganan PK di Lingkungan Setjen MPR 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Ruang Rapat Sesjen MPR, Selasa (31/1/2023), Pejabat eselon I dan II di lingkungan Setjen MPR melakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.

Penandatanganan PK ini dilaksanakan untuk memenuhi Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan Permen PAN RB No.52 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penandatanganan PK diawali dengan penandatanganan PK eselon IB, antara Sekretaris Jenderal MPR Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono S.H., M.H., dengan Plt. Deputi Bidang Administrasi Siti Fauziah, SE., MM.

Setelah itu, dilanjutkan dengan PK eselon II, antara Sesjen MPR dengan Kepala Biro Lingkup Deputi Bidang Pengkajian dan Pemasarakatan Konstitusi, dan Inspektur. Berikutnya, dilakukan

penandatanganan PK eselon II antara Plt. Deputi Bidang Administrasi dengan Kepala Biro dan Plt. Kepala Biro Lingkup Deputi Bidang Administrasi.

Usai penandatanganan, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono, mengatakan, penandatanganan PK atau *performance agreement* ini memiliki konsekuensi, yaitu paling minimal harus tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direncanakan setahun ke depan.

Untuk itu, Ma'ruf Cahyono meminta para pemangku kewajiban untuk membuat perencanaan dan proyeksi terhadap capaian-capaian kinerja yang ingin diwujudkan dalam satu tahun ke depan.

Untuk mencapai target kinerja, para pemangku kewajiban yang menandatangani PK, lanjut Ma'ruf Cahyono, telah dilengkapi dengan perangkat, yaitu SDM yang memiliki kapasitas dan kualitas, maka perencanaan dan capaian kinerja dapat direalisasikan.

"*Performance agreement* tidak hanya berbabis pada kuantitas, tapi juga kualitas. Efektif dan efisien bisa menjadi tolak ukur untuk

melihat perkembangan pelaksanaan pekerjaan dalam rangka pencapaian target-target dalam *performance agreement* ini,” jelas pria yang sedang menempuh program Doktorat Kajian Strategi Global di Universitas Indonesia ini.

Perangkat lainnya adalah sumber daya pembiayaan (keuangan) serta dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas. Keduanya untuk mendukung implementasi PK.

Ma'ruf juga mengajak dan menekankan pentingnya meningkatkan kualifikasi kinerja dengan indikator *output*, *outcome*, dan kinerja manfaat. “Tidak hanya berkuantitas tapi juga berkualitas. Mari kita bekerja dengan orientasi yang lebih tinggi, tidak sekadar *output*, tetapi juga *outcome* dan kinerja manfaat,” tegasnya.

Ma'ruf juga mengungkapkan pentingnya unsur-unsur pendukung lainnya, mulai dari struktur maupun non-struktur (yaitu kultur atau kebiasaan bekerja seperti integritas, rasa memiliki organisasi, dedikasi, loyalitas, semangat kerja, kerjasama tim, kiat bekerja). Kultur akan memengaruhi struktur bekerja. “Karena itu perlu dibangun *mindset* yang kuat sehingga capaian target kinerja yang tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas bisa dilaksanakan,” katanya.

Memasuki tahun kelima masa jabatan politik di MPR (tahun 2023 dan 2024), Ma'ruf mengingatkan para pemangku kewajiban yang menandatangani PK untuk berpikir tentang apa yang telah dilaksanakan dan *legacy* yang ditinggalkan. □

MBO, DER

Rakertas Setjen MPR Tahun 2023



FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SEKRETARIAT Jenderal MPR gelar Rapat Kerja Terbatas (Rakertas) di Tangerang, Banten, 1-3 Februari 2023. Rakertas yang bertema ‘Rencana Operasional dan Rencana Aksi Program Kegiatan Tahun 2023’ ini dihadiri Sesjen MPR Prof. Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.; Plt. Deputi Administrasi Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., yang juga sebagai Ketua Panitia dan seluruh jajaran pejabat dari Eselon I hingga IV.

Dalam sambutannya, Siti Fauziah menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rencana operasional dan rencana aksi dari MPR. Rakertas disebut sebagai instrument strategis dalam rangka memberikan dukungan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang lembaga MPR.

“Hal ini mutlak harus disusun dan dilaksanakan di lingkungan Setjen MPR pada awal tahun anggaran 2023,” ujar Ibu Titi sapaan akrabnya.

Siti Fauziah juga mengungkapkan, pertemuan ini sangat penting di mana para pejabat bisa menyusun rencana anggaran, termasuk rencana inovasi. Tak hanya itu, bila ada kendala selama menjalankan kinerja bisa diungkapkan di Rakertas.

“Masing-masing unit dan bagian bisa menyampaikan kendala sehingga bisa didengar oleh semua dan kendala yang disampaikan dipecahkan bersama,” katanya.

Di sesi penutup, Ibu Titi menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan membuat Rakertas bisa berjalan lancar. □

AWG, DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Drs. Guspari Gaus, M.Si, Anggota MPR Fraksi PAN

Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Perlu Dikaji Secara Mendalam

RIBUAN kepala desa se-Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan kompleks MPRDPR/DPD, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari 2023. Kepala desa yang tergabung dalam PAPDESI (Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) ramai-ramai datang ke Jakarta melakukan unjuk rasa di depan kompleks parlemen. Aksi demo itu membuat macet lalu lintas di sekitar kompleks parlemen.

Aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu berakhir setelah anggota dewan menerima delegasi kepala desa. Saat berdemo, mereka mengenakan baju seragam kepala desa (seragam Aparatur Sipil Negara atau ASN), membawa spanduk dan poster bertuliskan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa, dari sebelumnya enam tahun menjadi sembilan tahun. Para kepala desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Salah seorang peserta aksi menyebutkan, masa jabatan selama enam tahun yang diatur melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa belumlah cukup. Alasannya, setelah terpilih sebagai kepala desa, persaingan politik tetap terjadi sehingga banyak waktu yang

terbuang untuk konsolidasi. Selain itu, perlu keberlanjutan pembangunan di desa. Dengan menambah masa jabatan kepala desa maka diharapkan ketegangan setelah pemilihan kepala desa bisa berkurang dan pembangunan bisa berjalan berkesinambungan.

Perpanjangan masa jabatan kepala desa pun menjadi polemik. Untuk mengetahui lebih jauh tanggapan anggota dewan terhadap tuntutan para kepala desa ini, *Majelis* meminta tanggapan dari anggota MPR Fraksi Partai PAN, Drs. Guspari Gaus, M.Si. Berikut uraian Guspari Gaus yang juga anggota Komisi II DPR, komisi yang bermitra dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Petikannya.

Para kepala desa menggelar demo untuk menuntut revisi UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun. Bagaimana tanggapan Bapak dengan aksi demo para kepala desa ini?

Sebagai anggota dewan, tentu kami menerima aspirasi dari semua kelompok

masyarakat, termasuk para kepala desa yang melakukan aksi demo di DPR ini. Tetapi, kami belum menyatakan persetujuan dengan tuntutan yang disampaikan para kepala desa. Kami akan menyalurkan aspirasi para kepala desa itu. Tentu, persoalan yang disampaikan para kepala desa harus dibicarakan di internal DPR, terutama di Komisi II. Revisi UU No. 6 Tahun 2014 seperti tuntutan para kepala desa tidak bisa hanya bertepuk sebelah tangan, harus juga dibicarakan dengan pemerintah.

Presiden Jokowi juga sudah menegaskan bahwa masa jabatan kepala desa sudah diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014. Dalam Pasal 39 UU Tentang Desa disebutkan bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Jadi, para kepala desa bisa menjabat sebanyak tiga kali masa jabatan, atau selama tiga periode, yaitu 18 tahun.

Alasan para kepala desa menuntut perpanjangan masa jabatan adalah karena waktu enam tahun tidak efektif dan untuk kesinambungan pem-

bangunan di desa. Bagaimana Bapak melihat alasan para kepala desa ini?

Tuntutan para kepala desa adalah mereka meminta supaya masa jabatan satu periode itu diperpanjang dari enam tahun menjadi sembilan tahun dan cukup dua periode saja. Alasannya, mereka mengatakan dinamika pelaksanaan Pilkades tidak seperti pelaksanaan Pilkada kabupaten, kota, provinsi. Persoalan dinamika kisruh Pilkades itu bisa berkepanjangan sampai satu tahun. Artinya, mereka mengatakan, efektivitas dari jabatannya tidaklah enam tahun. Oleh karena itu mereka menyampaikan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu agar bisa diperjuangkan dan disalurkan dengan cara merevisi UU No 6 tahun 2014 itu.

Sebelum mereka menyampaikan aspirasi, kebetulan saya baru saja selesai reses di daerah pemilihan. Salah satu aspirasi yang saya tampung, terutama kepala desa di Sumatera Barat, namanya adalah Wali Nagari, memang mereka meminta tuntutan yang sama dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa yang datang ke DPR dan melakukan demo itu.

Para kepala desa yang melakukan aksi demo di depan kompleks parlemen sebenarnya hanya segelintir atau diperkirakan hanya 15% dari jumlah desa yang mencapai 83.000 desa di seluruh Indonesia. Mungkin banyak pula yang tidak meminta perpanjangan masa jabatan kepala desa. Apa pendapat Bapak?

Bahwa aspirasi yang disampaikan para kepala desa yang berdemo belum tentu mewakili mayoritas, kami juga bisa memahami. Namun, semuanya itu tentu menjadi referensi bagi kami di Komisi II DPR untuk melakukan kajian mendalam terhadap masukan, saran, dan pendapat yang disampaikan oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk kepala desa.

Tetapi dinamika dalam aksi ini adalah sesuatu yang lumrah dan biasa. Apalagi dalam suasana tahun politik seperti sekarang ini tentu banyak persoalan yang diajukan oleh berbagai elemen dalam rangka mendapatkan perhatian. Persoalan yang disuarakan para kepala desa mudah-mudahan diterima dan didengar oleh Komisi II.

Bagaimana dengan tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa dari enam tahun menjadi sembilan tahun?

Dalam rapat antara Komisi II DPR dengan pemerintah yang diwakili Menteri Dalam Negeri, saya pribadi meminta kepada

Mendagri untuk melakukan kajian mendalam dari aspek sosial, politik, ekonomi, kemasyarakatan. Kajian itu diperlukan untuk mengetahui apakah perpanjangan masa jabatan kepala desa ini lebih bermanfaat, atau sebaliknya lebih banyak mudharatnya. Kalau memang masa jabatan kepala desa selama 6 tahun yang lebih pas dalam berbagai aspek, maka ini bisa dijadikan ketetapan oleh pemerintah bersama DPR. Tetapi, kalau memang masa jabatan kepala desa selama sembilan tahun adalah solusi dalam rangka mengatasi berbagai persoalan kehidupan, bisa juga menjadi ketetapan pemerintah bersama DPR. Itu yang saya sampaikan kepada Mendagri.

Malah kawan-kawan di Komisi II DPR minta supaya masa jabatan kepala desa disamakan saja dengan masa jabatan kepala daerah kabupaten, kota, provinsi. Artinya, masa jabatan diseragamkan dari tingkat



bawah sampai dengan tingkat atas. Itu gagasan disampaikan kemarin.

Apakah DPR menyetujui atau menolak tuntutan para kepala desa ini? Apakah DPR akan merevisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa?

Perlu saya sampaikan bahwa UU No. 6 Tahun 2014 itu memang masuk dalam ranah Prolegnas 2020-2024. Tetapi revisi UU Desa tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas 2023. Kebetulan saya juga anggota dari Baleg. Jadi, kalau memang pemerintah atau DPR merespon tuntutan para kepala desa ini maka revisi UU tentang Desa bisa menjadi inisiatif dari DPR atau usulan pemerintah, maka tentu harus dilakukan revisi terhadap Prolegnas tahun 2023 ini. Inilah mekanisme untuk melakukan revisi terhadap sebuah undang-undang termasuk dalam hal ini UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tapi perlu diingat, Mahkamah Konstitusi (MK) sebenarnya sudah memutuskan pula bahwa tentang masa jabatan kepala desa itu hanya enam tahun sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014. Ini merupakan keputusan MK tahun 2021. Nah, kalau sudah ada putusan MK ini, dan kita melakukan revisi UU tentang Desa, terutama soal perpanjangan masa jabatan kepala desa, tentu ini juga akan menjadi masalah hukum. Sebab, sudah ada keputusan MK dan keputusan MK itu bersifat final dan mengikat.

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa masa jabatan kepala desa yang diatur oleh UU No. 6 Tahun 2014 itu adalah enam tahun. Persoalannya, sekarang adalah beranikah atau mungkinkah pemerintah bersama DPR untuk merevisi UU itu yang pada hari ini tidak masuk dalam Prolegnas Prioritas di tahun 2023?

Bisakah revisi UU No. 6 Tahun 2014 dimasukkan menjadi Prolegnas Prioritas tahun 2023?

Bisa saja, manakala ada permintaan dari pemerintah bersama DPR untuk dijadikan prioritas di tahun 2023. Tetapi revisi UU tentang Desa itu memang masuk dalam Prolegnas 2020-2024. Itulah kondisi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Bagaimana dengan ancaman para kepala desa yang akan “menghabisi” partai politik yang tidak mendukung perpanjangan masa jabatan kepala desa?

Kita proporsional saja. Jadi tidak ada persoalan dengan adanya ancaman dari para kepala desa. (Ancaman) itu adalah bagian dari khazanah saja. Bagi kami (ancaman) itu adalah jamu, obat, untuk melakukan pertahanan terhadap berbagai aspek kehidupan. Tidak ada persoalan. Tetapi kita tetap bekerja secara profesional sesuai dan untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat. Termasuk juga rakyat itu adalah kepentingan kepala desa yang menyuarakan tuntutan.

Kepala desa dilakukan dengan pemilihan, sehingga jabatannya politis. Apakah ada kepentingan politik di balik tuntutan perpanjangan masa jabatan kepala desa?

Saya tentu menampung aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen. Aspek positif dan negatif, perpanjangan masa jabatan kepala desa, tentu kita perlu melakukan diskusi, kajian mendalam, dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi harus kita kaji lebih mendalam. □



Anak Desa dari Pelosok NTT Juara

Matematika Dunia



Nono

ANAK ini berasal dari pelosok desa di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Caesar Archangel Hendrik Meo Tnunay namanya, biasa dipanggil **Nono**. Usianya 8 tahun, duduk di kelas dua SD Inpres Buraean 2, Kabupaten Kupang.

Anak kelahiran 2 April 2015 berasal dari keluarga sederhana di Amarasi Selatan, Kabupaten Kupang, ini menghentak dunia Internasional dan nasional. Sebabnya, dia berhasil meraih juara 1 Abacus Brain Gym (ABG) International Mathematic Competition 2022. Dalam kompetisi matematika dan sempoa tingkat dunia itu Nono berhasil mengalahkan peserta dari Amerika Serikat dan Qatar, dan menyisihkan 7.000 peserta lainnya dari berbagai negara.

Dalam kompetisi itu Nono berhasil menyelesaikan 15.201 file – dalam satu filenya ada 10 soal. Jadi total soal yang berhasil dikerjakan dalam jangka waktu satu tahun adalah 152.010 soal dalam bahasa Inggris, yang diuji dalam bentuk virtual dan listening. Dia mengikuti kompetisi ini secara online dari Januari sampai Desember 2022.

Hadiahnya uang tunai USD 200 diserahkan oleh Juli Agustar Djonli selaku Founder Abacus Brain Gym (ABG) Amerika Serikat di kantor Gubernur NTT, Selasa, 10 Januari 2023. □

DER

Prihatin Makin Maraknya Kasus KDRT

MUSISI perempuan **Maia Estianty** sangat prihatin dan geram dengan maraknya aksi kekerasan terhadap perempuan. Terakhir kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menimpa artis dan politisi Venna Melinda. Pentolan duo grup musik 'Ratu' ini berharap, tidak ada lagi kasus KDRT seperti yang dialami oleh Venna Melinda dan perempuan lainnya.

"UU Indonesia melindungi korban KDRT dan menghukum keras pelakunya loh," ujar Maia melalui akun media sosialnya, @maiaestianty, pada Rabu (11/1/2023). Mantan istri Ahmad Dani ini mengajak semua korban KDRT untuk berani bersuara, melaporkan dan meminta pertolongan.

"Kalau kamu terkena KDRT, jangan segan meminta bantuan kepada teman, tetangga, atau siapa pun. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, karena ini penting banget. Apakah itu video, CCTV, surat rekaman suara, foto, saksi untuk memperkuat laporan ke polisi," kata Maia. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Maia Estianty



Chaca Frederica

Bantu Warga Terdampak Bencana

HUJAN mengguyur wilayah Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, 30-31 Desember 2022, menyebabkan terjadi bencana banjir dan tanah longsor di 37 titik, dan tersebar di 11 kecamatan di kabupaten tersebut.

Artis **Chaca Frederica**, sebagai istri Bupati Kabupaten Kendal tentu saja tak tinggal diam melihat warganya tertimpa musibah. Dengan menaiki perahu karet, artis yang kerap membintangi berbagai judul sinetron ini, awal Januari 2023, menyambangi rumah-rumah warga yang terdampak bencana banjir.

"Gimana bu, sehat, tetap semangat ya? *Alhamdulillah* ini bantuan, mudah-mudahan manfaat," kata Chaca berusaha menenangkan warganya. Seraya terus memerhatikan wajah Chaca, si Ibu tadi, selain mengucapkan terima kasih dan tampak penasaran ingin tahu siapa gerangan perempuan cantik yang memberi bantuan kepadanya ini.

"Dari mana ya mba?," tanya si Ibu tersebut. Mendengar pertanyaan itu, Chaca pun tersipu malu. "Ini loh istrinya Pak Bupati kita," jelas seorang warga. Si ibu pun menutup mulutnya ikut tersipu malu. Momen lucu ini diunggah Chaca di medsos pribadinya. □

DER



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

De Hakims Aviary Miniatur Hutan Alam di Kandang Burung

JIKA satwa dan fauna liar sudah terancam di alam aslinya, itu berarti kepunahan mereka hanya soal waktu. Kalau tidak ada campur tangan manusia untuk membantu, ancaman kepunahan itu bisa benar-benar terjadi. Karena itu, dibutuhkan kepedulian manusia untuk menjaga satwa dan fauna liar itu agar bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang.

Salah satunya adalah melalui pembangunan aviary, seperti yang dilakukan presenter dan selebritas kandang Irfan Hakim. Selebritas dengan lima anak ini menganggap aviary adalah sumbangsinya terhadap kelestarian alam Indonesia. Meski banyak cara bisa dilakukan, Irfan merasa membuat aviary adalah pelestarian alam yang digemarinya.

De Hakims Aviary nama aviary milik Irfan Hakim beralamat di Jl. Wadas, Jati Cempak, Pondok Gede Kota Bekasi Jawa Barat. Letaknya berada di samping lintasan jalan bebas hambatan Cikampek. Bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 500 meter persegi. Pembangunannya berlangsung selama satu tahun dan diresmikan pemakaiannya pada 2021 silam.

Aviary milik Irfan Hakim ini ibarat hutan buas dengan keanekaragaman hayatinya. Meski begitu, *De Hakims Aviary* bukanlah sebuah kebun binatang. Aviary ini lebih sebagai kandang burung raksasa yang diperbolehkan dimiliki semua orang dengan syarat khusus.

Design yang ada di *DeHakims Aviary* dibuat layaknya alam liar, menyerupai habitat asli para satwa. Seperti pepohonan hijau, sungai, hingga air terjun, semua

terdapat dalam aviary ini. Bahkan beberapa pohon yang ada di tempat tersebut memiliki harga fantastis, mencapai puluhan juta rupiah, bahwa ada pohon yang didatangkan dari luar Jawa.

Percikan suara air terjun dan sungai hingga danau buatan membuat aviary ini terasa makin alami. Untuk membuat aviary terkesan seperti alam sungguhan, Irfan Hakim juga menciptakan gerimis buatan.





FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Terdapat pipa dalam aviary yang di beberapa bagiannya dipasang katup semprotan air untuk membuat gerimis buatan.

Di sana juga terdapat bermacam material dari berbagai daerah di Indonesia, dan itu membuat lingkungan alamnya semakin mendekati keasliannya. Mulai dari pasir, batu hingga kayu.

Ratusan Jenis Burung

Aviary milik Irfan Hakim ini menampung tak kurang dari 300 jenis burung. Beberapa jenis burung tergolong mahal. Beberapa lagi burung-burung langka yang susah ditemukan

di alam aslinya. Burung-burung itu, antara lain: burung unta, merak blorok, merak india, burung hantu, muray, poksai jambul hingga burung macaw. Burung-burung itu berpasangan dan membuat sarang serta berkembang biak di area tersebut.

Selain itu, ada pula burung beo hitam yang eksotis, cantik, dan menawan. Beo mamiang atau tiong emas (*gracula*) adalah sejenis burung anggota suku *sturnidae* (jalak dan kerabatnya). Wilayah persebaran alaminya mulai dari Sri Lanka, India, Himalaya, ke timur hingga Filipina, Jawa (Indonesia) hingga kepulauan Sunda Kecil. Burung ini dapat ditemukan di

dataran rendah hingga dataran tinggi lebih dari 2000 m. Karena kemampuannya menirukan bahasa manusia, burung ini menjadi hewan peliharaan populer.

Di aviary-nya, Irfan juga memelihara jenis mambruk victoria. Mambruk victoria merupakan anggota dari family Columbidae atau kelompok merpati-merpatian. Burung ini hidup dan menyebar di hampir seluruh wilayah pulau Papua.

Laiknya merpati, mambruk victoria selalu berdua-duaan, besar kemungkinan itu adalah pasangannya. Mambruk victoria memiliki keunikan sebagai satu jenis burung yang sangat setia, dan nyaris tidak pernah berselingkuh.

Irfan Hakim sudah dikenal sebagai selebritas penyayang binatang, bahkan jauh sebelum membangun aviary. Ia memelihara berbagai jenis hewan di rumahnya. Mulai dari ikan, kucing, ayam, ular hingga kura-kura. Untuk menjaga kelestarian hewan-hewan peliharaannya, saat ini binatang tersebut dipelihara di aviarynya.

Namun, tidak seperti kebun binatang pada umumnya, aviary ini tidak diperkenankan untuk dikunjungi semua orang. Mereka yang memiliki keperluan atau izin tertentu yang bisa menyaksikan aviary dari jarak dekat. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga agar burung-burung di sana tidak stres, karena terlalu sering bertemu banyak orang. □

MBO



Zulfikar Arse Sadikin, S.IP, M.Si

Beragam Laksana NKRI



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

NAMANYA belum terlalu dikenal. Ia masih di bawah bayang-bayang kebanyakan politisi Partai Golkar yang sudah kenyang dengan asam garam dunia politik. Tetapi, Dia memiliki potensi untuk menjadi salah satu tokoh Partai Golkar di masa akan datang. Dia itu ibarat berlian yang terselubungi lumpur di tengah laut. Namun, laiknya berlian, Dia siap berpondor dan bersinar saat muncul ke permukaan.

Jadi, waktu yang akan menentukan kapan lumpur yang menutup kilau berlian itu tersingkap. Lalu, secara perlahan sinarnya akan menyilaukan ranah politik. "Berlian" itu tak lain adalah Zulfikar Arse Sadikin, S.IP., M.Si., (47), Anggota Badan Pengkajian dan juga Anggota Fraksi Partai Golongan Karya MPR RI. Di DPR, Zulfikar Arse mendapat tugas di Komisi 11. Anggota MPR yang berasal dari Dapil Jawa Timur III, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Bondowoso dan Situbondo, ini pada Pemilu 2019 namanya berada pada nomor urut 1 di surat suara. Ia terpilih dengan jumlah suara 44.532 pemilih.

Salah satu bukti bahwa Zulfikar Arse Sadikin memiliki kemampuan yang terpendam adalah kepercayaan yang sudah Dia miliki di tahun pertamanya sebagai anggota legislatif. Antara lain, dia tempat sebagai anggota Badan Pengkajian MPR, padahal Fraksi Partai Golkar MPR RI memiliki banyak anggota yang juga layak menduduki jabatan di alat kelengkapan MPR tersebut. Tetapi Bang Zul, begitu

dia biasa disapa, terpilih untuk mengemban tugas tersebut di periode pertamanya.

Sebagai Anggota Badan Pengkajian, tak berlebihan jika Zulfikar senantiasa mengikuti isu dan perkembangan sistem ketatanegaraan yang menyertai tugas-tugas MPR. Salah satunya menyangkut wacana evaluasi terhadap penerapan konstitusi. Menurut Zulfikar, evaluasi adalah sesuatu yang memang harus dilakukan, termasuk menyangkut pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Evaluasi, menurut Bang Zul, adalah sesuatu yang wajar, bahkan perlu dilakukan secara berkala: harian, mingguan, bulanan atau tahunan. Yang jelas, prinsipnya adalah, hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini.

"Evaluasi terhadap konstitusi juga sangat penting, untuk mengetahui apakah penerapan UUD melalui UU dan kebijakan lainnya sudah mengarah kepada pencapaian, seperti yang dikehendaki oleh norma-norma di dalam UUD atau belum. Kalau sudah, apa yang harus ditingkatkan. Sedangkan kalau belum, apa yang harus diperbaiki," ungkap anak pertama tiga bersaudara pasangan Drs. Marzuki A.R Simatupang, S.H., M.Si., dan Dra. Marsasih Yusuf., kepada Majalah *Majelis* MPR RI beberapa waktu lalu.

Zulfikar menegaskan, evaluasi terhadap konstitusi tidak selalu



bermakna harus mengubahnya. Sekalipun, perubahan terhadap UUD bukan sesuatu yang tabu. Perubahan terhadap konstitusi memiliki ruang tersendiri, sesuai pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Tetapi harus disertai sejumlah alasan, antara lain: bagian mana saja yang harus diubah, kenapa harus diubah, ada persoalan apa sehingga harus ada perubahan. Lalu kapan waktu yang tepat untuk mengubah, damn semua itu harus dipikirkan.

Wacana yang saat ini berkembang menyertai dorongan evaluasi terhadap konstitusi tidak bertujuan untuk mengubah UUD, tetapi mengubah semangat dalam bernegara atau implementasinya. Apakah perilaku dan tindakan bangsa Indonesia sudah menuju apa yang diinginkan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang merupakan hasil dari empat tahap perubahan. Ini penting agar bangsa Indonesia tidak terburu-buru. Intinya, jangan mengubah dulu, karena UUD NRI Tahun 1945 sudah mengalami empat tahap perubahan.

Pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945, menurut Zulfikar, masih sesuai dengan kondisi kekinian, karenanya belum perlu diubah.

Misalnya saja, pasal soal kedaulatan rakyat. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh UUD. Pertanyaannya, apakah dalam praktiknya rakyat sudah benar-benar berdaulat. Apakah selama ini negara sudah benar-benar bekerja untuk mereka. Dan, apakah kekuasaan yang dicapai dan diraih sudah dimanfaatkan serta digunakan untuk rakyat. Pertanyaan itu harus dijawab, bukan

malah tergesa-gesa untuk mengubahnya. Demikian juga menyangkut, Dewan Perwakilan Daerah, partai politik, juga otonomi daerah.

“Jangan buru-buru mengubah, walaupun ada perubahan itu bukan norma UUD. Menurut saya, UUD sudah mengalami empat tahap perubahan, dan perubahan itu menunjukkan upaya kita untuk bernegara secara lebih baik. Atau yang biasa dinamakan *das sollen* nya. Yang mungkin perlu dipertanyakan atau bahkan diubah adalah *das sein* nya,” tambah Zulfikar.

Menyangkut keinginan para purnawirawan TNI Polri yang menghendaki agar bangsa Indonesia kembali kepada UUD 1945, Zulfikar menilai, kemauan itu bisa berarti bahwa bangsa Indonesia menarik jarum jam sejarahnya. Apalagi, UUD NRI tahun 1945 hasil empat tahap perubahan memberikan banyak perbaikan dibanding sebelumnya. Apalagi, yang selama ini menimbulkan masalah bukan normanya, tetapi mindset dan kulturset masyarakat.

Urung Menjadi ASN

Sebelum sukses menjadi anggota legislatif hasil Pemilu 2019, Bang Zul sudah terbiasa dengan kerja-kerja di DPR, sebagai koordinator Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar. Bahkan sebelum kontestasi pertamanya yang berujung kegagalan, pada 2014 dia juga sudah berinteraksi aktif dengan anggota DPR dengan tugas serupa. Karena itu, meski 2019-2024 adalah periode pertamanya menjadi anggota



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

legislatif, ia tidak merasa canggung sedikitpun. Zulfikar percaya diri untuk bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan anggota yang lain.

Zulfikar sendiri sejak lama memang bercita-cita hendak berkariier di dunia politik. Dulu, saat masih duduk di bangku SLTA, ia ingin menjadi orang yang bisa memerintah. Karena itu, saat masuk perguruan tinggi, Bang Zul mencari jurusan yang dianggapnya cocok. Yaitu, Ilmu Pemerintahan, agar bisa menjadi ASN. Tetapi, karena masa kuliah yang terlalu lama, kesempatannya menjadi ASN hilang oleh batasan usia.

Urung menjadi ASN, pria kelahiran Yogyakarta, 28 Oktober 1975, ini melihat ada kesempatan terjun ke ranah politik. Keputusannya ini sejalan dengan pengalamannya berorganisasi selama kuliah. Di belakang hari, keputusan tersebut terbukti tepat. Selama 10 tahun menekuni pekerjaan sebagai Tenaga Ahli Fraksi, membuatnya semakin paham dengan ranah politik. Sampai akhirnya ia memberanikan diri memutuskan ikut pileg pada 2014.

“Saya sudah bekerja keras, tapi nasib belum berpihak. Harapan mendapat sponsor ternyata bertepuk sebelah tangan. Tetapi itu menjadi pengalaman yang sangat berharga. Meski sempat terpukul, namun saya bangkit untuk menatap dan fokus pada Pemilu 2019,” cerita Zulfikar.

Berbekal pengalaman Pileg 2014, Zulfikar kembali mencoba peruntungannya di ranah politik. Bedanya, ia sudah lebih siap mental dan strategi. Ia juga memiliki kepercayaan diri lebih. Apalagi pada Pemilu 2014, ia memperoleh suara yang signifikan, mencapai 26.850. Dan, pada Pemilu 2019, Zulfikar mendapat dukungan dari kolega dan seniornya, sesuatu yang tidak ia dapat pada kotestasi 2014.

Bagi Alumni Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia ini kegagalan pada Pemilu 2014 bukanlah satu-satunya ketidakberuntungan yang pernah dia dapat. Jatuh dan terjerembab kemudian bangkit lagi adalah ibarat dua sisi mata uang yang selalu ada dalam perjalanan hidupnya.

Pertama ia merasakan situasi tersebut tatkala ikut serta dalam kontestasi pemilihan Ketua HMI di Kongres Makassar tahun 2006.

Saat itu, Zulfikar adalah kandidat yang sangat diperhitungkan. Berasal dari salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia, kehadiran Zulfikar di arena konggres dianggap sebagai kandidat serius. Tetapi nasib berkata lain, kemujurannya urung datang, Zulfikar pun kalah dan gagal menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia.

“Kegagalan kedua, saya terima saat Pemilu 2014. Saat itu saya merasa ditinggal teman yang saya butuhkan bantuannya. Tetapi belakangan saya sadar bahwa perasaan saya itu tidak sepenuhnya benar. Mereka menolong saya pada kontestasi 2019, dan itu berkontribusi sangat besar pada keberhasilan saya duduk di kursi legislatif sekarang ini,” kata bang Zul lagi.

Dari Darah Orangnya

Seperti halnya NKRI, Zulfikar adalah sosok yang lahir, tumbuh, dan berkembang dengan penuh keragaman. Ayahnya, Marzuki Arse Ridwan Simatupang adalah seorang guru yang berasal Sumatera





Utara. Laiknya orang Batak, Marzuki adalah sosok yang keras, tegas dan sportif. Sedangkan ibunya, Marsasi Yusuf, adalah perempuan Sunda dengan kasih sayang dan kelembutannya sebagai orangtua.

Zulfikar lahir dan besar di Yogyakarta, tempat yang jauh dari asal usul kedua orangtuanya. Ia tumbuh di lingkungan yang sarat dengan *unggah-ungguh*, dan seni budaya luhung. Lingkungan, itu membuatnya tumbuh menjadi pribadi yang tetap tenang, sekalipun suasana di sekitarnya tengah terjadi huru-hara. Bertambah besar, Zulfikar bersama keluarganya pindah ke Tulungagung. Dan, itu membuat pergaulannya semakin luas dan beragam.

“Saya dikader langsung oleh bapak, berdarah batak tegas dan sportif. Beliau mengenalkan saya pada dunia organisasi dan melatih saya menjadi pemimpin. Berbekal didikan tersebut, saya tidak pernah menolak saat dipercaya menjadi ketua kelas, memimpin upacara hingga memimpin berbagai organisasi pelajar. Jadi tanpa sadar perjalanan ke DPR adalah kelanjutan dari pelajaran yang saya dapat dari orangtua,” kata suami Nina Damayanti lagi.

Saat mahasiswa, Zulfikar aktif di Himpunan Mahasiswa Islam.

Ia mulai aktif di HMI sebagai Ketua Umum HMI Komisariat Fisipol UGM. Lalu Ketua Umum HMI Cabang Bulaksumur Sleman dan pengurus di Pengurus Besar HMI. Ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Antusiasmenya terhadap organisasi menurun dari ayah dan ibunya yang juga aktivis HMI. Ayahnya adalah aktivis HMI Cabang Yogyakarta periode 1977-1978 dan bertemu calon istrinya ketika sama-sama menjadi aktivis HMI. Tidak jauh berbeda, Zulfikar juga bertemu dengan istrinya Nina Damayanti sesama aktivis HMI. Selesai dari UGM, ia melanjutkan studi Master Ilmu Politik di Universitas Indonesia pada 2004 dan lulus tahun 2008.

Sebagai bagian dari lembaga Legislatif, Zulfikar masih akan meneruskan kiprahnya di Senayan. Tak ada sedikitpun terbersit untuk meloncat ke wilayah eksekutif, seperti beberapa anggota legislatif lainnya. Sepanjang Dia bisa, selama itu pula ia akan terus bersama Fraksi Partai Golkar di Senayan.

“Kalau tiba-tiba di tengah jalan, dapat mandate ke eksekutif, itu adalah bonus,” pungkasnya. □

MBO



Biodata

Nama : **Zulfikar Arse Sadikin, S.IP, M.Si**
 Tempat/Tg. lahir : Yogyakarta, 28 Oktober 1975
 Nama Istri : Nina Damayanti

Riwayat Pendidikan

- S2 Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2004 – 2008)
- S1 Ilmu Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada (1994 – 2003)
- SMA Negeri Kauman Tulungagung (1991 – 1994)

Riwayat Pekerjaan

- Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Dapil Jatim III (Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo)
- Tenaga Ahli Fraksi Partai Golkar (2010 – 2019)
- Staf Sekretariat PPK Ditjen OMD Kemendagri (2008)
- Direktur Institute For Democracy And Walfarism (IDW) (2007 – 2012)

KUHP Baru dan HAM Indonesia

INDONESIA akhirnya memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)-nya sendiri. Pada Selasa (6/12), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Pemerintah menyetujui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Kitab ini mengusung semangat dekolonisasi hukum pidana Indonesia yang sebelumnya hanya 'copy paste' dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) atau KUHP milik Belanda. Walaupun semangat dekolonisasi ini masih terasa dengan 'dihidupkannya kembali' pasal penghinaan thd presiden dan lembaga-lembaga negara, sehingga sempat menimbulkan insiden walk out Anggota DPR dari FPKS Iskan Qolba Lubis karena tidak diberikan kesempatan yang cukup untuk menyampaikan aspirasi dan keberatannya sesuai sikap Fraksinya yg memberikan berupa catatan penolakan atas dihidupkannya kembali pasal penghinaan tersebut, tetapi ada juga beberapa poin pasal yang perlu disoroti, terutama terkait dengan aspek kesusilaan dan hak asasi manusia.

Salah satu ketentuan yang oleh publik bahkan oleh Dubes AS, perwakilan PBB dan lain-lain, disorot dalam KUHP yang baru, adalah perluasan ruang lingkup zina dari KUHP yang lama. Pada KUHP lama, larangan zina dalam Pasal 284 mengatur bahwa hubungan seksual di luar nikah dapat dianggap zina jika pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang yang sudah menikah. Sedangkan, untuk pelaku yang sama-sama atau salah satu pihaknya lajang, atau bila para pelaku dari gender sejenis seperti LGBT tidak bisa dikenakan ketentuan ini. Oleh karena itu, sesuai dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat, serta ideologi Pancasila yg menjadi dasar negara, DPR dan Pemerintah pun ingin memperluas cakupan tindak pidana perzinahan tersebut. Setidaknya ada dua pasal yang digunakan untuk perluasan. Pertama, terkait perzinahan dalam Pasal 411 dan kedua, berkaitan dengan kumpul kebo dalam Pasal 412.

Pasal 411 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinahan, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi yang terikat perkawinan.
 - b. Orangtua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.

Pasal 412 berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
 - a. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan.

Bila dibaca secara seksama, sejatinya perluasan ini masih terdapat pembatasan. Yakni, berkaitan dengan delik aduan, bahwa penuntutan hanya dapat dilakukan apabila ada aduan. Pihak yang mengadu pun terbatas, yakni suami atau istri apabila salah satu pelakunya terikat perkawinan sebagaimana dalam KUHP lama dan orangtua atau anak apabila pelakunya tidak terikat perkawinan. Ini tentu perlu menjadi catatan tersendiri, terkait dengan efektifitas penerapan pasal ini ke depannya, sehingga tidak bertabrakan dengan norma-norma kesusilaan dan kesopanan yang hidup di masyarakat.

Meski begitu, kritikan terkait dengan ketentuan ini sangat marak terjadi dari luar negeri. Setidaknya ada beberapa pihak yang mencoba

Oleh:
Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA
Wakil Ketua MPR RI



'ikut campur' terhadap urusan domestik dan kedaulatan hukum bangsa Indonesia ini. Mereka, di antaranya, adalah Duta Besar Amerika Serikat Sun Yong Kim yang mengkritik ketentuan tersebut dan menakuti-nakuti akan berimbas pada investasi atau juga perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang juga ikut mengkritik dan mengkaitkan dengan hak asasi manusia. Sedangkan, negara tetangga, Australia mengeluarkan 'travel warning' pasca disetujuinya KUHP baru ini.

Terkait pernyataan Dubes AS Sun Yong Kim, Saya telah membantah dengan keras untuk tidak mencampuri urusan kedaulatan Indonesia. Ucapannya tersebut sangat menciderai hubungan harmonis antara Indonesia dan Amerika Serikat. Bahkan, Saya pun juga telah menyampaikan bahwa upaya mengkaitkan kedaulatan hukum Indonesia dengan investasi sebagai bentuk dari nekolim (neo kolonialisme-kolonialisme-imperialisme) dalam bentuk HAM. Presiden Jokowi perlu merespon pernyataan tersebut dengan tegas, seperti yang jargon yang pernah disampaikan Presiden Soekarno, "Go To Hell With Your Aid!" sebagai bentuk penolakan segala bentuk nekolim. Saya juga sependapat dengan Pakar Hukum Internasional Prof Hikmahanto Juwana yang meminta agar Pemerintah memanggil perwakilan PBB yang ikut cawe-cawe terhadap KUHP baru ini, dan bila perlu diusir dari Indonesia.

Pandangan yang salah kaprah beberapa pihak dari internasional ini merupakan bentuk ketidakpahaman atas hak asasi manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan teori yang berkembang, penerapan HAM selain memang terdapat aspek universalitas, tetapi ada juga aspek lokalitas, dimana penerapannya perlu memperhatikan kondisi masyarakat setempat. Pasalnya, apabila aspek universalitas tersebut diterapkan secara absolut (tanpa melihat aspek lokalitas), maka yang terjadi adalah human rights imperialism, bentuk penjajahan baru atas nama HAM, atau nekolim sebagaimana istilah yang dipopulerkan Bung Karno.

Aspek lokalitas yang ada di Indonesia adalah kondisi sosial masyarakat yang terkenal religius yang merujuk juga pada sila 1 Pancasila yang diimplementasikan juga ke dalam konstitusi. Di dalam UUD NRI 1945, selain ada banyak jenis HAM yang bertebaran, ada batasan-batasan penerapan HAM di Indonesia. Dan salah satu pembatasan tersebut adalah nilai-nilai agama. Hal ini tertuang dalam Pasal 28J UUD NRI 1945, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Adanya aspek nilai-nilai agama sebagai batasan tentu menunjukkan kekhasan bangsa Indonesia. Ciri khas bangsa Indonesia yang memang coba dijadikan rujukan bagi pembentuk KUHP baru, terutama yang berkaitan dengan kesusilaan. Pasalnya, segala bentuk perzinahan termasuk yang dipraktikkan kalangan LGBT, atau jenis kumpul kebo, tentu saja selain tidak sesuai dengan sila 1 Pancasila, juga melanggar nilai-nilai agama yang hidup dan diakui di Indonesia. Sehingga, tidak tepat apabila memaksakan kebebasan dengan dalih HAM tanpa melihat batasan-batasan yang telah disepakati bersama di dalam konstitusi yang berlaku di Indonesia serta Pancasila yang disepakati menjadi ideologi Bangsa Indonesia. □

Politik Bisa Tidak Kotor

Jazilul Fawaid meluruskan pandangan yang menyatakan bahwa politik itu kotor. Setelah berkecimpung sebagai pengurus NU dan politisi PKB, Dia menarik kesimpulan bahwa tak selamanya politik itu kotor. Politik yang dikedepankan dari dua organisasi itu adalah kepentingan bangsa dan toleransi kepada semua anak bangsa. Pandangan politik bisa tidak kotor tersaji dalam buku yang ditulis.

JANGAN berpolitik karena politik itu kotor. Ungkapan demikian kerap terdengar di telinga kita sehingga membuat banyak orang menghindari dunia politik. Pernyataan demikian semakin kuat dasarnya ketika stigma agama ikut-ikutan menghujatnya. Oleh kelompok ini politik dikatakan sebagai produk Barat sehingga masuk dalam kategori *taghut*. Untuk itu, umat perlu menjauhinya. Ungkapan demikian setiap hari didakwahkan sehingga semakin banyak orang percaya.

Anggapan politik itu kotor memang ada benarnya, sebab kalau melihat perilaku politisi yang ada, sejak zaman sebelum Masehi hingga saat ini, mereka kerap berbohong, licik, menipu, ingkar janji. Bahkan dalam banyak tragedi terjadi pembunuhan dan kudeta hanya untuk mendapatkan kekuasaan.

Menyikapi hal yang demikian, banyak buku yang meluruskan atau tidak seluruhnya membenarkan bahwa politik itu kotor. Diingatkan bahwa politik merupakan jalan yang bisa mengubah kehidupan dan dengan cara-cara yang beretika atau mengandung nilai-nilai agama. Dari sekian buku yang menjernihkan dunia politik adalah buku karya Wakil Ketua MPR Dr. Jazilul Fawaid SQ., MA., yang berjudul: *Jalan Politik Rahmatan Lil'Alamin*.

Buku yang cover-nya didominasi warna hijau itu dibagi dalam enam bab. Dalam Bab I tulisan yang ada sudah menekankan akar dan masalah yang mengupas judul buku. Dalam Pendahuluan, Jazilul Fawaid mengatakan, politik dan agama adalah dua kombinasi yang serasi namun sekaligus juga mudah terbakar. Dalam sejarah kerajaan-kerajaan Islam, agama senantiasa hadir – lebih tepat dihadirkan – dalam dunia politik sebagai unsur legitimasi kekuasaan. Seorang raja atau sultan berhubungan dengan rakyatnya melalui para ulama dari mana simbol-simbol ketuhanan didapatkan untuk mensakralkan dan sekaligus melanggengkan kekuasaannya. Sebaliknya, agama juga membutuhkan kekuasaan untuk penyebarannya, selain demi pengukuhan posisi sosial para agamawan.

Selanjutnya, Penulis mengingatkan dalam buku itu, apabila kombinasi agama dan politik tidak proporsional, ditambah

kepentingan-kepentingan sektarian yang mengancam keutuhan maka daya bakar keduanya bisa sangat menghancurkan.

Dalam *Epilog* buku itu dipaparkan dakwah Nabi Muhammad baik di Mekah maupun Madinah berpijak pada akhlak sehingga Islam benar-benar menampilkan wajah yang ramah untuk semua, Islam yang mengayomi, Islam yang mengajak orang-orang yang berbeda agama sekalipun untuk terlibat dalam membangun perdamaian secara bersama-sama. *Piagam Madinah* yang diinisiasi menjadi pijakan bagi kerjasama yang produktif antaragama dalam bingkai kesatuan dan persatuan.

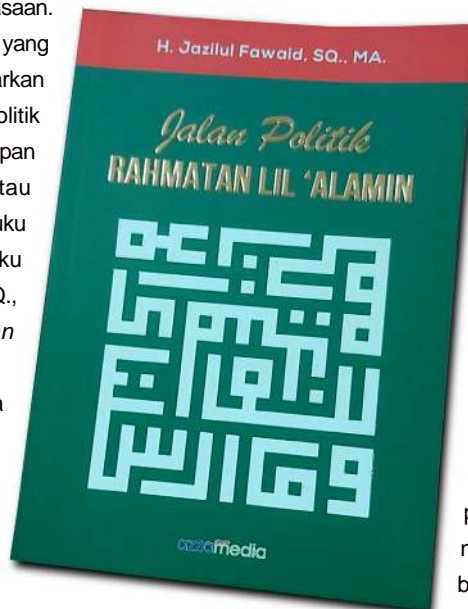
Di buku itu dikutip pandangan Sejarawan Kuntowijoyo. Dosen UGM itu menyebut, Islam memiliki misi ideologis menegakkan *amar*

makruf dan *nahyi munkar*. *Amar makruf* berarti humanisasi dan emansipasi, sedang *nahyi munkar* merupakan upaya liberalisasi. Kedua hal itu berada dalam kerangka keimanan sehingga humanisasi dan liberalisasi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dari transendensi.

Jazilul mengatakan, buku yang ditulis mencoba untuk memberi penafsiran atau kombinasi agama dan politik dalam konstelasi yang positif. Dalam arti politik tidak memanipulasi agama untuk tujuan kekuasaan, dan sebaliknya agama tidak menggunakan kendaraan politik untuk memaksakan kebenaran dan membungkam perbedaan. Meski dirinya berpandangan demikian namun dirinya dengan tegas menyebut, tidak berada dalam kubu *ad-din wa ad-daulah* namun juga tidak berada dalam kubu sekularisme.

Jazilul Fawaid mengakui tulisan-tulisan yang ada memaparkan cerita tentang sejarah berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Partai ini lahir dari organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Sebagai bagian dari NU dan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dirinya tidak lepas atau melepaskan diri dari ikatan-ikatan itu. Pria asal Kabupaten Gresik, Jawa Timur, itu dalam buku yang ada mengatakan apa yang diperjuangkan PKB tidak lain merupakan kelanjutan dari perjuangan para pendiri bangsa dan lebih khusus lagi para ulama NU. □

AWG





MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT



Buku Digital MPR RI



**MUDAH DI AKSES
EFEKTIF & EFISIEN**

**MAJALAH MAJELIS, JURNAL,
PROSIDING DAN HASIL KAJIAN
MPR RI DALAM GADGET ANDA**

**“ Segera
Unduh
Aplikasinya !**

DI PLAY STORE
<http://bit.ly/bukudigitalmprri>

MPR.GO.ID



@MPRGOID



Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI



MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI



**MPR
RUMAH KEBANGSAAN
PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA
DAN KEDAULATAN RAKYAT**



**Buku Digital MPR RI
SETJEN MPR RI**